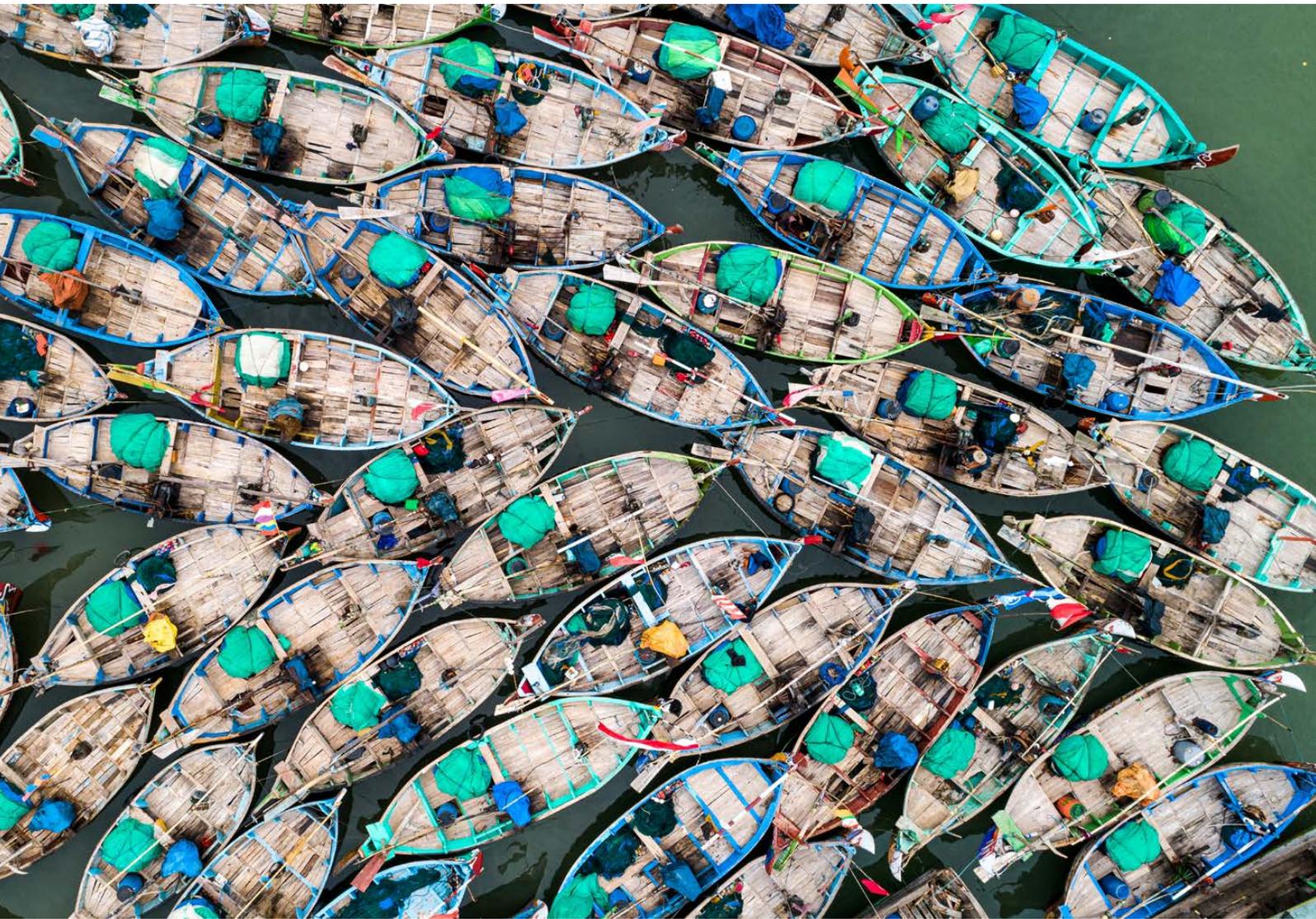


LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Lampung

November 2024



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

November 2024

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Lampung

Tim Penyusun

Laporan Perekonomian Provinsi Lampung

November 2024

Penanggung Jawab

Junanto Herdiawan

Koordinator Penyusun

Achmad P Subarkah

Editor

Fiskara Indawan

Tim Penulis

Mutiara Dewi Lestari

Teuku Muhammad Rafi Ihsan

Khaira Alfatih

Sherline Vicky Aisyiyah

Tania

Gia Amadea

Bagus Maulana

Qoirunisa Ayna Fadilla

Fenia Dayu Ananda

Kontributor

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

Tim Implementasi KEKDA Provinsi

Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan

Jl.Hasanuddin No.38

Bandar Lampung – Lampung, 35225

Tel. (0721) 486-355

Fax. (0721) 481-131

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku “Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Periode November 2024” akhirnya dapat diselesaikan. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2023 bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia secara periodik melakukan asesmen terhadap perkembangan ekonomi di daerah, sumber-sumber tekanan inflasi, risiko dan prospeknya serta rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah sejak 1999, asesmen ekonomi regional semakin berperan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional dan upaya untuk menstabilkan harga. Perhatian terhadap perkembangan ekonomi daerah semakin kuat di era pemerintahan saat ini yang menghendaki aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat pada daerah tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah, sehingga disparitas ekonomi antar daerah berkurang. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung melakukan kajian serta memberikan asesmen terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan regional Lampung secara menyeluruh dan dituangkan dalam publikasi “Laporan Perekonomian Provinsi Lampung”. Analisis dalam buku ini mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan inflasi, perbankan dan sistem pembayaran.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, PLN Wilayah Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Ditjen Bea Cukai, Bapenda Provinsi Lampung, dan semua penyedia data yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa hasil kajian ekonomi yang disajikan dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari semua pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Kami juga mengharapkan kiranya kerjasama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, November 2024
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung



Junanto Herdiawan
Direktur

Daftar Isi

Tim Penyusun	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Grafik	VII
Ringkasan Eksekutif	X
Tabel Indikator	XVIII

Bab II		
Keuangan Daerah		18
2.1	APBD Provinsi Lampung	19
2.1.1	Pendapatan Daerah APBD Provinsi Lampung	19
2.1.2	Belanja Daerah APBD Provinsi Lampung	20
2.1.3	Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota	21
2.1.4	Belanja Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota	21
2.2	Pendapatan dan Belanja Negara di Provinsi Lampung APBN di Provinsi Lampung Tahun 2024	22
2.2.1	Pendapatan	22
2.2.2	Belanja	22

Bab I		
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah		2
1.1	Analisis PDRB Sisi Pengeluaran	3
1.1.1	Konsumsi Rumah Tangga	4
1.1.2	Konsumsi Pemerintah	5
1.1.3	Investasi	5
1.1.4	Ekspor dan Impor	6
1.2	Analisis PDRB Sisi Lapangan Usaha	10
1.2.1	LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11
1.2.2	LU Industri Pengolahan	12
1.2.3	LU Perdagangan Besar dan Eceran	13
1.2.4	LU Konstruksi	14
1.2.5	LU Transportasi dan Pergudangan	15

Bab III		
Perkembangan Inflasi		26
3.1	Inflasi Umum Gabungan Dua Kota dan Dua Kabupaten di Provinsi Lampung	27
3.1.1	Inflasi Bulanan	27
3.1.2	Inflasi Tahunan	29
3.2	Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	32
3.2.1	Inflasi Kota Bandar Lampung	32
3.2.2	Inflasi Kota Metro	33
3.2.3	Inflasi Kabupaten Mesuji	33
3.2.4	Inflasi Kabupaten Lampung Timur	34
3.3	Inflasi Sumatera	35
3.4	Arah Perkembangan Inflasi Triwulan IV 2024	35
3.4.1	Ekspektasi Inflasi	35
3.4.2	Pengendalian Inflasi	35

BOKS 1		37
Jurus TPID Kendalikan Inflasi: Sinergi yang Kokoh, Inovasi yang Masif		

Bab IV			
Stabilitas Keuangan Daerah	42	Bab VI	64
4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga	43	6.1 Ketenagakerjaan	65
4.1.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga	43	6.2 Nilai Tukar Petani	67
4.1.2 Kinerja Keuangan Rumah Tangga	43	6.3 Kemiskinan	69
4.1.3 Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan	44		
4.1.4 Eksposur Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga	44		
4.2 Asesmen Sektor Korporasi	45		
4.2.1 Kinerja Korporasi	45		
4.2.2 Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi	45		
4.3 Asesmen Institusi Keuangan	46		
4.3.1 Bank Umum	46		
4.3.2 Bank Syariah	47		
4.4 Perkembangan Kredit UMKM	48		
4.5 Peningkatan Akses Keuangan UMKM	48		
Bab V		Bab VII	76
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	52	Prospek Perekonomian	76
5.1 Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai	53	7.1 Pertumbuhan Ekonomi	77
5.1.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal	53	7.1.1. Prospek Ekonomi Global dan Nasional	77
5.1.2 Penyediaan Uang Layak Edar	53	7.1.2. Prospek Ekonomi Provinsi Lampung	78
5.1.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu	54	7.2 Inflasi	80
5.2 Perkembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia	55	7.3 Rekomendasi	80
5.3 Perkembangan Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik	55		
5.3.1 Perkembangan Transaksi APMK	55		
5.3.2 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	56		
5.4 Perkembangan Merchant & Pengguna QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)	57		
5.5 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)	58		
BOKS 2	61		
Ajak Masyarakat Cinta Rupiah, Bi Lampung Gelar Siger Fest 2024			

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha (% yoy)	11
Tabel 2.1	Struktur Pendapatan APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)	19
Tabel 2.2	Struktur Belanja APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)	20
Tabel 2.3	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah Negara	21
Tabel 2.5	Laporan Arus Kas Keluar di Provinsi Lampung	23
Tabel 3.1	Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Juli 2024	27
Tabel 3.2	Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Agustus 2024	28
Tabel 3.3	Lima Komoditas Inflasi & Deflasi September 2024	28
Tabel 3.4	Inflasi Bulanan Menurut Kelompok (pangsa % mtm)	29
Tabel 3.5	Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok (% yoy)	29
Tabel 3.6	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman Non Alkohol & Tembakau (% yoy)	30
Tabel 3.7	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)	31
Tabel 3.8	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)	31
Tabel 3.9	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)	31
Tabel 3.10	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)	32
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Bank Umum Provinsi Lampung	46
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Bank Syariah Provinsi Lampung	47
Tabel 4.3	Akses Klaster Binaan Bank Indonesia	49
Tabel 4.4	Sebaran Debitur KUR berdasarkan Kabupaten/ Kota Tw III 2024	49
Tabel 6.1	Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung	65
Tabel 6.2	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung	68
Tabel 6.3	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2024	70
Tabel 6.4	Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan III 2024	71
Tabel 6.5	Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan III 2024	72
Tabel 7.1	Proyeksi Perekonomian Global 2024	77
Tabel 7.2	Harga Komoditas Ekspor dan Impor Utama Provinsi Lampung	79

Daftar Grafik

Grafik 1.1	PDRB Provinsi Lampung	3	Grafik 1.29	Distribusi Impor Non Migas Berdasarkan Komoditas	10
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera, dan Lampung	3	Grafik 1.30	Distribusi Impor Non Migas Berdasarkan Negara Asal	10
Grafik 1.3	Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi Lampung	4	Grafik 1.31	Pangsa PDRB Lapangan Usaha	10
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen	4	Grafik 1.32	Produksi Gabah Kering Giling	11
Grafik 1.5	Likert Scale Tingkat Upah, Tenaga Kerja dan Penjualan Domestik	4	Grafik 1.33	Produksi Jagung Pipilan Kering	11
Grafik 1.6	Pertumbuhan Nilai Tukar Petani	5	Grafik 1.34	Produksi Ubikayu	12
Grafik 1.7	Kredit Konsumsi	5	Grafik 1.35	Volume Impor Pupuk	12
Grafik 1.8	DPK Pemerintah Daerah	5	Grafik 1.36	SKDU LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12
Grafik 1.9	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri	6	Grafik 1.37	Indeks Harga yang Diterima Petani	12
Grafik 1.10	Perkembangan Penanaman Modal Asing	6	Grafik 1.38	Southern Oscillation Index	12
Grafik 1.11	SKDU Investasi	6	Grafik 1.39	Impor Industri Manufaktur	13
Grafik 1.12	Kredit Investasi	6	Grafik 1.40	Prompt Manufacturing Index dan Kapasitas Terpakai Industri Pengolahan	13
Grafik 1.13	Total Volume Angkutan Barang (Muat) Moda Transportasi Laut, Rel dan Udara	6	Grafik 1.41	Konsumsi Listrik Industri	13
Grafik 1.14	Perkembangan Ekspor Non Migas Luar Negeri	7	Grafik 1.42	Kredit LU Industri Pengolahan	13
Grafik 1.15	<i>Prompt Manufacturing Index</i> Mintra Dagang Utama Provinsi Lampung	7	Grafik 1.43	Omset Penjualan Eceran	13
Grafik 1.16	Perkembangan Ekspor Lemak dan Minyak Hewan/Nabati	7	Grafik 1.44	Penjualan Kendaraan Bermotor	14
Grafik 1.17	Perkembangan Harga CPO Dunia	7	Grafik 1.45	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Tujuan Lampung	14
Grafik 1.18	Perkembangan Ekspor Komoditas Kopi, Teh dan Rempah	7	Grafik 1.46	Kredit LU Perdagangan Besar dan Eceran	14
Grafik 1.19	Perkembangan Harga Kopi Robusta Dunia	8	Grafik 1.47	Kredit Kendaraan Bermotor	14
Grafik 1.20	Perkembangan Ekspor Komoditas Bahan Bakar Mineral	8	Grafik 1.48	SBT Realisasi Tenaga Kerja LU Konstruksi	14
Grafik 1.21	Perkembangan Harga Batubara Dunia	8	Grafik 1.49	Realisasi Pengadaan Semen	15
Grafik 1.22	Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas	8	Grafik 1.50	Pertumbuhan Angkutan Barang Moda Transportasi	15
Grafik 1.23	Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan	8	Grafik 1.51	Pertumbuhan Penumpang Moda Transportasi	15
Grafik 1.24	Perkembangan Impor Luar Negeri	9	Grafik 1.52	SBT Realisasi Tenaga Kerja LU Transportasi dan Pergudangan	15
Grafik 1.25	Perkembangan Bahan Baku Penolong	9	Grafik 1.53	Kredit LU Transportasi, Pegudangan & Infokom	15
Grafik 1.26	Perkembangan Impor Barang Konsumsi	9	Grafik 2.1	Perkembangan APBD Provinsi Lampung	19
Grafik 1.27	Perkembangan Impor Barang Modal	9	Grafik 2.2	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Lampung	20
Grafik 1.28	Perkembangan Impor Barang Modal Pendukung Kegiatan Industri	9	Grafik 2.3	Realisasi dan Target Pendapatan APBD Provinsi Lampung	20
			Grafik 2.4	Realisasi Belanja per Kab/Kota Triwulan III 2024	22

Daftar Grafik

Grafik 3.1	Inflasi Lampung dan Nasional	27	Grafik 4.9	Pertumbuhan Kredit Perseorangan	44
Grafik 3.2	Sumbangan Inflasi Bulanan Juli, Agustus, September 2024	27	Grafik 4.10	Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan	44
Grafik 3.3	Sumbangan Inflasi Bulanan Juli 2024	27	Grafik 4.11	Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan	45
Grafik 3.4	Sumbangan Inflasi Bulanan Agustus 2024	28	Grafik 4.12	Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial	45
Grafik 3.5	Sumbangan Inflasi Bulanan September 2024	28	Grafik 4.13	Perkembangan Ekspor	45
Grafik 3.6	Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional	29	Grafik 4.14	Rata-Rata Suku Bunga Kredit Bank Umum	45
Grafik 3.7	Perkembangan Harga Beras	30	Grafik 4.15	Perkembangan NPL Kredit Korporasi	45
Grafik 3.8	Luas Panen Padi	30	Grafik 4.16	Pertumbuhan Kredit Bank Umum	46
Grafik 3.9	Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan	30	Grafik 4.17	Pertumbuhan Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan	46
Grafik 3.10	Perkembangan Harga Daging dan Telur	31	Grafik 4.18	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum	47
Grafik 3.11	Perkembangan Harga Sayur Sayuran	31	Grafik 4.19	Pertumbuhan NPL dan LaR Lampung	47
Grafik 3.12	Perkembangan Harga Rokok	32	Grafik 4.20	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	47
Grafik 3.13	Perkembangan Harga Emas Perhiasan	32	Grafik 4.21	Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	48
Grafik 3.14	Perkembangan Harga Bensin	32	Grafik 4.22	Perkembangan Kredit UMKM	48
Grafik 3.15	Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung	32	Grafik 4.23	NPL Kredit UMKM	48
Grafik 3.16	Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung	33	Grafik 4.24	Penyaluran KUR berdasarkan Kabupaten/Kota	48
Grafik 3.17	Inflasi Bulanan Kota Metro	33	Grafik 4.25	Penyaluran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi	49
Grafik 3.18	Inflasi Tahunan Kota Metro	33	Grafik 4.26	Penyaluran KUR berdasarkan Skema	49
Grafik 3.19	Inflasi Bulanan Kabupaten Mesuji	33	Grafik 5.1	Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan	53
Grafik 3.20	Inflasi Tahunan Kabupaten Mesuji	34	Grafik 5.2	Aliran Uang Kartal Inflow	53
Grafik 3.21	Inflasi Bulanan Kabupaten Lampung Timur	34	Grafik 5.3	Aliran Uang Kartal Outflow	53
Grafik 3.22	Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Timur	34	Grafik 5.4	Penukaran Uang Melalui BI	53
Grafik 3.23	Inflasi Sumatera	35	Grafik 5.5	Kas Keliling	54
Grafik 3.24	Ekspektasi Perubahan Harga 3 & 6 Bulan Ke Depan	35	Grafik 5.6	Kas Titipan	54
Grafik 4.1	Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga	43	Grafik 5.7	Perkembangan Pemusnahan UTLE	54
Grafik 4.2	Indeks Keyakinan Konsumen	43	Grafik 5.8	Temuan Uang Palsu	54
Grafik 4.3	Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini	43	Grafik 5.9	Pecahan Uang Palsu Tw I 2024	54
Grafik 4.4	Kredit Perseorangan Lampung	43	Grafik 5.10	Perkembangan Transaksi Kliring	55
Grafik 4.5	Indeks Ekspektasi Konsumen 6 Bulan Mendatang	44	Grafik 5.11	Perkembangan Transaksi RTGS	55
Grafik 4.6	Pertumbuhan DPK Perbankan	44	Grafik 5.12	Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D	56
Grafik 4.7	Komposisi DPK Perbankan	44	Grafik 5.13	Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama	56
Grafik 4.8	Pertumbuhan DPK Perseorangan	44			

Daftar Grafik

Grafik 5.14	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	56	Grafik 6.8	NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya	68
Grafik 5.15	Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)	56	Grafik 6.9	NTP Per Sub Sektor	68
Grafik 5.16	Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan (Hasil SK)	56	Grafik 6.10	Indeks yang Diterima per Sub Sektor	68
Grafik 5.17	Perkembangan Dana Float UE	57	Grafik 6.11	Indeks yang Diterima per Sub Sektor	69
Grafik 5.18	Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi	57	Grafik 6.12	NTP Provinsi-Provinsi di Sumatera	69
Grafik 5.19	Pangsa Transaksi UE Triwulan II 2024	57	Grafik 6.13	Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor	69
Grafik 5.20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi	57	Grafik 6.14	Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional	69
Grafik 5.21	Perkembangan Jumlah Merchant QRIS	57	Grafik 6.15	Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Lampung	69
Grafik 5.22	Pertumbuhan Merchant QRIS Triwulanan	57	Grafik 6.16	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	70
Grafik 5.23	Pangsa Merchant QRIS di Sumatera	58	Grafik 6.17	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	70
Grafik 5.24	Perkembangan Pengguna QRIS	58	Grafik 6.18	Koefisien Gini Lampung dan Nasional	71
Grafik 5.25	Transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung	59	Grafik 7.1	Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung	77
Grafik 5.26	Transaksi KUPVA BB Per Jenis Mata Uang	59	Grafik 7.2	Survei Konsumen Bank Indonesia	77
Grafik 5.27	Pergerakan Kurs Nilai Tukar USD-IDR	59	Grafik 7.3	Ekspektasi Pelaku Usaha atas Kegiatan Usaha ke Depan	78
Grafik 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatera	65	Grafik 7.4	UMP Provinsi Lampung	78
Grafik 6.2	Perkembangan Upah Minimum Lampung	66	Grafik 7.5	Pagu Belanja Pemerintah di Provinsi Lampung	79
Grafik 6.3	Porsi Penduduk Bekerja	66	Grafik 7.6	Konsumsi Batubara Global	79
Grafik 6.4	TPAK Menurut Tingkat Pendidikan	66	Grafik 7.7	Kuota Biodiesel	79
Grafik 6.5	TPT Menurut Tingkat Pendidikan	67			
Grafik 6.6	Share Tenaga Kerja	67			
Grafik 6.7	Hasil SKDU Realisasi Kegiatan Usaha Berdasarkan Sektor	67			

Ringkasan Eksekutif

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tumbuh 4,81% (yoy), realtif stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,80% (yoy).

Secara umum, realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 mengalami pertumbuhan secara yoy.

Ekonomi Makro Regional

Secara umum, perekonomian Lampung pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,81% (yoy), stabil jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,80% (yoy). Capaian tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 4,48% (yoy), namun lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 4,95% (yoy). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan III 2024 berdasarkan ADHB tercatat sebesar Rp125,59 triliun dan berdasarkan ADHK (2010) sebesar Rp72,90 triliun.

Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Provinsi Lampung yang tetap kuat didukung oleh terjaganya permintaan domestik dan peningkatan kinerja sektor eksternal. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,95% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 4,69% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan terjaganya optimisme masyarakat dan daya beli pekerja di LU utama. Adapun kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 2,81%, meningkat jika dibandingkan dengan 2,39% (yoy) pada triwulan sebelumnya seiring realisasi belanja persiapan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak. Lebih lanjut, net ekspor tercatat tumbuh sebesar 51,02% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 42,44% (yoy) sejalan dengan tetap kuatnya permintaan ekspor komoditas utama.

Dari sisi penawaran, kinerja perekonomian Provinsi Lampung didukung oleh peningkatan kinerja LU Industri pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring tetap kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya permintaan ekspor. Kinerja LU Industri pengolahan pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh 10,54% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,79% (yoy), terutama didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 7,87% (yoy), meningkat jika dibandingkan 5,36% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut tercermin dari meningkatnya kinerja penjualan kendaraan bermotor seiring peningkatan pendapatan di subsektor perkebunan. Sementara itu, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat mengalami perlambatan pasca berakhirnya periode panen komoditas padi.

Keuangan Pemerintah

Realisasi pendapatan daerah APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan laporan tercatat meningkat baik secara persentase maupun nominal didorong oleh pendapatan daerah yang meningkat pasca penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Persentase realisasi belanja daerah APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III tercatat lebih rendah dari realisasi belanja pada triwulan III 2023. Terkontraksinya realisasi belanja pemerintah provinsi Lampung tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi belanja modal a.l. pada pos belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya.

Ringkasan Eksekutif

Secara gabungan, realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan kontribusi utama adalah kenaikan PAD. Berdasarkan posnya, anggaran belanja pegawai dialokasikan tumbuh tertinggi di antara pos lain. Namun demikian, realisasi belanja hibah menjadi persentase capaian realisasi belanja terbesar jika dibandingkan dengan triwulan III 2023.

Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan. Hal ini didorong meningkatnya pendapatan cukai sejalan dengan kenaikan cukai hasil tembakau serta meningkatnya pos pendapatan pajak pertambahan nilai yang sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat.

Realisasi belanja APBN sampai pada triwulan III 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 seiring meningkatnya alokasi anggaran belanja APBN di Provinsi Lampung. Realisasi belanja terbesar sampai dengan triwulan III 2024 a.l. belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta belanja berupa realisasi transfer ke daerah dan dana desa sejalan dengan adanya penyesuaian desain lokasi berdasarkan UU HKPD untuk memenuhi standar pelayanan minimal layanan dasar publik daerah dan target pembangunan daerah.

Inflasi

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 terpantau lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,84% (yoy). Tekanan inflasi pada periode laporan disebabkan oleh meningkatnya harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2024 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,13% dan inflasi 3,51% (yoy).

Perkembangan tersebut menunjukkan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah melalui TPID dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Dalam menghadapi tekanan inflasi ke depan, TPID Provinsi Lampung terus berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). TPID Provinsi Lampung turut memantau kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus memberikan himbuan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, sebagai langkah komitmen bersama, KPw BI Provinsi Lampung terus mendukung Gernas Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Inflasi Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,16% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 2,84% (yoy).

Ringkasan Eksekutif

Konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2024 tetap kuat tercermin dari intermediasi perbankan di Provinsi Lampung yang meningkat terutama dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan.

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat mengalami net outflow sebesar Rp0,12 triliun. Transaksi pembayaran melalui RTGS mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,41% (yoy)

Ke depan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah perlu mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi termasuk dampak kenaikan harga pangan global, ketersediaan pupuk, iklim yang membasah, serta peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM

Kinerja rumah tangga pada triwulan III 2024 tetap kuat. Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian Lampung (60,94% PDRB) tumbuh 4,95% (yoy) pada triwulan III 2024, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,69% (yoy). Hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga yang tetap kuat. Pada triwulan III 2024, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh kuat sebesar 11,11% (yoy) dibandingkan dengan 8,76% (yoy) pada triwulan II 2024. Pertumbuhan positif ini sejalan dengan capaian rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Rata-rata IKE pada triwulan III 2024 masih berada di atas level optimis (100) yaitu sebesar 114,67.

Kinerja penyaluran kredit perbankan pada sektor korporasi pada triwulan III 2024 tumbuh kuat sebesar 15,5% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya tercatat sebesar -16,5% (yoy). Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada korporasi terutama bersumber dari kinerja penyaluran kredit pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 9,65% (yoy). Sementara itu, terdapat penurunan kinerja industri pengolahan pada triwulan III 2024 yang terkonfirmasi dari menurunnya indikator realisasi kegiatan usaha. Pada triwulan III 2024 realisasi kegiatan usaha yang ditunjukkan oleh Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tercatat sebesar -1,08% lebih rendah jika dibandingkan dengan 48,49% pada triwulan II 2024.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat mengalami net outflow sebesar Rp0,12 triliun. Kondisi ini sejalan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net outflow sebesar Rp0,05 triliun. Kondisi net outflow yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan kinerja ekonomi yang membaik.

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,41% (yoy) pada triwulan III 2024. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami kontraksi sebesar 8,55% (yoy). Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit tercatat menurun sebesar 10,18% (yoy), penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 10,83% (yoy).

Ringkasan Eksekutif

Sampai dengan September 2024, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 574.291 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatera. Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi merchant QRIS se-Sumatera pada triwulan III 2024 dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara, Provinsi, Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 24,26%, 16,18%, dan 13,33% (qtq). Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 10,58% (qtq). Sementara itu berdasarkan pangsaanya, merchant QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-4 (10,58%) setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Agustus 2024 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,79 juta pekerja, meningkat 1,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami perlambatan sebesar 0,37% poin dari 70,04% pada Agustus 2023 menjadi 70,41% per Agustus 2024. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 sebesar 4,81% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Agustus 2024 tercatat berkontraksi sebesar 0,04% poin, dari 4,23% pada Agustus 2023 menjadi 4,19% per Agustus 2024. Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Agustus 2024 yang sebesar 4,91%.

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan III 2024 mencapai 27,34%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 40,57% penduduk bekerja, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,63%.

Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan. Rata-rata Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 128,71; meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2024 yang sebesar 122,56.

Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (10,69%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,03%. Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 941,23 ribu jiwa pada Maret 2024.

Di sisi lain, transaksi pembayaran melalui SKNBI tercatat berkontraksi sebesar 8,55% (yoy).

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Agustus 2024 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (10,69%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,03%.

Ringkasan Eksekutif

Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian Lampung diperkirakan tetap baik dengan tumbuh dalam kisaran 4,10%-4,90% dengan inflasi yang terkendali dalam level yang terjaga.

Prospek Ekonomi

Perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2024 diperkirakan tetap baik dalam kisaran 4,10 - 4,90%, terutama didukung oleh terjaganya permintaan domestik dan penguatan kinerja neraca perdagangan. Prospek peningkatan kinerja konsumsi pemerintah dan LNPRT diperkirakan menjadi pendukung utama tetap baiknya kinerja permintaan domestik sejalan dengan puncak penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak. Sementara itu, kinerja neraca perdagangan diperkirakan menguat seiring peningkatan ekspor komoditas unggulan. Adapun dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian terutama didukung oleh prospek peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan seiring kenaikan permintaan ekspor.

Pada tahun 2025, pemulihan ekonomi Provinsi Lampung terus berlanjut dengan pertumbuhan yang diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,40 - 5,20%. Dari sisi permintaan, prospek tersebut didukung konsumsi rumah tangga dan investasi di tengah normalisasi kinerja konsumsi pemerintah. Adapun dari sisi lapangan usaha, prospek tersebut didukung oleh perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan peningkatan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran.

Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2024 diperkirakan tetap terjaga pada sasaran, walaupun lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024. Adapun beberapa risiko yang berpotensi mendorong inflasi menjelang pertengahan tahun diantaranya terhadap kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Lebih lanjut, prospek inflasi keseluruhan tahun 2024 diperkirakan dalam level yang terjaga. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



Infografis Perekonomian

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tumbuh 4,81% (yoy), relatif stabil jika dibandingkan dengan 4,80% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik dan penguatan kinerja neraca perdagangan.

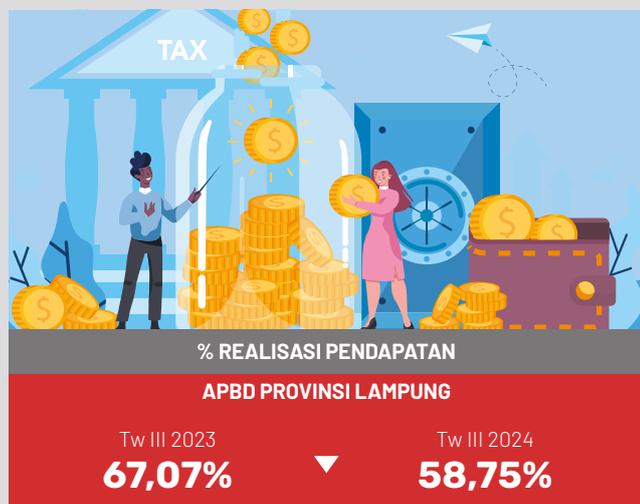


PERKEMBANGAN INFLASI

Adapun inflasi Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat berada dalam target sasaran inflasi yaitu sebesar 2,16% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 2,84% (yoy).



KEUANGAN PEMERINTAH



Infografis Perekonomian

STABILITAS KEUANGAN DAERAH



Berdasarkan Lokasi Bank (% yoy)

Pertumbuhan Kredit	Tw II 2024 1,19 %(yoy)	Tw III 2024 9,64 %(yoy)	Pertumbuhan DPK	Tw II 2024 8,80 %(yoy)	Tw III 2024 8,81 %(yoy)
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja	Tw II 2024 8,31 %(yoy)	Tw III 2024 5,21 %(yoy)	Pertumbuhan Aset (Aset Bersih)	Tw II 2024 9,10 %(yoy)	Tw III 2024 10,02 %(yoy)
Pertumbuhan Kredit Investasi	Tw II 2024 -31,02 %(yoy)	Tw III 2024 29,84 %(yoy)	NPL (Gross)	Tw II 2024 2,39 %	Tw III 2024 2,43 %
Pertumbuhan Kredit Konsumsi	Tw II 2024 8,61 %(yoy)	Tw III 2024 10,64 %(yoy)	LDR	Tw II 2024 118,99 %	Tw III 2024 121,75 %

Berdasarkan Lokasi Proyek

Pertumbuhan Kredit	Tw II 2024 -5,35 %(yoy)	Tw III 2024 -13,13 %(yoy)			
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja	Tw II 2024 -0,75 %(yoy)	Tw III 2024 15,43 %(yoy)			
Pertumbuhan Kredit Investasi	Tw II 2024 -28,57 %(yoy)	Tw III 2024 7,26 %(yoy)			
Pertumbuhan Kredit Konsumsi	Tw II 2024 10,26 %(yoy)	Tw III 2024 12,69 %(yoy)			

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN



	TUNAI	Inflow	Outflow	Net Flow
Tw II 2024	4,73	4,77	-0,05	
Tw III 2024	2,92	3,05	-0,13	

Satuan dalam Triliun Rupiah

	NON TUNAI	Nominal Kliring (Debet + Kredit)	Volume Kliring (Debet + Kredit)	Nominal RTGS	Volume RTGS
Tw II 2024	4,03 Rp Triliun	77,56 Ribu Lembar	42,98 Rp Triliun	16,96 Ribu Lembar	
Tw III 2024	4,39 Rp Triliun	82,09 Ribu Lembar	43,95 Rp Triliun	22,68 Ribu Lembar	

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA		
4,23 Agustus 2023	4,12% Februari 2024	4,19% Agustus 2024

ANGKATAN KERJA (Juta Orang)		
4,90 Februari 2023	5,04 Februari 2024	5,00 Agustus 2024

KEMISKINAN		
11,44% September 2022	11,11% Maret 2023	10,69% September 2024

Tabel Indikator

INFLASI DAN PDRB

INDIKATOR	2021	2022				2022	2023				2023	2024		
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Indeks Harga Konsumen (IHK)														
Bandar Lampung	109,61	112,50	114,48	114,63		115,84	116,26	117,08	118,66		106,00	106,11	106,58	
Metro	110,54	113,82	114,54	115,09		115,90	116,55	117,14	118,60		105,78	105,52	105,38	
Mesuji											110,33	110,75	110,16	
Lampung Timur											109,98	109,57	108,53	
Gabungan	109,71	112,64	114,49	114,68		115,85	116,29	117,09	118,65		107,35	107,31	107,26	
Laju Inflasi (yoy)														
Bandar Lampung	2,30	4,88	7,07	5,53		5,68	3,34	2,27	3,52		2,72	2,24	1,92	
Metro	3,47	5,94	6,76	5,37		4,85	2,40	2,27	3,05		3,21	2,37	1,86	
Mesuji											4,52	3,40	2,84	
Lampung Timur											4,83	4,07	2,57	
Gabungan	2,43	5,00	7,04	5,51		5,59	3,24	2,27	3,47		3,45	2,84	2,16	
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)														
Pertumbuhan PDRB (yoy)	2,77	2,86	5,23	3,94	5,05	4,28	4,94	4,00	3,93	5,40	4,55	3,30	4,80	4,81
"PDRB - Harga Konstan (Miliar Rp)"	246.966,49	60.844,03	66.396,08	66.933,61	63.360,46	257.534,19	63.852,42	69.053,97	69.560,88	66.782,52	269.240,54	65953,82	72361,11	72903,89
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	67.996,36	16.569,68	19.176,38	18.413,94	15.208,96	69.368,96	16.438,36	19.454,83	18.650,02	15.147,84	69.679,69	14626,88	19502,32	18417,76
Pertambangan & Penggalian	12.816,98	3.063,76	3.102,67	3.048,97	3.103,85	12.319,25	3.014,09	3.047,73	3.260,45	3.360,99	12.675,36	3375,80	3214,54	3350,93
Industri Pengolahan	46.351,00	10.940,21	11.943,39	12.350,24	11.333,01	46.566,85	11.302,32	11.882,45	12.412,39	11.673,45	47.257,61	12031,62	12444,73	13718,61
Pengadaan Listrik, Gas	402,62	102,98	106,12	109,01	109,57	427,68	106,33	112,06	112,31	101,92	433,62	89,10	99,56	105,64
Pengadaan Air	272,88	71,16	69,70	71,22	70,94	283,02	71,07	71,14	71,81	70,45	284,47	68,75	71,34	72,42
Konstruksi	25.318,79	6.528,78	6.493,34	6.538,72	6.732,22	26.293,06	6.590,09	6.647,42	7.137,45	7.743,96	28.140,92	7042,32	7184,38	7195,29
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda	30.612,01	8.075,68	8.883,64	9.125,46	9.224,68	35.309,47	9.229,93	9.769,18	9.778,04	9.977,08	38.754,23	10021,92	10292,86	10547,94
Transportasi & Pergudangan	12.449,35	3.292,99	3.628,03	3.873,11	4.187,39	14.981,52	4.142,70	4.328,84	4.394,25	4.649,41	17.500,20	4617,25	4986,59	4859,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.426,13	892,35	937,44	1.001,45	1.027,06	3.858,29	1.020,58	1.106,41	1.119,97	1.127,53	4.374,49	1093,61	1151,14	1185,32
Informasi & Komunikasi	13.816,17	3.209,79	3.502,85	3.556,80	3.593,08	13.862,52	3.593,33	3.770,48	3.740,55	3.819,97	14.924,33	3928,96	4006,67	4091,21
Jasa Keuangan	5.207,37	1.305,27	1.269,90	1.277,15	1.168,83	5.021,15	1.239,99	1.270,57	1.347,02	1.323,79	5.181,36	1335,16	1386,46	1390,35
Real Estate	7.426,51	1.840,43	1.879,26	1.945,04	2.015,45	7.680,18	1.831,04	1.914,91	1.965,92	2.033,99	7.745,86	2011,21	2035,36	2107,21
Jasa Perusahaan	333,25	90,96	95,99	100,24	104,32	391,52	99,44	100,69	105,51	108,56	414,20	109,30	110,20	115,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	8.127,36	1.722,68	2.034,32	2.130,89	2.137,06	8.024,95	1.869,08	2.123,65	1.939,18	2.087,31	8.034,21	2135,11	2238,87	2059,02
Jasa Pendidikan	7.486,89	1.848,05	1.938,93	1.973,11	1.917,46	7.677,55	1.906,41	1.969,36	1.989,31	1.983,94	7.849,02	1977,59	1974,03	2006,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.768,28	706,29	659,47	704,70	694,98	2.765,44	685,51	703,82	728,79	754,41	2.872,53	712,62	768,99	796,05
Jasa Lainnya	2.154,52	582,95	674,65	713,58	731,59	2.702,77	712,15	780,44	807,92	817,93	3.118,44	776,63	857,63	884,64
Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	4.841,16	1.249,59	1.198,49	1.656,93	1.500,09	5.605,11	1.188,42	996,62	1.221,80	1.150,21	4.557,05	1049,15	1102,93	0,00
Volume Ekspor (Ribu Ton)	13.093,24	2.509,16	2.817,26	4.147,32	4.076,16	13.549,89	4.011,47	3.688,00	4.412,29	4.146,49	16.258,25	3781,27	3949,69	0,00
Nilai Impor (Juta USD)	1.395,31	311,31	355,20	356,03	306,62	1.376,90	327,06	304,97	259,84	447,31	1.339,18	315,80	401,46	0,00
Volume Impor (Ribu Ton)	2.151,50	493,88	495,72	494,94	355,98	1.903,34	501,00	461,56	365,81	722,72	2.051,10	550,65	617,93	0,00

Tabel Indikator

SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2022				2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Inflow (Triliun Rp)	3,40	4,76	3,57	3,38	4,77	4,47	4,26	3,36	4,48	4,73	2,92
Outflow (Triliun Rp)	1,46	4,37	2,54	3,28	2,27	5,34	2,11	3,20	3,27	4,77	3,05
Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	18,15	27,34	25,50	30,08	30,88	30,40	42,50	35,28	35,58	42,98	43,95
Volume Transaksi RTGS (Lembar)	32.551,00	19.769,00	18.951,00	12.868,00	14.309,00	15.543,00	16.124,00	14.440,00	12138,00	16962,00	22683,00
Rata-Rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	297,54	448,20	418,10	493,11	506,28	498,36	696,72	578,36	583,28	704,58	720,44
Rata-Rata Harian Volume Transaksi RTGS (Lembar)	533,62	324,08	310,67	210,95	234,57	254,80	264,33	236,72	198,98	278,07	371,85
Volume Kliring Kredit (Lembar)	64.283,00	61.724,00	59.496,00	60.380,00	45.386,00	41.030,00	44.634,00	50.868,00	42157,00	43423,00	46930,00
Nominal Kliring Kredit (Triliun Rp)	4,03	3,96	3,68	3,41	2,69	2,34	2,72	2,62	2,24	2,36	0,00
Rata-Rata Harian Volume Kliring Kredit (Lembar)	1.053,82	1.011,87	975,34	989,84	744,03	672,62	731,70	833,90	691,10	711,85	769,34
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Kredit (Miliar Rp)	66,06	64,92	60,33	55,95	44,16	38,36	44,59	42,95	36,72	38,69	0,00
Volume Kliring Debet (Lembar)	51.895,00	47.243,00	48.042,00	44.591,00	42.807,00	36.027,00	39.602,00	37.360,00	34164,00	34143,00	35166,00
Nominal Kliring Debet (Triliun Rp)	2,56	2,63	2,43	2,23	2,39	1,95	2,08	1,89	1,73	1,67	0,00
Rata-Rata Harian Volume Kliring Debet (Lembar)	850,74	774,48	787,57	731,00	701,75	590,61	649,21	612,46	560,07	559,72	576,49
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Debet (Miliar Rp)	41,97	43,11	39,84	36,49	39,10	31,97	34,10	30,98	28,36	27,38	0,00

PERBANKAN

INDIKATOR	2022				2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Bank Umum											
Total Aset (Triliun Rp)	73,96	76,26	75,21	74,79	74,48	77,56	79,05	78,45	80,22	83,11	84,06
Pertumbuhan Total Aset (%yoy)	11,27	10,42	7,06	3,57	0,70	1,70	5,10	4,89	7,71	7,16	6,34
Pertumbuhan DPK (%yoy)	51,23	53,24	52,60	53,45	54,04	53,44	55,07	55,05	55,88	58,29	60,13
DPK (Triliun Rp)	9,30	10,10	9,17	7,78	10,14	8,02	10,26	8,92	10,76	11,40	11,78
Giro	30,94	32,09	32,37	33,67	31,62	33,02	32,82	33,53	32,47	34,59	36,03
Tabungan	10,99	11,05	11,06	12,00	12,27	12,40	12,67	12,60	12,63	12,29	12,32
Deposito	10,01	8,04	5,90	5,03	5,47	0,37	4,69	2,99	3,41	9,08	9,19
Pertumbuhan Kredit (%yoy)	60,63	62,31	63,28	64,94	63,78	67,46	63,70	65,01	65,94	68,26	69,84
Kredit (Triliun Rp) - Berdasarkan Jenis Penggunaan	31,04	32,65	33,57	34,64	34,24	35,81	37,18	37,39	37,24	38,78	39,11
Modal Kerja (Triliun Rp)	11,16	11,20	11,15	11,44	10,41	12,35	6,86	7,65	8,07	8,52	8,91
Investasi (Triliun Rp)	18,43	18,45	18,56	18,86	19,13	19,30	19,66	19,96	20,62	20,96	21,81
Konsumsi (Triliun Rp)	5,66	5,69	5,85	6,71	5,20	8,26	0,67	0,11	3,38	1,19	9,64
LDR	118,34	117,04	120,30	121,49	118,04	126,24	115,68	119,56	119,96	118,99	121,75
Kredit UMKM (Triliun Rp)	24,21	25,09	25,76	26,46	26,17	26,95	27,65	29,29	29,91	30,98	31,51
Pertumbuhan Kredit UMKM (%yoy)	23,73	25,01	24,06	14,70	8,12	7,41	7,33	10,69	14,28	14,95	13,96
Total Kredit MKM (Triliun Rp)	41,14	42,09	42,91	43,80	44,23	45,18	46,08	47,26	48,12	48,50	49,49
Pertumbuhan Kredit MKM (%yoy)	9,57	9,79	9,85	9,80	7,51	7,34	7,40	7,89	8,79	7,35	7,40
NPL (%) gross	4,70	4,94	4,66	4,55	2,60	2,29	2,81	2,42	2,52	2,39	2,43



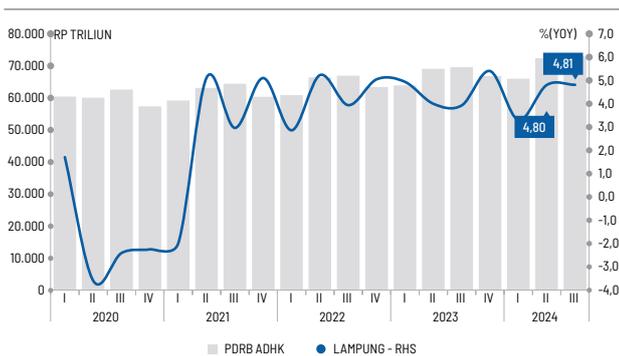
BAB 1

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Secara umum, perekonomian Lampung pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,81% (yoy), stabil jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,80% (yoy). Capaian tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 4,48% (yoy), namun lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 4,95% (yoy). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan III 2024 berdasarkan ADHB tercatat sebesar Rp125,59 triliun dan berdasarkan ADHK (2010) sebesar Rp72,90 triliun.

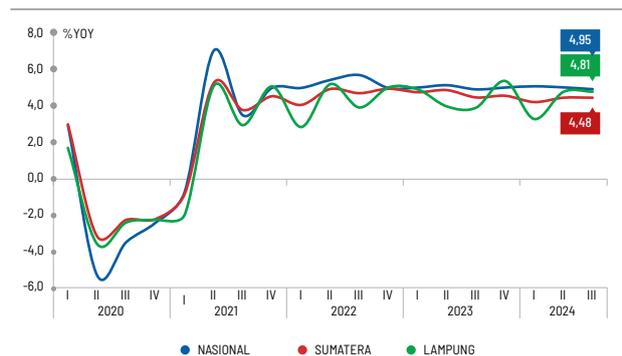
Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Provinsi Lampung yang tetap kuat didukung oleh terjaganya permintaan domestik dan peningkatan kinerja sektor eksternal. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,95% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 4,69% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan terjaganya optimisme masyarakat dan daya beli pekerja di LU utama. Adapun kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 2,81%, meningkat jika dibandingkan dengan 2,39% (yoy) pada triwulan sebelumnya seiring realisasi belanja persiapan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak. Lebih lanjut, net ekspor tercatat tumbuh sebesar 51,02% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 42,44% (yoy) sejalan dengan tetap kuatnya permintaan ekspor komoditas utama.

Dari sisi penawaran, kinerja perekonomian Provinsi Lampung didukung oleh peningkatan kinerja LU Industri pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring tetap kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya permintaan ekspor. Kinerja LU Industri pengolahan pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh 10,54% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,79% (yoy), terutama didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 7,87% (yoy), meningkat jika dibandingkan 5,36% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut tercermin dari meningkatnya kinerja penjualan kendaraan bermotor seiring peningkatan pendapatan di subsektor perkebunan. Sementara itu, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat mengalami perlambatan pasca berakhirnya periode panen komoditas padi.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1 PDRB Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera, dan Lampung

Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,81% (yoy), relatif stabil jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,80% (yoy) (Grafik 1.1). Capaian tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 4,48% (yoy), namun lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 4,95% (yoy) (Grafik 1.2). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan III 2024 berdasarkan ADHB tercatat sebesar Rp125,59 triliun dan berdasarkan ADHK (2010) sebesar Rp72,90 triliun.

1.1 ANALISIS PDRB SISI PENGELUARAN

Dari sisi permintaan domestik, kinerja perekonomian Provinsi Lampung yang tetap kuat pada triwulan III 2024 didukung oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Kinerja konsumsi rumah tangga pada laporan tercatat tumbuh sebesar 4,95% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 4,69% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan terjaganya optimisme masyarakat dan daya beli pekerja di LU utama. Adapun kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 2,81%, meningkat jika dibandingkan dengan 2,39% (yoy) pada triwulan sebelumnya seiring realisasi belanja persiapan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024. Lebih lanjut, kinerja investasi tercatat mengalami perlambatan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,30% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 3,33% (yoy) pada triwulan sebelumnya,

terutama disebabkan oleh penurunan kinerja investasi bangunan yang sejalan dengan perlambatan kinerja LU Konstruksi.

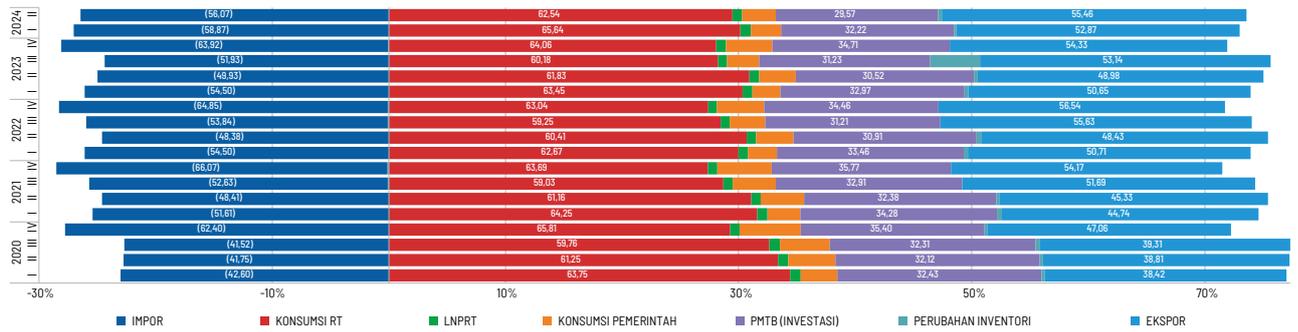
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan yang semakin kuat mendorong terjaganya kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2024. Kinerja net ekspor Provinsi Lampung pada laporan tercatat tumbuh sebesar 51,02% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 42,44% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor luar negeri komoditas unggulan Provinsi Lampung di tengah penurunan kebutuhan impor luar negeri. Pertumbuhan total ekspor Provinsi Lampung pada triwulan laporan tetap kuat sebesar 14,01% (yoy), sedikit melambat jika dibandingkan 14,20% (yoy) pada triwulan sebelumnya seiring dengan normalisasi ekspor komoditas antar daerah. Kinerja ekspor yang tetap kuat dipengaruhi oleh tingginya permintaan ekspor untuk komoditas unggulan, terutama kopi robusta di tengah periode panen dan Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI) yang tetap tinggi. Sejalan dengan perkembangan ekspor, total impor Provinsi Lampung pada triwulan laporan tumbuh sebesar 11,73% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 13,47% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut sejalan penurunan kebutuhan impor gula rafinasi pasca tingginya realisasi impor pada triwulan sebelumnya dan penurunan impor jagung seiring perbaikan produksi domestik.

Pada triwulan III 2024, struktur perekonomian Provinsi Lampung dari sisi permintaan masih didominasi oleh 2 (dua) komponen

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran

NO	KOMPONEN	TW I 2022 (yoy)	TW II 2022 (yoy)	TW III 2022 (yoy)	TW IV 2022 (yoy)	TW I 2023 (yoy)	TW II 2023 (yoy)	TW III 2023 (yoy)	TW IV 2023 (yoy)	TW I 2024 (yoy)	TW II 2024 (yoy)	TW III 2024 (yoy)
1	Pengeluaran Konsumsi RT	4,03	5,42	4,80	4,67	4,88	5,87	5,21	4,64	4,67	4,69	4,95
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,23	5,04	3,66	-4,36	6,90	9,29	8,53	17,36	19,13	13,55	9,32
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-2,91	-3,79	-7,61	-5,06	3,01	4,62	-2,94	3,36	15,67	2,39	2,81
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,33	3,40	1,15	2,83	2,81	2,14	4,37	7,08	2,31	3,33	1,30
5	Ekspor Barang dan Jasa	2,33	4,74	9,91	8,89	10,11	9,86	0,44	4,44	6,10	14,20	14,01
6	Impor Barang dan Jasa	2,65	2,28	7,60	4,69	8,10	11,44	1,40	4,80	8,74	13,47	11,73
	PDRB	2,86	5,23	3,94	5,05	4,94	4,00	3,93	5,40	3,30	4,80	4,81

Sumber: BPS, diolah

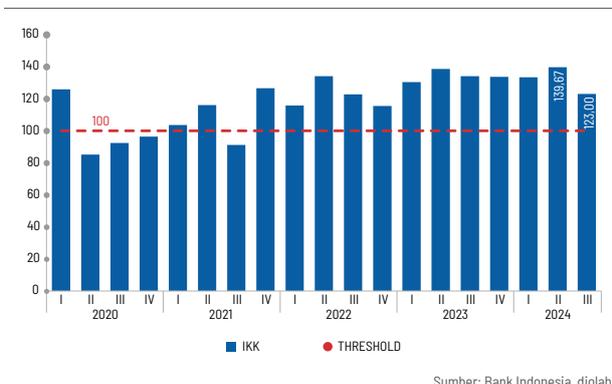


Grafik 1.3 Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi Lampung

permintaan domestik, yaitu Konsumsi rumah tangga dan Investasi (Penanaman Modal Domestik Bruto). Konsumsi rumah tangga tercatat berkontribusi sebesar 58,60% terhadap PDRB Provinsi Lampung, kemudian diikuti oleh Investasi dengan kontribusi sebesar 30,40% (Grafik 1.3). Adapun komponen permintaan domestik lainnya, yaitu konsumsi pemerintah dan Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tercatat memiliki kontribusi sebesar 5,67% dan 1,56%. Dari sisi eksternal, ekspor memiliki kontribusi yang cukup dominan terhadap PDRB Provinsi Lampung, yaitu sebesar 50,43%. Namun demikian, Provinsi Lampung juga memiliki permintaan impor yang cukup tinggi, tercermin dari kontribusi impor yang tercatat sebesar 56,07% terhadap PDRB Provinsi Lampung. Perkembangan struktur komponen eksternal PDRB Provinsi Lampung tersebut menjadi tantangan dalam upaya mendorong kontribusi net ekspor yang lebih tinggi terhadap perekonomian.

1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Kinerja konsumsi rumah tangga meningkat sejalan dengan tetap terjanganya daya beli dan optimisme masyarakat. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh 4,95% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 4,69% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga didukung oleh terjanganya optimisme konsumen pada triwulan laporan, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang terjaga dalam zona ekspansif

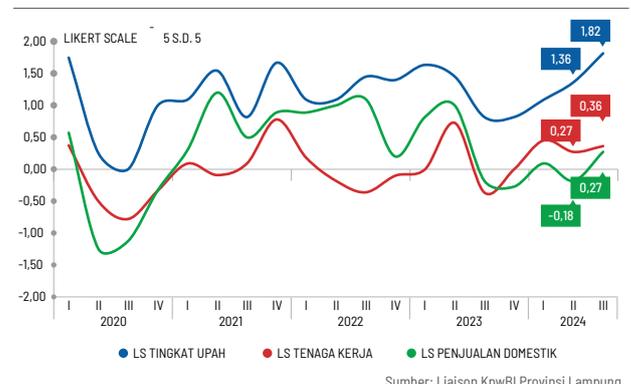


Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen

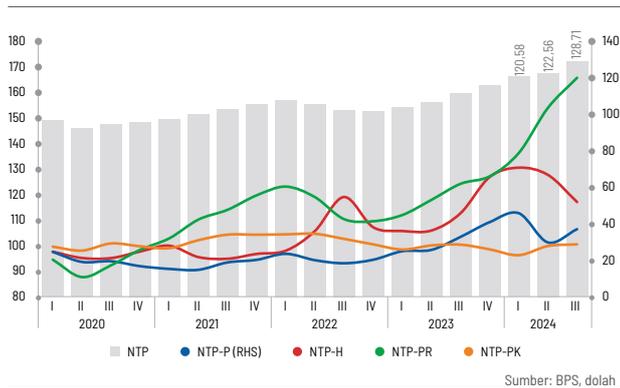
sebesar 123,08, meski lebih rendah jika dibandingkan dengan 139,67 pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.4). Optimisme yang tetap kuat didukung oleh terjanganya daya beli masyarakat seiring pendistribusian tunjangan ke-13 untuk ASN dan kesejahteraan petani yang tetap baik. Perkembangan ini turut terkonfirmasi dari kenaikan penjualan domestik yang diikuti dengan kenaikan tingkat upah dan penggunaan tenaga kerja oleh kontak liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI Provinsi Lampung) (Grafik 1.5).

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2024 sejalan dengan berlanjutnya peningkatan pendapatan tenaga kerja di LU utama dan dukungan pembiayaan perbankan.

Sebagai lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Provinsi Lampung, pendapatan pekerja di LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan laporan terpantau tetap baik. Hal ini tercermin dari rata-rata nilai tukar petani (NTP) pada triwulan laporan sebesar 128,71, lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 122,56. Kenaikan NTP terutama didorong oleh berlanjutnya kenaikan NTP sub-sektor perkebunan (NTP-Pr) sejalan dengan masuknya puncak panen kopi robusta. Di samping itu, NTP sub-sektor tanaman pangan (NTP-P) juga menunjukkan kenaikan pada triwulan III 2024 sejalan perbaikan produksi jagung dan ubikayu (Grafik 1.6). Lebih lanjut, dukungan perbankan terhadap konsumsi rumah tangga tetap kuat, ditunjukkan oleh kinerja penyaluran kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 12,69%



Grafik 1.5 Likert Scale Tingkat Upah, Tenaga Kerja dan Penjualan Domestik

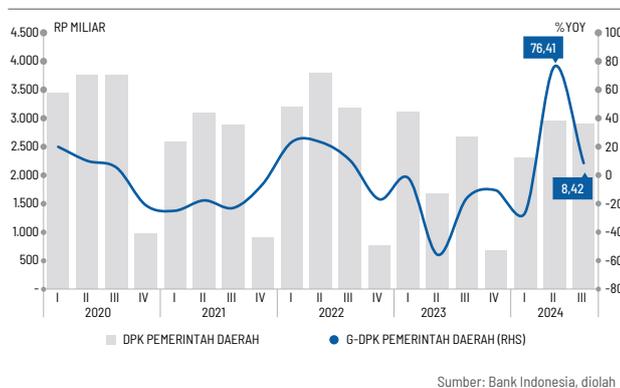


Grafik 1.6 Pertumbuhan Nilai Tukar Petani

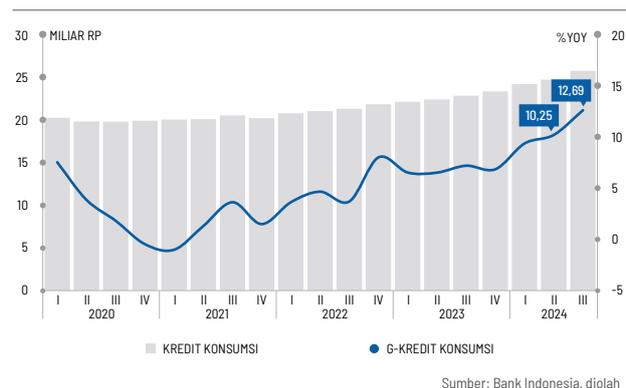
(yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 10,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.7).

1.1.2 Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan III 2024 meningkat didorong oleh realisasi belanja hibah dalam rangka persiapan Pilkada. Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan tercatat tumbuh 2,81% (yoy), meningkat dibandingkan 2,39% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut salah satunya didukung oleh belanja APBD dalam rangka persiapan Pilkada pada November 2024, tercermin dari pertumbuhan realisasi belanja hibah yang tetap kuat sebesar 111,10% (yoy) pada triwulan laporan. Di samping itu, realisasi belanja bantuan sosial (bansos) pada triwulan III 2024 juga menunjukkan perbaikan meski masih terkontraksi sebesar 6,22% (yoy), namun tidak sedalam triwulan sebelumnya yang terkontraksi 56,60% (yoy). Realisasi belanja bantuan sosial yang lebih baik sejalan dengan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) pada September, serta penyaluran bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dilakukan secara bertahap pada Juli-Agustus dan September-Oktober 2024. Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah yang meningkat turut tercermin dari perkembangan DPK Pemerintah Daerah yang tumbuh sebesar 8,42% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 76,41% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.8).



Grafik 1.8 DPK Pemerintah Daerah



Grafik 1.7 Kredit Konsumsi

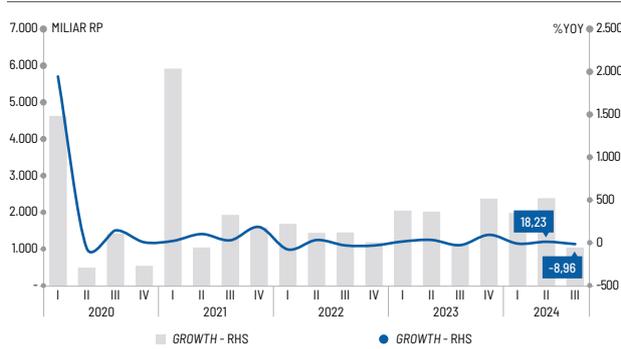
Kinerja konsumsi pemerintah yang lebih tinggi tertahan oleh belum optimalnya realisasi belanja APBD pada triwulan III 2024. Realisasi belanja APBD konsolidasi seluruh pemda di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat mengalami kontraksi sebesar 9,07% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,97% (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh perlambatan realisasi belanja modal yang dipengaruhi faktor *based effect* tingginya realisasi belanja perbaikan jalan pada paruh kedua di tahun sebelumnya. Lebih lanjut, perkembangan realisasi belanja APBD turut dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi pendapatan APBD di Provinsi Lampung, yang pada triwulan laporan mengalami kontraksi sebesar 32,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 41,40% (yoy). Perlambatan realisasi pendapatan APBD terutama disebabkan oleh melambatnya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah.

Hingga triwulan III tahun 2024, realisasi pendapatan dan belanja APBD konsolidasi seluruh pemda di Provinsi Lampung masing-masing mencapai 58,75% dan 53,08% dari total pagu belanja APBD 2024. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 67,07% dan 58,25% dari total pagu belanja APBD 2023.¹

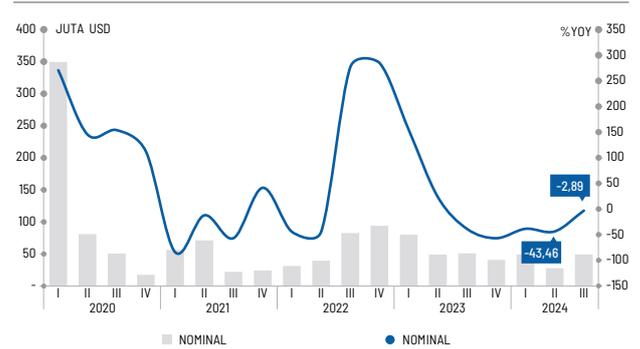
1.1.3 Investasi

Kinerja investasi tumbuh melambat sejalan dengan penurunan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Kinerja investasi atau Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan laporan tercatat tumbuh 1,30% (yoy), melambat jika dibandingkan 3,33% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut sejalan dengan melambatnya realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terkontraksi sebesar 8,96% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,23% (yoy) (Grafik 1.9). Perlambatan kinerja PMDN terutama terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 22,24% (yoy) pasca realisasi investasidrilling minyak oleh Pertamina Hulu Energi OSES di perairan Lampung Timur dan *gas drilling* oleh Ulubelu Geothermal

¹ Perkembangan realisasi APBD konsolidasi seluruh Pemda di Provinsi Lampung berdasarkan data yang diperoleh dari Portal Data SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 1 Desember 2024.



Grafik 1.9 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri

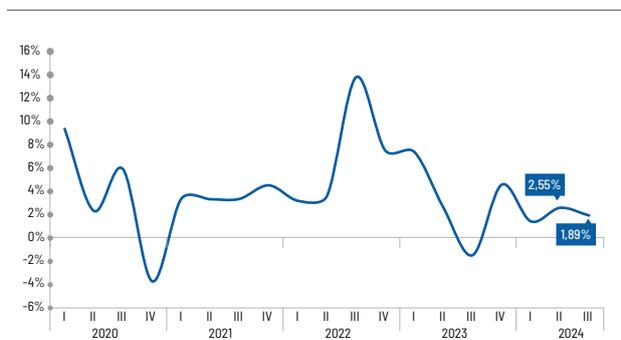


Grafik 1.10 Perkembangan Penanaman Modal Asing

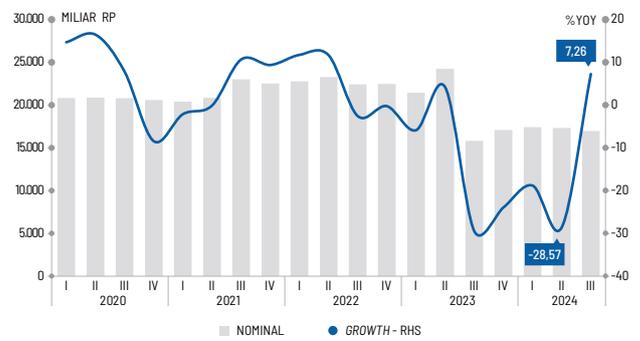
Power Plant di Tanggamus pada triwulan sebelumnya². Lebih lanjut, perlambatan kinerja investasi terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, dimana nilai saldo bersih tertimbang (SBT) investasi pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,89%, lebih rendah jika dibandingkan dengan 2,55% pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.11).

Lebih lanjut, perlambatan kinerja investasi pada triwulan laporan turut dipengaruhi oleh penurunan jumlah proyek investasi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan berakhirnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Margatiga yang rampung pada triwulan III 2024, serta pembangunan PSN Kereta Api Logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan di Provinsi Lampung yang masih berada pada tahap perencanaan *grand design*.

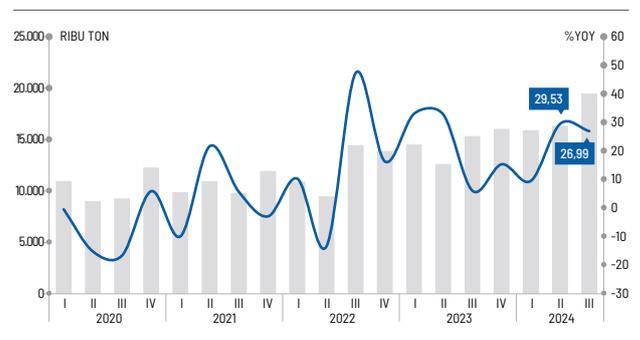
Perlambatan kinerja investasi lebih lanjut tertahan oleh perbaikan realisasi penanaman modal asing (PMA). Realisasi PMA pada triwulan laporan tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,89% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 43,46% (yoy) (Grafik 1.10). Di samping itu, dukungan perbankan untuk kegiatan investasi pada triwulan laporan terpantau mengalami peningkatan, ditunjukkan oleh kinerja penyaluran kredit investasi yang tumbuh sebesar 7,26% (yoy) setelah berkontraksi 28,57% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.12).



Grafik 1.11 SKDU Investasi

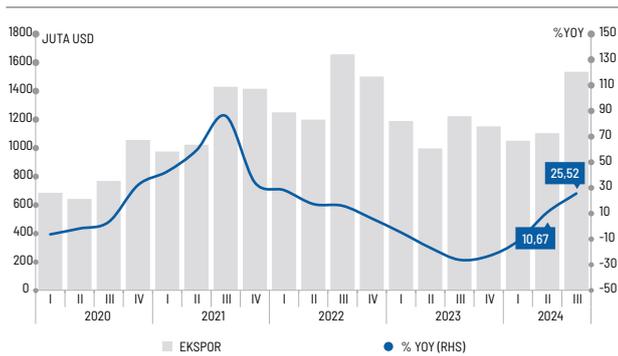


Grafik 1.12 Kredit Investasi



Grafik 1.13 Total Volume Angkutan Barang (Muat) Moda Transportasi Laut, Rel dan Udara

2 Berdasarkan BCI LeadManager, diakses pada 27 November 2024.

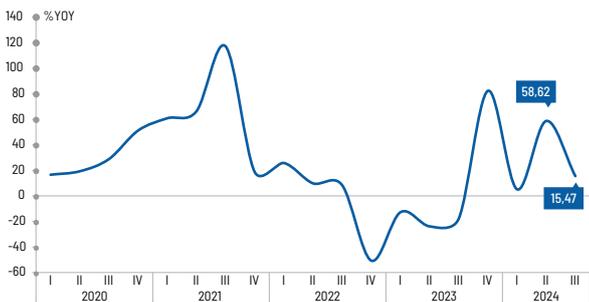


Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Non Migas Luar Negeri

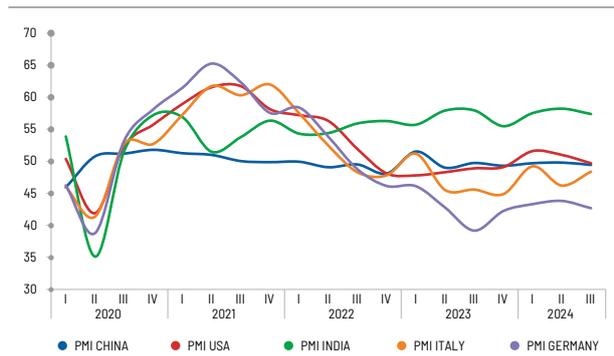
luar negeri non migas Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar USD1.533,64 juta atau tumbuh 25,52% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 10,67% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik1.14). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan permintaan ekspor komoditas kopi, batubara dan olahan buah, serta tetap kuatnya permintaan ekspor komoditas minyak kelapa sawit dan olahannya.

Kinerja ekspor luar negeri komoditas lemak dan minyak hewan/nabati Provinsi Lampung tetap kuat, meski mengalami perlambatan. Ekspor luar negeri produk minyak kelapa sawit dan turunannya pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 15,47% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan 58,62% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.16). Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan permintaan seiring melambatnya aktivitas manufaktur di negara tujuan ekspor utama, khususnya Amerika Serikat, India dan Tiongkok, tercermin dari perkembangan *promp manufacturing product* (PMI) pada triwulan laporan (Grafik1.15). Lebih lanjut, kinerja ekspor yang melambat juga disebabkan oleh penurunan daya saing minyak kelapa sawit seiring perkembangan harga minyak kedelai dan biji bunga matahari yang lebih kompetitif, terutama dipengaruhi oleh perbaikan produksi di Amerika Serikat, Brazil dan Ukraina. Di samping itu, kebijakan India untuk menaikkan bea masuk impor minyak sawit mentah dan minyak nabati olahan dari yang sebelumnya sebesar 5,5% menjadi 27,5% mulai September 2024 turut berpengaruh terhadap penurunan permintaan dari India. Stok minyak kelapa sawit di negara-



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.16 Perkembangan Ekspor Lemak dan Minyak Hewan/Nabati

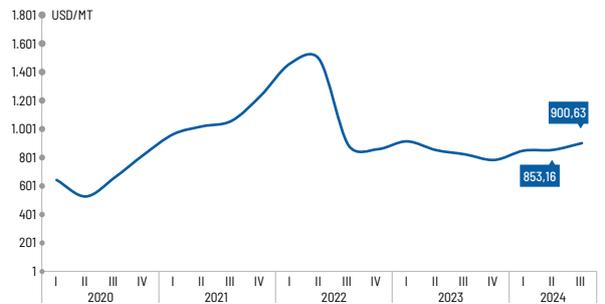


Sumber: Tradingeconomics & Investing.com

Grafik 1.15 Promp Manufacturing Index Mintra Dagang Utama Provinsi Lampung

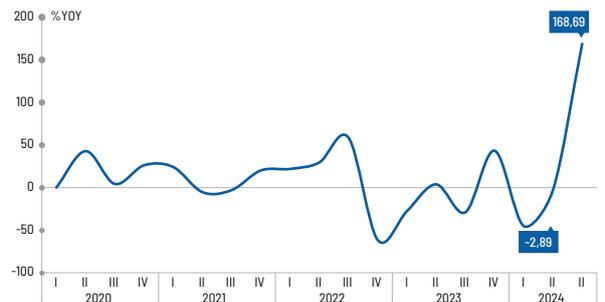
negara ASEAN juga relatif masih memadai disebabkan tingginya realisasi impor pada triwulan sebelumnya. Adapun rata-rata harga CPO dunia pada triwulan III 2024 adalah sebesar USD900,63/mt, lebih tinggi dibandingkan USD855,16/mt pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.17).

Panen raya kopi robusta yang berlangsung di tengah momentum peningkatan harga kopi dunia mendorong akselerasi kinerja ekspor komoditas kopi, teh dan rempah Provinsi Lampung. Ekspor luar negeri komoditas kopi, teh dan rempah Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh 168,69% (yoy), terakselerasi dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,89% (yoy)(Grafik 1.18). Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan produksi pada periode puncak panen raya kopi robusta yang berlangsung selama



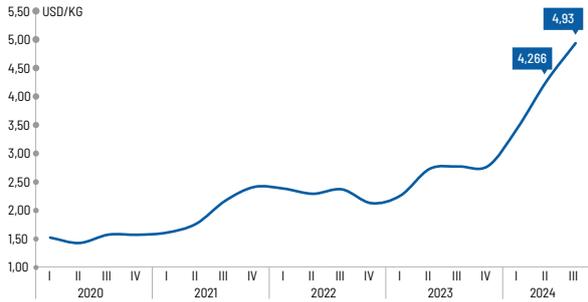
Sumber: Bloomberg

Grafik 1.17 Perkembangan Harga CPO Dunia



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.18 Perkembangan Ekspor Komoditas Kopi, Teh dan Rempah

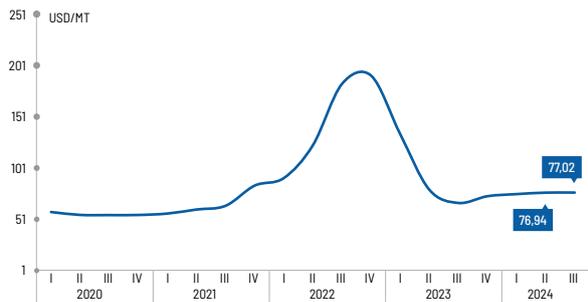


Sumber: World Bank

Grafik 1.19 Perkembangan Harga Kopi Robusta Dunia

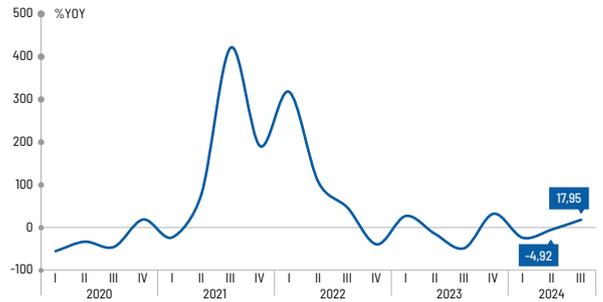
Juli - Agustus 2024, terutama di sentra produksi Tanggamus dan Lampung Barat. Lebih lanjut, perkembangan harga kopi robusta dunia turut mendukung peningkatan nilai ekspor komoditas kopi di Provinsi Lampung. Berdasarkan World Bank Commodity Price Data periode Oktober 2024, rata-rata harga kopi robusta dunia pada triwulan III 2024 mencapai USD4,93/kg, meningkat dibandingkan USD4,26/kg pada triwulan sebelumnya dan merupakan capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir (Grafik 1.19). Kenaikan harga kopi robusta dunia dipengaruhi oleh sentimen negatif prospek penurunan produksi, sejalan dengan berlanjutnya kondisi curah hujan di bawah rata-rata di sentra produksi Brazil dan Vietnam di tengah meningkatnya permintaan dari Tiongkok.

Kinerja ekspor batubara meningkat seiring kenaikan kebutuhan energi di negara tujuan ekspor utama. Ekspor luar negeri batubara pada triwulan III 2024 tumbuh 17,95% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,92% (yoy) (Grafik 1.20). Peningkatan realisasi ekspor batubara terutama didorong oleh kenaikan permintaan dari Tiongkok dan beberapa negara ASEAN akibat tingginya konsumsi listrik selama periode cuaca panas yang mendorong tingginya intensitas penggunaan pendingin. Di samping itu, meski melambat, permintaan batubara dari India tetap tumbuh positif seiring dengan perpanjangan mandat impor sampai Oktober 2024. Adapun Harga rata-rata batubara dunia pada triwulan III 2024 tercatat sebesar USD77,02/mt, relatif stabil dibandingkan USD76,94/mt pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.21).



Sumber: Bloomberg

Grafik 1.21 Perkembangan Harga Batubara Dunia

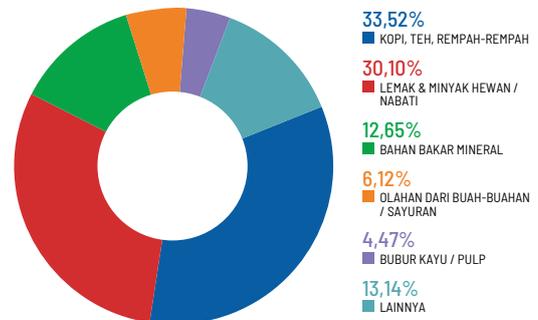


Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.20 Perkembangan Ekspor Komoditas Bahan Bakar Mineral

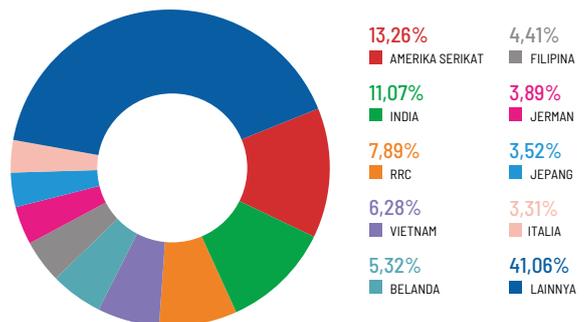
Berdasarkan kontribusinya, komoditas kopi, teh & rempah-rempah; lemak & minyak hewan/nabati (CPO dan RPO); dan bahan bakar mineral (batubara) merupakan komoditas ekspor luar negeri utama Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 dengan kontribusi masing-masing sebesar 33,52%; 30,10% dan 12,65% (Grafik1.22) Adapun negara tujuan ekspor utama Provinsi Lampung adalah Amerika Serikat, India dan Tiongkok dengan pangsa masing-masing sebesar 13,26%; 11,07% dan 7,89% (Grafik1.23).

Sejalan ekspor, kinerja impor Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 juga mengalami perlambatan. Total impor tercatat tumbuh sebesar 11,73% (yoy), melambat dibandingkan 13,47% (yoy) sejalan dengan penurunan pertumbuhan impor luar negeri. **Total impor**



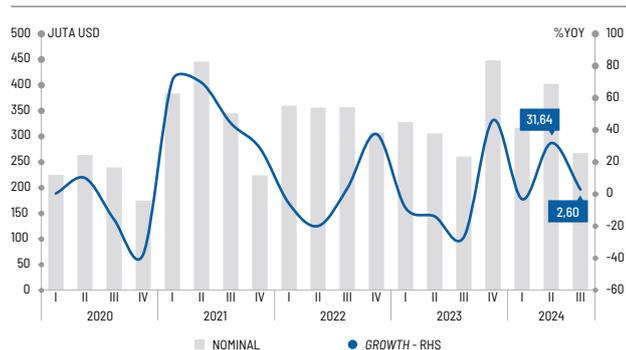
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.22 Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.23 Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan

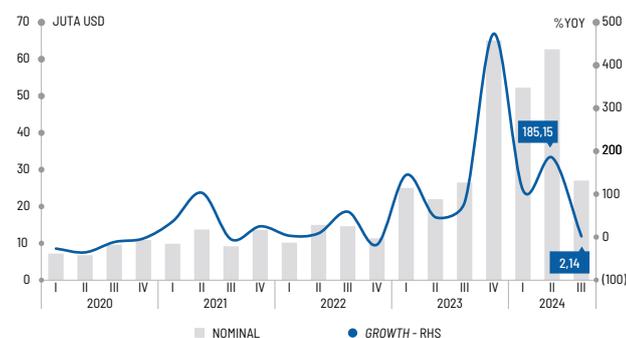


Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.24 Perkembangan Impor Luar Negeri

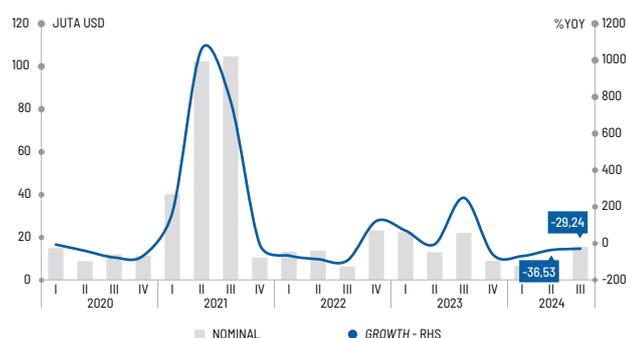
luar negeri Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar USD266,59 juta atau tumbuh 2,60% (yoy), melambat jika dibandingkan 31,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kinerja impor barang konsumsi dan bahan baku penolong di tengah berlanjutnya kontraksi impor barang modal.

Impor luar negeri barang konsumsi tumbuh melambat seiring kuatnya dukungan suplai dari LU Industri Pengolahan. Impor barang konsumsi pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,14% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 185,15% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.24). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan impor makanan dan minuman yang berkontraksi sebesar 3,11% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 126,72% (yoy). Hal ini didukung oleh



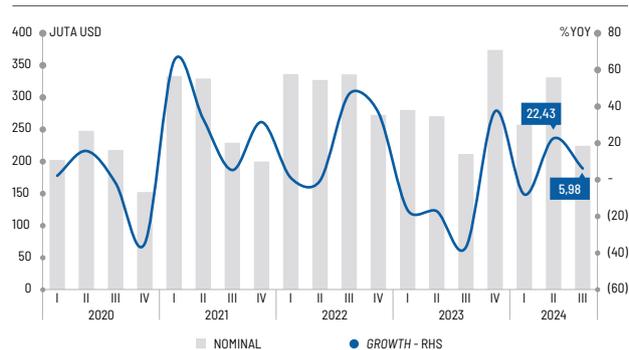
Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.26 Perkembangan Impor Barang Konsumsi



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.27 Perkembangan Impor Barang Modal



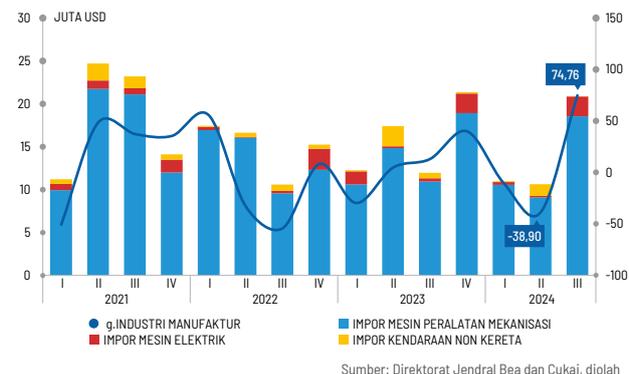
Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.25 Perkembangan Bahan Baku Penolong

terjaganya pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga seiring dengan peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan, khususnya didorong oleh subsektor makanan dan minuman.

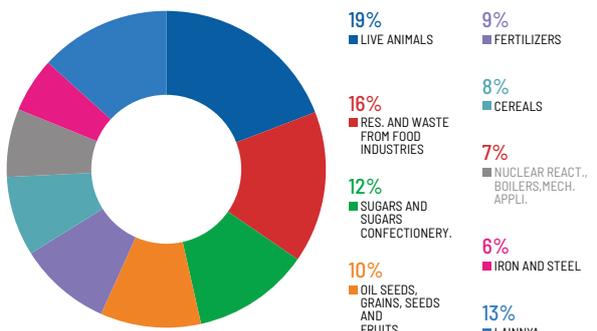
Impor luar negeri bahan baku penolong tumbuh melambat sejalan dengan penurunan kebutuhan impor bahan baku industri makanan dan minuman. Impor bahan baku penolong pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 5,98% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 22,43% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.25). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan impor gula rafinasi yang mengalami kontraksi sebesar 49,56% (yoy), setelah tumbuh cukup tinggi sebesar 128,82% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, perbaikan produksi jagung Provinsi Lampung turut menekan impor komoditas sereal pada triwulan laporan. Hal tersebut tercermin dari realisasi impor sereal yang tumbuh 0,12% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan 136,34% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Sementara itu, impor luar negeri barang modal tercatat masih mengalami kontraksi meski tidak sedalam triwulan sebelumnya. Impor barang modal pada triwulan III 2024 berkontraksi sebesar 29,24% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang berkontraksi 36,53% (yoy) sejalan dengan ekspansi kinerja LU Industri Pengolahan (Grafik 1.27). Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh kenaikan pertumbuhan barang modal pendukung kegiatan industri, khususnya mesin peralatan mekanisasi, mesin elektrik dan kendaraan non kereta (Grafik 1.28).



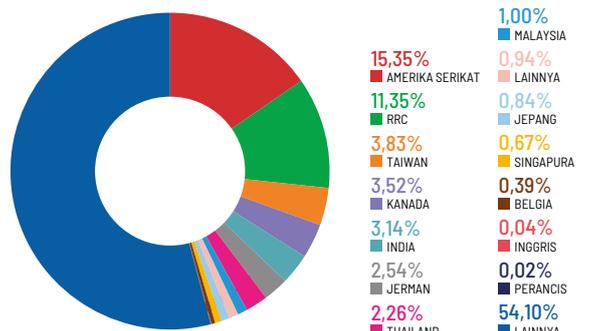
Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.28 Perkembangan Impor Barang Modal Pendukung Kegiatan Industri



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.29 Distribusi Impor Non Migas Berdasarkan Komoditas



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.30 Distribusi Impor Non Migas Berdasarkan Negara Asal

Dilihat dari kontribusinya, hewan hidup; ampas dan sisa industri makanan; gula (gula kristal dan rafinasi); biji minyak dan buah-buahan mengandung minyak; dan pupuk merupakan komoditas utama impor luar negeri Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 dengan masing-masing kontribusi sebesar 19,13%; 15,49%; 11,88%; 10,20%; dan 9,39%. Sementara itu, impor Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 terutama berasal dari Amerika Serikat, Tiongkok, Taiwan dan Kanada dengan pangsa masing-masing sebesar 15,35%; 11,35%; 3,83% dan 3,52%.

1.2 ANALISIS PDRB SISI LAPANGAN USAHA

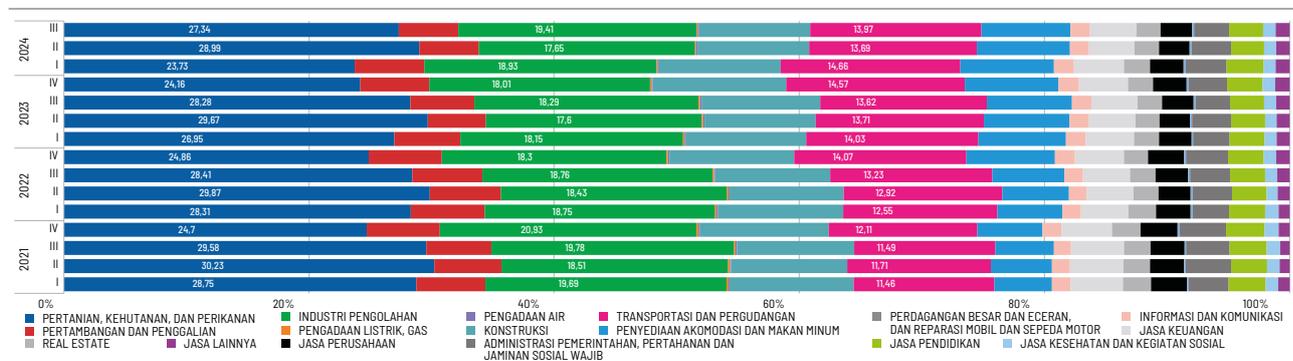
Dari sisi lapangan usaha (LU), tetap stabilnya kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 didukung oleh meningkatnya kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE). Kinerja LU Industri pengolahan tercatat tumbuh 10,54% (yoy), terakselerasi dari kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,79% (yoy) seiring kenaikan permintaan domestik dan ekspor produk industri makanan dan minuman. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sebesar 7,87% (yoy), meningkat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,36% (yoy) sejalan dengan tingginya produksi komoditas yang diperdagangkan dari LU Industri Pengolahan. Meningkatnya aktivitas perdagangan terutama didorong oleh perbaikan kinerja penjualan kendaraan bermotor dan didukung

dengan peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan di tengah kenaikan permintaan swasta (konsumsi rumah tangga dan LNPR).

Meskipun mengalami perlambatan, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) dan LU Konstruksi tetap tumbuh positif mendukung terjaganya kinerja perekonomian pada triwulan III 2024.

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tetap kuat dengan tumbuh sebesar 10,97% (yoy), meski melambat dibandingkan 15,19% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh normalisasi mobilitas masyarakat pasca HBKN Ramadan dan Idul Fitri pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, kinerja LU Konstruksi tumbuh sebesar 0,50% (yoy), melambat dibandingkan 8,08% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan penurunan kinerja investasi bangunan dan berkurangnya proyek pembangunan bernilai besar.

Lebih lanjut, pertumbuhan kinerja perekonomian Provinsi Lampung yang lebih tinggi tertahan oleh terkontraksinya LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan laporan tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,14% (yoy), melambat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,14% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan penurunan produksi tanaman pangan utama, khususnya padi pasca berakhirnya periode panen raya.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.31 Pangsa PDRB Lapangan Usaha

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

NO	LAPANGAN USAHA	2022				2023				2024		
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,35	3,33	-0,51	6,01	-0,56	1,56	1,28	-0,40	-11,16	0,14	-1,14
2	Pertambangan dan Penggalian	-4,86	-4,57	-3,28	-2,18	-1,23	-2,42	6,94	8,28	11,55	6,17	2,78
3	Industri Pengolahan	-0,88	7,33	1,57	-5,98	2,97	-0,55	0,49	2,94	6,52	4,79	10,54
4	Pengadaan Listrik, Gas	7,10	12,08	3,80	2,79	4,12	5,49	3,03	-7,74	-16,90	-11,23	-5,94
5	Pengadaan Air	9,82	3,90	1,88	-0,21	-0,12	2,06	0,83	-0,70	-3,27	0,28	0,85
6	Konstruksi	5,04	4,93	2,80	2,59	0,94	2,37	9,49	15,16	6,86	8,08	0,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,82	14,19	16,17	17,51	14,29	9,97	7,15	8,16	8,58	5,36	7,87
8	Transportasi dan Pergudangan	17,74	14,21	22,47	26,28	25,04	19,32	13,07	11,03	11,46	15,19	10,97
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	8,64	8,53	18,27	14,85	14,37	18,02	11,84	9,78	7,16	4,04	5,83
10	Informasi dan Komunikasi	-2,55	-2,52	-1,86	9,40	11,95	7,64	4,57	6,31	9,34	6,26	9,37
11	Jasa Keuangan	1,48	-2,48	-2,46	-11,01	-5,00	0,05	5,47	13,26	7,68	9,12	3,22
12	Real Estate	2,27	3,93	3,75	3,68	-0,51	1,90	1,07	0,92	9,84	6,29	7,19
13	Jasa Perusahaan	15,01	14,84	21,46	18,49	9,32	4,89	5,26	4,06	9,91	9,44	9,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,12	-4,81	1,07	-0,12	8,50	4,39	-8,29	-2,33	15,94	7,00	5,37
15	Jasa Pendidikan	3,45	4,01	2,11	1,24	3,16	1,57	0,82	3,47	3,73	0,24	0,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,25	-1,45	-3,70	-3,59	-2,94	6,73	3,42	8,55	3,95	9,26	9,23
17	Jasa Lainnya	6,55	26,45	38,54	30,92	22,16	15,68	13,22	11,80	9,05	9,89	9,50
	PDRB	2,86	5,23	3,94	5,05	4,94	4,00	3,93	5,40	3,30	4,80	4,81

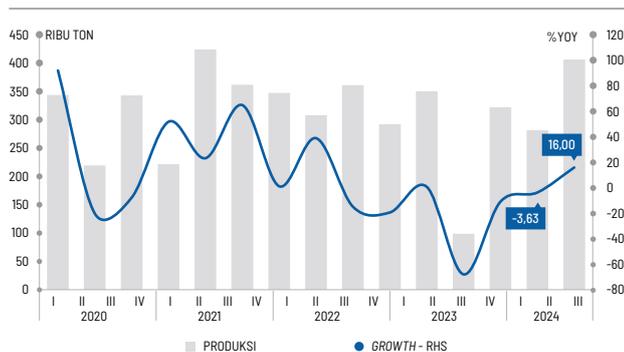
Sumber: BPS, diolah

PDRB Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 masih didominasi oleh tiga LU utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; LU Industri Pengolahan; dan LU Perdagangan Besar dan Eceran yang masing-masing berkontribusi sebesar 27,34%; 19,41% dan 13,97% terhadap PDRB. Proporsi LU Industri Pengolahan dan LU PBE mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan pertumbuhannya yang tinggi. Sementara itu, penurunan proporsi LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sejalan dengan pola musiman pasca periode panen padi pada triwulan sebelumnya.

1.2.1 LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

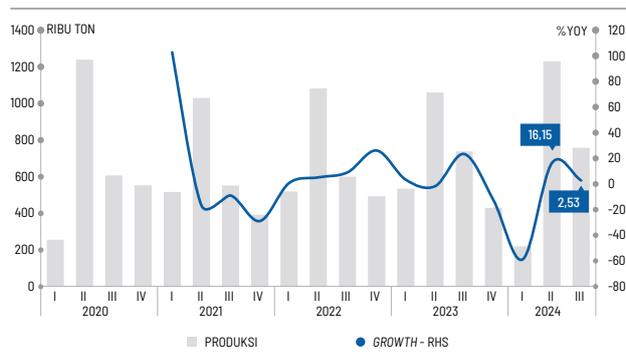
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan melambat sejalan dengan penurunan produksi padi pasca berakhirnya puncak panen raya. Kinerja LU Pertanian, Perikanan dan Perikanan pada triwulan III

2024 berkontraksi sebesar 1,14% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,14% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan penurunan produksi padi yang merupakan komoditas utama di LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi Lampung. Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, produksi gabah kering giling (GKG) Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 2,53% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 16,15% (yoy) pada triwulan sebelumnya seiring berakhirnya puncak panen raya (Grafik 1.32). Sejalan dengan itu, aktivitas pemupukan pada triwulan laporan juga menunjukkan perlambatan. Hal tersebut tercermin dari realisasi impor pupuk yang tercatat tumbuh 44,42% (yoy) pada musim tanam di triwulan II 2024, lebih rendah jika dibandingkan 115,23% (yoy) pada musim tanam di triwulan sebelumnya (Grafik 1.35). Indeks harga yang diterima petani pada triwulan laporan



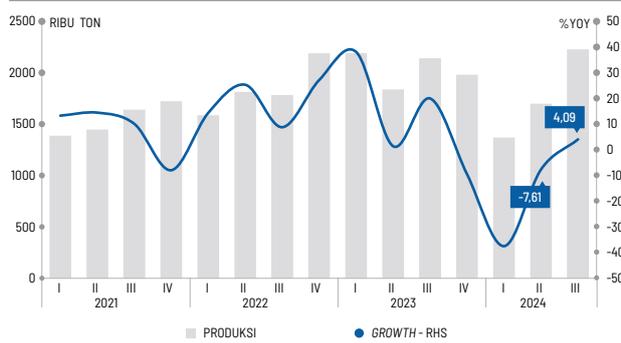
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.33 Produksi Jagung Pipilan Kering



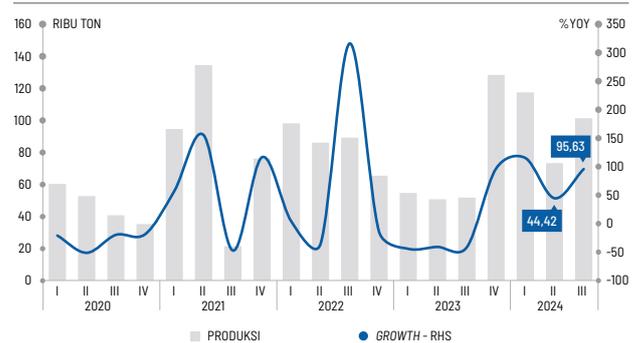
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.32 Produksi Gabah Kering Giling



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.34 Produksi Ubikayu



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.35 Volume Impor Pupuk

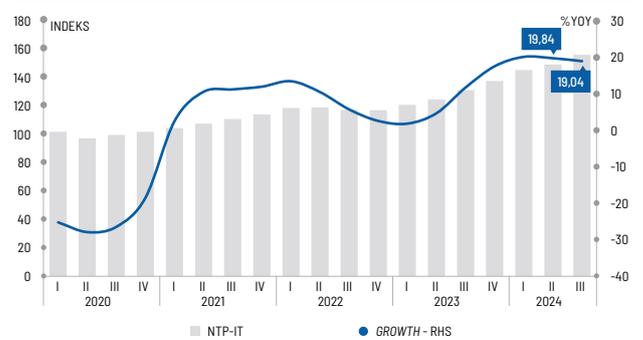
turut menunjukkan perlambatan, yaitu tumbuh sebesar 19,04% (yoy) dari 19,84% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.37). Lebih lanjut, survei kegiatan dunia usaha (SKDU) Bank Indonesia mengonfirmasi perlambatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi Lampung, tercermin nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi kegiatan usaha dan kapasitas produksi terpakai yang menunjukkan penurunan pada pada triwulan III 2024 (Grafik 1.36).

Peningkatan produksi tanaman pangan lainnya menahan kontraksi LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang lebih dalam pada triwulan laporan. Produksi tanaman pangan utama lainnya, yaitu jagung dan ubikayu masing-masing tercatat tumbuh 16,00% (yoy) dan 4,09% (yoy), setelah terkontraksi sebesar 3,63% (yoy) dan 7,61% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.33 dan 1.34). Peningkatan tersebut sejalan dengan masuknya periode panen jagung dan ubikayu yang didukung dengan kondisi cuaca yang kondusif, tercermin dari perkembangan *southern oscillation index* (SOI) yang berada pada zona netral pada triwulan laporan (Grafik 1.38).

1.2.2 LU Industri Pengolahan

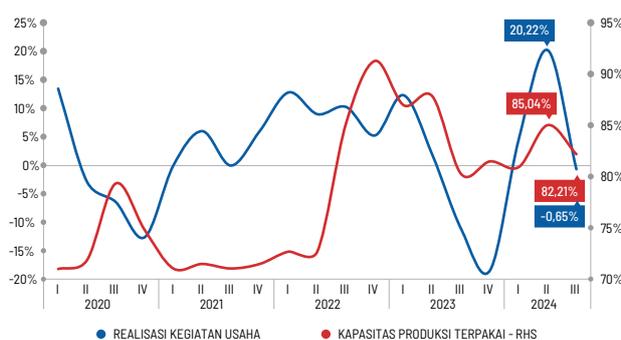
Kinerja LU Industri Pengolahan terakselerasi didorong subsektor industri makanan dan minuman. Kinerja LU Industri pengolahan pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh 10,54% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,79% (yoy), terutama didorong oleh peningkatan kinerja subsektor industri makanan dan minuman. Aktivitas industri makanan dan minuman yang

meningkat pada triwulan laporan didukung dengan perbaikan faktor produksi bahan baku utama, khususnya jagung dan ubikayu untuk industri pengolahan pakan ternak dan tepung tapioka (Grafik 1.33 dan 1.34). Selain itu, maraknya aktivitas kampanye menjelang puncak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November 2024 juga mendorong meningkatnya aktivitas industri pakaian jadi dan percetakan pada triwulan berjalan. Lebih lanjut, kenaikan permintaan ekspor juga turut mendorong tingginya aktivitas industri, tercermin dari realisasi ekspor industri manufaktur yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 25,52% (yoy) pada triwulan III 2024, lebih tinggi jika dibandingkan 10,67% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.38). Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh tetap kuatnya



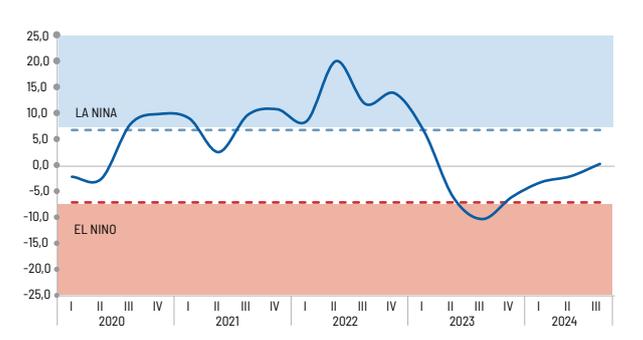
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.37 Indeks Harga yang Diterima Petani



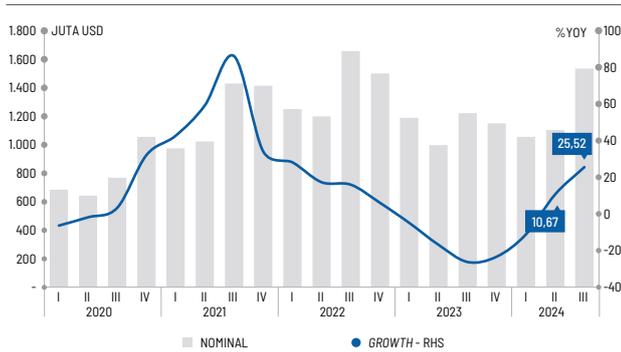
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.36 SKDU LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



Sumber: BOM Australia, diolah

Grafik 1.38 Southern Oscillation Index



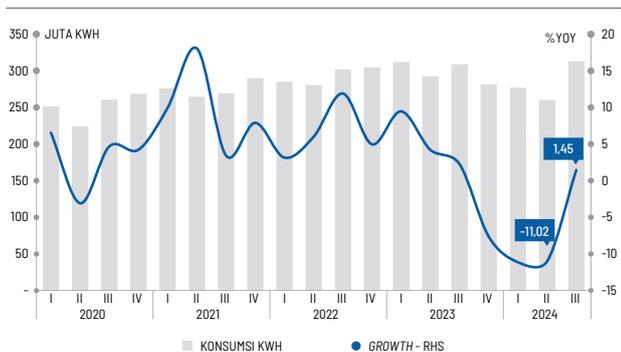
Grafik 1.39 Impor Industri Manufaktur

permintaan produk olahan makanan dari negara mitra dagang, terutama dari Amerika Serikat, Pakistan, Italia dan Belanda.

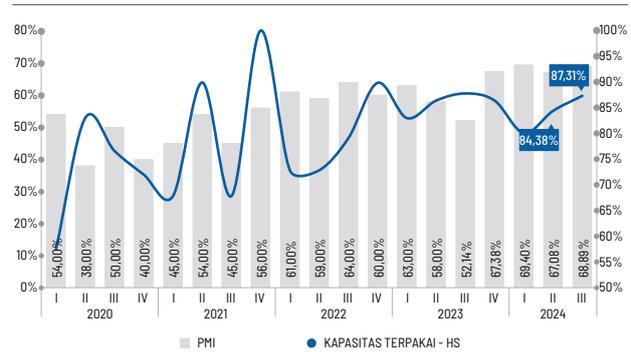
Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia mengonfirmasi peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan. PMI Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 68,89%, lebih tinggi dibandingkan 67,08% pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut sejalan dengan peningkatan kapasitas terpakai Industri Pengolahan, yaitu dari 84,38% menjadi 87,31% (Grafik 1.40). Peningkatan aktivitas industri turut tercermin dari konsumsi listrik industri yang meningkat pada triwulan laporan, yaitu tumbuh sebesar 1,45% (yoy) setelah terkontraksi 11,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.41). Selain itu, dukungan perbankan terhadap kinerja industri juga menunjukkan peningkatan, tercermin dari realisasi penyaluran kredit di LU Industri Pengolahan yang tumbuh 24,90% (yoy) pada triwulan III 2024 setelah terkontraksi 5,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.42).

1.2.3 LU Perdagangan Besar dan Eceran

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran meningkat sejalan dengan perbaikan kinerja penjualan kendaraan bermotor. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 7,87% (yoy), meningkat jika dibandingkan 5,36% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Aktivitas perdagangan yang tumbuh kuat pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh meningkatnya

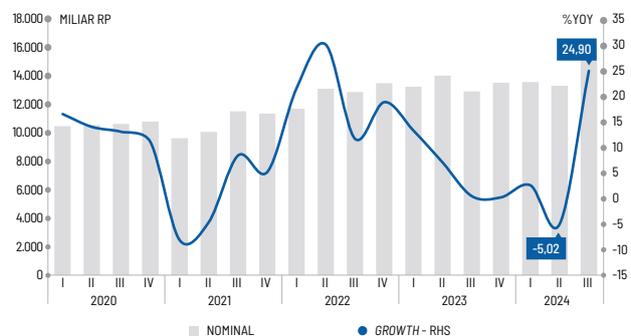


Grafik 1.41 Konsumsi Listrik Industri

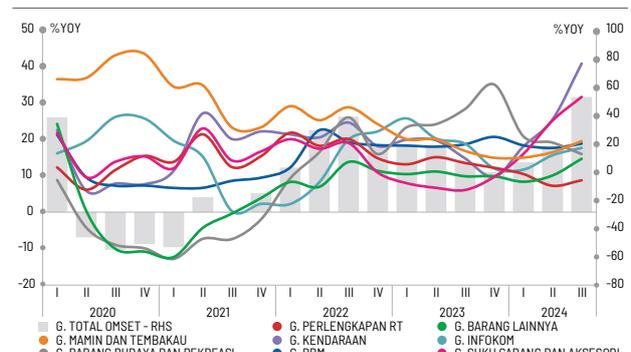


Grafik 1.40 Promp Manufacturing Index dan Kapasitas Terpakai Industri Pengolahan

aktivitas perdagangan untuk komoditas kendaraan, suku cadang dan asesori, bahan bakar minyak (BBM), minuman dan tembakau, perlengkapan durable good rumah tangga, dan peralatan informasi dan komunikasi di Provinsi Lampung. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh omset pelaku usaha yang tercatat mengalami peningkatan, yaitu tumbuh sebesar 31,56% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,08% (yoy) (Grafik 1.43). Lebih lanjut, kinerja penjualan kendaraan bermotor terpantau lebih kuat pada triwulan laporan, yaitu tumbuh sebesar 19,51% (yoy) setelah terkontraksi 3,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja penjualan bermotor di Provinsi Lampung terutama didorong oleh peningkatan

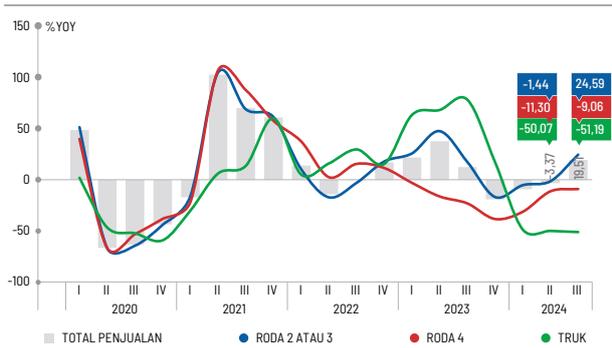


Grafik 1.42 Kredit LU Industri Pengolahan



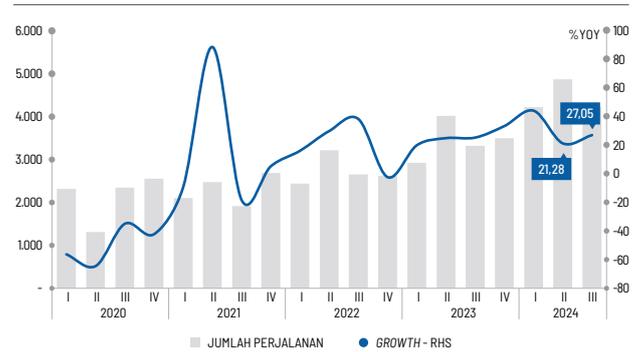
Grafik 1.43 Omset Penjualan Eceran

Sumber: Survei Penjualan Eceran



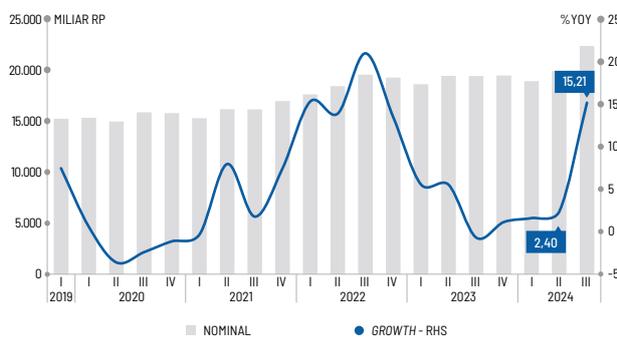
Sumber: Bapenda Provinsi Lampung, diolah

Grafik 1.44 Penjualan Kendaraan Bermotor



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.45 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Tujuan Lampung



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.46 Kredit LU Perdagangan Besar dan Eceran

Kuatnya pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran turut didukung oleh kinerja pembiayaan perbankan yang meningkat.

Secara umum, dukungan perbankan terhadap kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran mengalami peningkatan, tercermin dari kinerja penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 15,21% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan 2,40% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.46). Di samping itu, kinerja penyaluran kredit kendaraan bermotor juga menunjukkan peningkatan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,02% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 6,10% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan perbaikan kinerja penjualan kendaraan bermotor (Grafik 1.47).

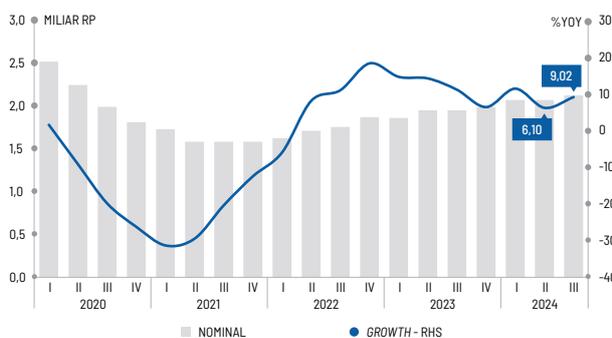
penjualan moda kendaraan roda 2 dan 3. Sementara itu, penjualan moda kendaraan roda 4 dan truk masih mencatatkan kontraksi (Grafik 1.44).

Meningkatnya aktivitas pariwisata turut mendukung peningkatan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, tercermin dari kenaikan pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara pada triwulan laporan (Grafik 1.45). Peningkatan sumbangan sektor pariwisata terhadap aktivitas perdagangan didukung oleh penyelenggaraan event strategis Provinsi Lampung, seperti Krakatau Festival dan berbagai festival kuliner yang berlangsung pada triwulan III 2024.

1.2.4 LU Konstruksi

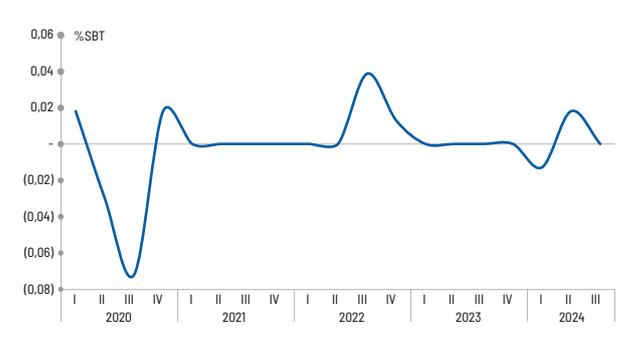
Aktivitas konstruksi pada triwulan III 2024 melambat sejalan dengan penurunan kinerja investasi.

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan tumbuh sebesar 0,50% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 8,08% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan investasi bangunan sejalan dengan rampungnya proyek-proyek investasi bernilai besar di Provinsi Lampung, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Margatiga, pembangunan jalan provinsi dan dua hotel bintang lima pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan aktivitas konstruksi juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, dimana nilai saldo bersih tertimbang (SBT) realisasi penggunaan tenaga kerja di LU Konstruksi pada triwulan III 2024



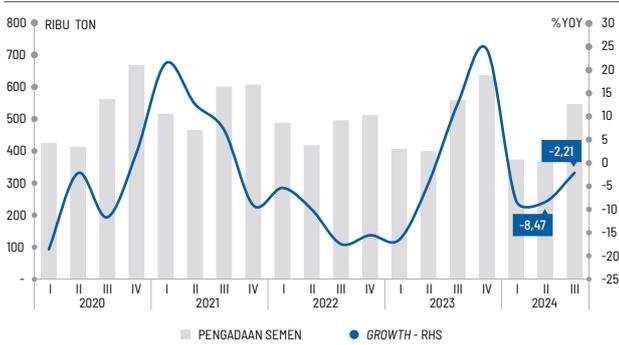
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.47 Kredit Kendaraan Bermotor



Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.48 SBT Realisasi Tenaga Kerja LU Konstruksi

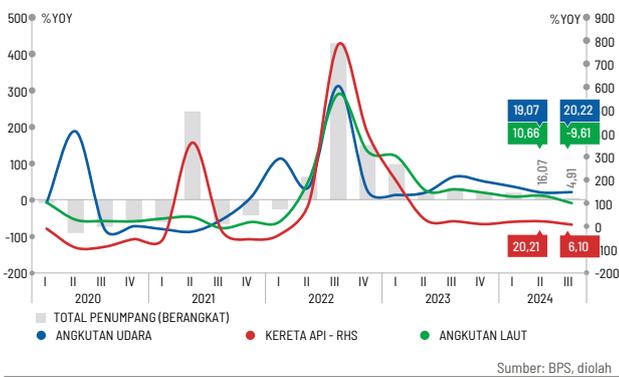


Grafik 1.49 Realisasi Pengadaan Semen

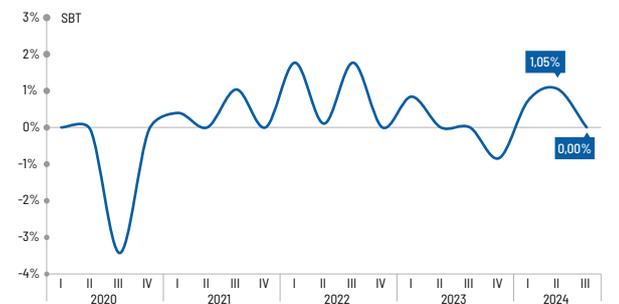
adalah sebesar 0,00%, lebih rendah dibandingkan 1,80% pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.48). Sementara itu, realisasi pengadaan semen pada triwulan III 2024 masih mengalami kontraksi, namun tidak sedalam triwulan sebelumnya (Grafik 1.49).

1.2.5 LU Transportasi dan Pergudangan

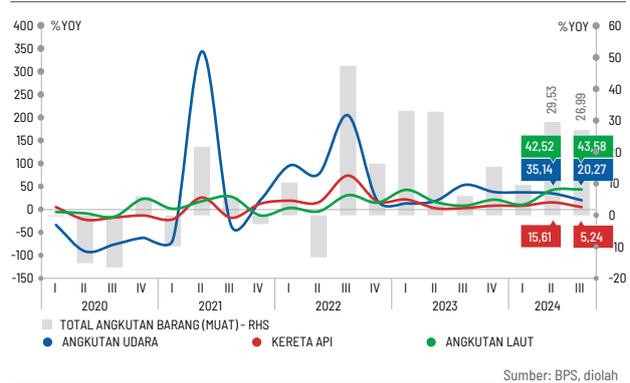
Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tetap kuat, meski melambat sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat pasca HBKN Ramadan dan Idul Fitri. Kinerja LU Transportasi dan pergudangan pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 10,97% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 15,19% (yoy) pada triwulan



Grafik 1.51 Pertumbuhan Penumpang Moda Transportasi



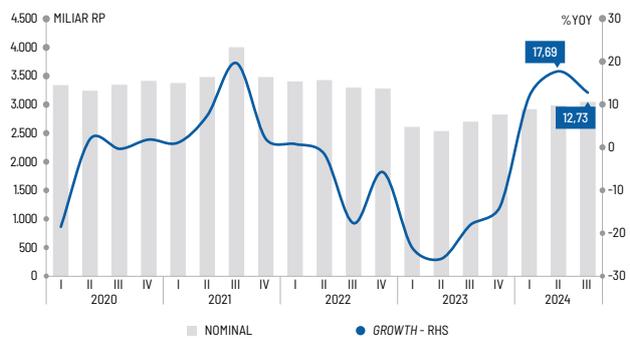
Grafik 1.52 SBT Realisasi Tenaga Kerja LU Transportasi dan Pergudangan



Grafik 1.50 Pertumbuhan Angkutan Barang Moda Transportasi

sebelumnya. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh perlambatan volume angkutan barang melalui semua moda transportasi, baik rel, laut maupun udara yang tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.50). Sejalan dengan itu, pertumbuhan arus penumpang menggunakan moda transportasi laut dan rel juga menunjukkan perlambatan (Grafik 1.51). Adapun pertumbuhan arus penumpang menggunakan transportasi udara tercatat meningkat pada triwulan laporan dan menahan perlambatan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan lebih lanjut. Arus penumpang transportasi udara yang meningkat sejalan dengan penambahan volume layanan penerbangan pada periode *long weekend* peringatan Maulid Nabi Muhammad yang berlangsung pada September 2024.

Perlambatan kinerja LU Transportasi sejalan dengan dukungan pembiayaan dan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) Bank Indonesia. Berdasarkan SKDU Bank Indonesia pada triwulan III 2024, realisasi tenaga kerja pada LU Transportasi dan Pergudangan menunjukkan penurunan, tercermin dari nilai SBT tenaga kerja yang tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.52). Adapun kinerja penyaluran kredit untuk LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 12,73% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 17,69% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.53).



Grafik 1.53 Kredit LU Transportasi, Pergudangan & Infokom





BAB 2

Keuangan Daerah

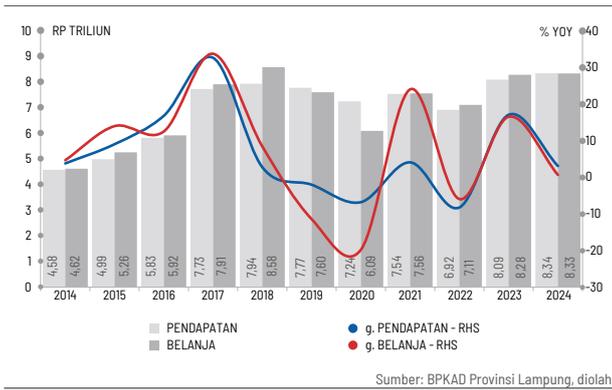
Realisasi pendapatan daerah APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan laporan tercatat meningkat baik secara persentase maupun nominal didorong oleh pendapatan daerah yang meningkat pasca penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Persentase realisasi belanja daerah APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III tercatat lebih rendah dari realisasi belanja pada triwulan III 2023. Terkontraksinya realisasi belanja pemerintah provinsi Lampung tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi belanja modal a.l. pada pos belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya.

Secara gabungan, realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan kontribusi utama adalah kenaikan PAD. Berdasarkan posnya, anggaran belanja pegawai dialokasikan tumbuh tertinggi di antara pos lain. Namun demikian, realisasi belanja hibah menjadi persentase capaian realisasi belanja terbesar jika dibandingkan dengan triwulan III 2023.

Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan. Hal ini didorong meningkatnya pendapatan cukai sejalan dengan kenaikan cukai hasil tembakau serta meningkatnya pos pendapatan pajak pertambahan nilai yang sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat.

Realisasi belanja APBN sampai pada triwulan III 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 seiring meningkatnya alokasi anggaran belanja APBN di Provinsi Lampung. Realisasi belanja terbesar sampai dengan triwulan III 2024 a.l. belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta belanja berupa realisasi transfer ke daerah dan dana desa sejalan dengan adanya penyesuaian desain lokasi berdasarkan UU HKPD untuk memenuhi standar pelayanan minimal layanan dasar publik daerah dan target pembangunan daerah.



Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah
Grafik 2.1 Perkembangan APBD Provinsi Lampung

2.1 APBD PROVINSI LAMPUNG

Capaian persentase realisasi pendapatan daerah APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III 2024 tercatat meningkat. Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan laporan tercatat meningkat baik secara persentase maupun nominal. Persentase realisasi pendapatan daerah APBD pada triwulan III 2024 sebesar 72,40% dari pagu meningkat dari posisi realisasi 64,55% pada triwulan III 2023. Peningkatan realisasi pendapatan daerah terutama didorong oleh meningkatnya realisasi pendapatan transfer daerah yang sampai dengan periode laporan mencapai sebesar 99,46% serta realisasi pendapatan daerah yang meningkat pasca penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kinerja belanja daerah Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III laporan tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan III 2023. Persentase realisasi belanja APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III tercatat sebesar 54,26% dari pagu lebih

rendah dari pencapaian sebesar 57,18% dari pagu pada triwulan III 2023, meskipun demikian secara nominal tercatat meningkat sebesar 6,65% (yoy) dibandingkan triwulan III 2023. Terkontraksinya realisasi belanja pemerintah provinsi Lampung tersebut didorong oleh penurunan realisasi belanja modal a.l. pada pos belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya.

2.1.1 Pendapatan Daerah APBD Provinsi Lampung 2.1.1.1 Anggaran Pendapatan Daerah

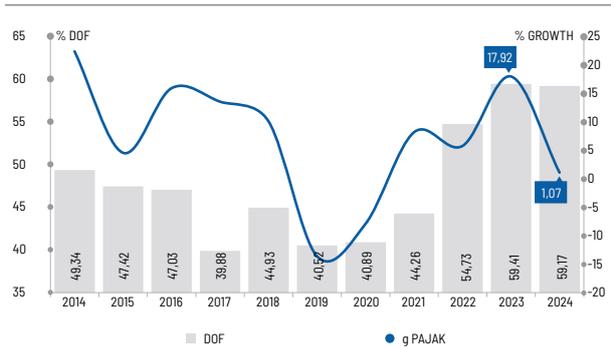
Pada tahun 2024, anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung ditetapkan lebih tinggi dipengaruhi peningkatan pendapatan transfer sebesar 3,89% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Adapun peningkatan anggaran APBD Provinsi Lampung juga didorong dengan peningkatan anggaran pendapatan retribusi daerah sebesar 97,98% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Namun demikian, peningkatan anggaran pendapatan daerah tertahan oleh kontraksi Lain-lain PAD yang Sah sebesar -49,59% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Secara umum alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 2,59% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Otonomi Fiskal (DOF) APBD Provinsi Lampung menurun dikarenakan adanya kenaikan yang lebih besar pada anggaran pendapatan transfer secara yoy. Pangsa PAD terhadap anggaran pendapatan total APBD Provinsi Lampung diperkirakan menurun menjadi 59,17% dari yang sebelumnya 59,49% pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan DOF, keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tetap dikategorikan mandiri, berdasarkan klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah dari BPK RI karena lebih dari 50% kebutuhan belanja dan pembiayaan akan dipenuhi dengan memanfaatkan PAD.

Tabel 2.1 Struktur Pendapatan APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)

URAIAN	2024									
	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			Δ PAGU (YOY)
	PAGU (MILIAR RP)	REALISASI (MILIAR RP)	REALISASI (%)	PAGU (MILIAR RP)	REALISASI (MILIAR RP)	REALISASI (%)	PAGU (MILIAR RP)	REALISASI (MILIAR RP)	REALISASI (%)	
Pendapatan	8.342,20	607,84	7,29%	8.342,20	3.095,79	37,11%	8.342,20	6.039,63	72,40%	3,11%
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.936,50	213,86	4,33%	4.936,50	1.677,98	33,99%	4.936,50	2.665,42	53,99%	2,59%
Pendapatan Pajak Daerah	3.344,12	211,10	6,31%	3.344,12	1.451,80	43,41%	3.344,12	2.269,56	67,87%	1,05%
Pendapatan Retribusi Daerah	341,16	0,67	0,20%	341,16	152,22	44,62%	341,16	298,70	87,56%	97,98%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	584,82	#VALUE!	#VALUE!	584,82	52,64	9,00%	584,82	52,64	9,00%	15,16%
Lain-lain PAD yang Sah	666,40	2,09	0,31%	666,40	21,32	3,20%	666,40	44,51	6,68%	-49,59%
b. Pendapatan Transfer	3.391,92	393,98	11,62%	3.391,92	1.417,69	41,80%	3.391,92	3.373,72	99,46%	3,89%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.354,66	393,65	11,73%	3.354,66	1.416,34	42,22%	3.354,66	1.675,54	49,95%	3,88%
- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	0,00	0,00		0,00	100,76		160,12	100,76	62,92%	-44,88%
- Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00		0,00	1.118,25		2.041,22	1.297,61	63,57%	11,76%
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00		0,00	189,79		1.138,24	266,22	23,39%	-0,21%
- Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00		0,00	7,54		15,08	10,95	72,63%	-237,13%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37,25	0,33	0,89%	37,25	1,35	3,61%	37,25	22,64	60,77%	4,88%
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13,79	0,00	0,00%	13,79	0,11	0,82%	13,79	0,49	3,59%	-2,10%
Pendapatan Hibah	13,79	0,00	0,00%	13,79	0,11	0,82%	13,79	0,49	3,59%	-2,10%

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Lampung, diolah

Grafik 2.2 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Lampung

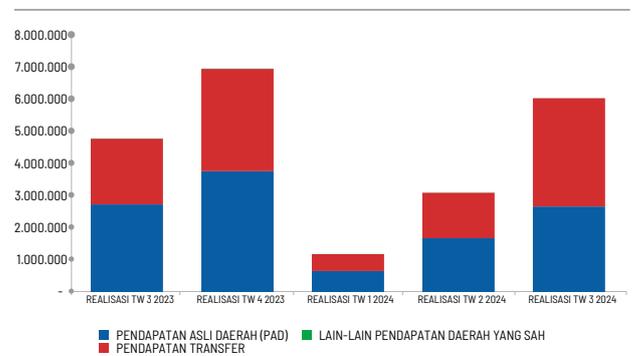
2.1.1.2 Realisasi Pendapatan Daerah

Sampai triwulan III 2024, realisasi pendapatan APBD Provinsi Lampung telah mencapai 72,40% (yoy) lebih tinggi dari realisasi pendapatan di triwulan III 2023 yaitu sebesar 64,55% (yoy). Realisasi APBD Provinsi Lampung dipengaruhi peningkatan realisasi pendapatan transfer sebesar 39,33% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Adapun peningkatan realisasi APBD Provinsi Lampung juga didorong dengan peningkatan realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar 98,55% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Namun demikian, peningkatan anggaran pendapatan daerah tertahan oleh kontraksi Lain-lain PAD yang sah sebesar -619,65% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Walaupun realisasi pendapatan retribusi daerah meningkat, secara keseluruhan umum sampai dengan triwulan berjalan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung menurun -2,41% (yoy) dibandingkan tahun 2023.

2.1.2 Belanja Daerah APBD Provinsi Lampung

2.1.2.1 Anggaran Belanja Daerah

Secara umum anggaran belanja APBD Provinsi Lampung tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi dengan peningkatan 0,63% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut terutama dipengaruhi peningkatan alokasi belanja tidak terduga dan belanja pegawai yang tumbuh masing-masing sebesar 27,89% (yoy) dan 11,95% (yoy). Meskipun demikian, peningkatan alokasi belanja daerah provinsi Lampung tertahan oleh terkontraksinya pagu belanja modal yang menurun -23,18% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Jika dilihat komponen belanja modal, penurunan pagu dialami oleh semua pos belanja modal namun aset tetap lainnya mengalami penurunan terdalam sebesar -40,90%. Belanja operasi masih menjadi pangsa tertinggi dari pagu seluruh komponen belanja daerah Provinsi Lampung yaitu 64,38%.



Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah

Grafik 2.3 Realisasi dan Target Pendapatan APBD Provinsi Lampung

Tabel 2.2 Struktur Belanja APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)

URAIAN	2024									
	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN I			Δ PAGU (YOY)
	PAGU (MILIAR RP)	REALISASI (MILIAR RP)	REALISASI (%)	PAGU (MILIAR RP)	REALISASI (MILIAR RP)	REALISASI (%)	PAGU (MILIAR RP)	REALISASI (MILIAR RP)	REALISASI (%)	
Belanja	8.333,59	1.430,24	17,16%	8.333,59	2.766,06	33,19%	8.333,22	4.521,62	54,26%	0,63%
a. Belanja Operasi	5.364,66	883,13	16,46%	5.364,66	1.904,80	35,51%	5.364,66	3.284,36	61,22%	4,38%
Belanja Pegawai	2.501,01	439,37	17,57%	2.501,01	920,89	36,82%	2.501,01	1.571,79	62,85%	11,95%
Belanja Barang dan Jasa	2.011,91	335,35	16,67%	2.011,91	623,65	31,00%	2.011,91	1.133,80	56,35%	-7,13%
Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Belanja Hibah	846,62	108,40	12,80%	846,62	359,78	42,50%	846,62	578,14	68,29%	11,07%
Belanja Bantuan Sosial	5,13	0,00	0,00%	5,13	0,48	9,35%	5,13	0,63	12,37%	-161,97%
Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
b. Belanja Modal	1.182,96	167,70	14,18%	1.182,96	185,26	15,66%	1.182,58	323,44	27,35%	-23,18%
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117,92	0,08	0,07%	117,92	4,91	4,16%	117,92	40,29	34,17%	-33,42%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266,47	53,40	20,04%	266,47	35,42	13,29%	266,47	67,42	25,30%	-18,79%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	776,12	114,22	14,72%	776,12	144,74	18,65%	776,12	199,46	25,70%	-22,43%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22,44	0,00	0,00%	22,44	0,19	0,85%	22,06	16,26	73,71%	-40,90%
c. Belanja Tidak Terduga	32,47	0,00	0,00%	32,47	1,03	3,16%	32,47	1,08	3,32%	27,89%
d. Belanja Transfer	1.753,50	379,42	21,64%	1.753,50	674,98	38,49%	1.753,50	912,74	52,05%	4,70%

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah

2.1.2.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai 54,26% dari pagu serta meningkat 6,65% (yoy) dibandingkan realisasi belanja daerah pada triwulan III 2023. Jika dilihat secara komponen realisasi belanja daerah terbesar adalah pos belanja operasi yang telah mencapai 61,22% dari pagu serta meningkat 16,28% (yoy) dari triwulan III 2023. Jika dilihat dari komponen realisasi belanja operasi terbesar adalah belanja hibah dan belanja pegawai yang masing-masing telah terealisasi sebesar 68,29% dan 62,85%. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial mencapai peningkatan realisasi masing-masing sampai dengan 59,05% dan 66,73% jika dibandingkan triwulan III 2023. Adapun peningkatan capaian realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tertahan oleh kontraksinya pertumbuhan realisasi belanja modal sebesar -52,40% (yoy) jika dibandingkan triwulan III 2023.

2.1.3 Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota

2.1.3.1 Anggaran Pendapatan Daerah

Pada tahun 2024, anggaran pendapatan APBD 15 Kabupaten/Kota ditetapkan meningkat untuk seluruh Kabupaten/Kota kecuali Kab. Tanggamus dan Kab. Tulang Bawang yang menurun masing-masing -3,81% dan -1,76 (yoy) dibandingkan tahun 2023. Adapun peningkatan tertinggi anggaran pendapatan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung adalah Kab. Mesuji yang tumbuh 24,23% (yoy) dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan baru masuknya Kab. Mesuji sebagai salah satu kabupaten yang dimasukkan dalam perhitungan inflasi nasional pada awal 2024. Lebih lanjut, capaian realisasi pendapatan APBD 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung posisi sepanjang 2024 (s.d. triwulan III 2024) rata-rata sebesar 65,60% dengan Kota Metro sebagai realisasi pendapatan tertinggi sebesar 81,70%.

2.1.3.2 Realisasi Pendapatan Daerah

Capaian realisasi pendapatan APBD 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 meningkat untuk seluruh Kabupaten/Kota kecuali Kab. Lampung Timur yang berkontraksi -3,27% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Adapun capaian realisasi pendapatan APBD 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sepanjang 2024 (s.d. triwulan III 2024) rata-rata sebesar 59,11% dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang memiliki capaian realisasi belanja tertinggi adalah Kota Metro sebesar 72,61% sepanjang tahun 2024 (s.d. triwulan III 2024).

2.1.4 Belanja Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota

2.1.4.1 Anggaran & realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Secara gabungan, anggaran pendapatan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung meningkat 6,90% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Jika dilihat dari posnya, anggaran PAD dialokasikan tumbuh tertinggi di antara pos lain sebesar 13,20% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun 2023. Lebih lanjut jika dilihat realisasinya, PAD menjadi persentase capaian realisasi pendapatan terbesar secara yoy jika dibandingkan dengan triwulan III 2023 yaitu sebesar 37,21%. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

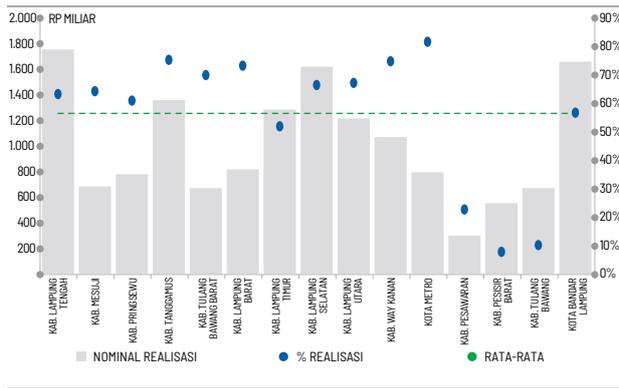
2.1.4.2 Anggaran & Realisasi Belanja Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Secara gabungan, anggaran belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung meningkat 6,26% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Jika dilihat dari posnya, anggaran belanja pegawai dialokasikan tumbuh tertinggi di antara pos lain sebesar 7,35% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun 2023. Namun demikian, jika dilihat dari realisasinya, belanja hibah

Tabel 2.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah Negara

LAPORAN ARUS KAS MASUK	TW III TAHUN 2023 (MILIAR RP)	TW IV TAHUN 2023 (MILIAR RP)	TW I TAHUN 2024 (MILIAR RP)	TW II TAHUN 2024 (MILIAR RP)	TW III TAHUN 2024 (MILIAR RP)	% Δ Tw III 2023 - 2024 (yoy)
Pendapatan Negara & Hibah	7.055,40	10.176,92	1.761,22	4.795,23	7.581,20	6,94
Penerimaan Perpajakan	5.940,61	8.704,11	1.328,32	4.106,73	6.386,12	6,98
- Pendapatan Pajak Dalam Negeri	5.186,22	7.687,66	1.328,32	3.632,95	5.750,30	9,81
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	2.526,43	3.621,89	777,47	1.886,76	2.750,66	8,15
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	2.438,41	3.785,91	511,07	1.629,03	2.770,62	11,99
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	109,36	130,08	0,85	28,12	92,80	(17,85)
4) Pendapatan BPHTB	-	-	-	-	-	-
5) Pendapatan Cukai	1,33	3,55	2,58	6,25	9,88	86,55
6) Pendapatan Pajak Lainnya	87,57	146,23	28,01	82,79	126,35	30,69
7) Pendapatan Penagihan Bunga Pajak	23,11	-	8,35	-	-	-
- Pendapatan Pajak Perdagangan Intl.	754,39	1.016,45	-	473,78	635,82	(18,65)
1) Pendapatan Bea Masuk	286,87	504,16	-	323,68	387,11	25,90
2) Pendapatan Bea Keluar	467,52	512,29	-	150,10	248,71	(87,98)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.112,29	1.472,81	432,89	688,50	1.195,08	6,93
Penerimaan Hibah	2,50	-	-	-	-	-

Sumber: Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Lampung



Grafik 2.4 Realisasi Belanja per Kab/Kota Triwulan III 2024

menjadi persentase capaian realisasi belanja terbesar secara yoy jika dibandingkan dengan triwulan III 2023 yaitu sebesar 84,75%.

2.2 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG APBN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

2.2.1 Pendapatan

Pagu anggaran pendapatan APBN di Provinsi Lampung tahun 2024 secara umum lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Pagu anggaran pendapatan APBN pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp11,21 triliun lebih tinggi 6,97% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Peningkatan pagu anggaran pendapatan APBN di Provinsi Lampung terutama disebabkan oleh tingginya alokasi pendapatan cukai sejalan dengan kenaikan cukai hasil tembakau.

Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 mencapai Rp7,58 triliun, tercatat mengalami peningkatan sebesar 6,97% triwulan III 2023. Peningkatan ini terutama dikarenakan meningkatnya pendapatan APBN di Provinsi Lampung dari pos pendapatan cukai yang meningkat 86,55% (yoy) dibandingkan triwulan III 2023 serta pos pendapatan pajak pertambahan nilai yang meningkat 11,99% (yoy) dibandingkan triwulan III 2023 sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi. Di sisi lain, tertahannya peningkatan realisasi pendapatan APBN di Provinsi Lampung dikarenakan terkontraksinya realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar -17,85%.

2.2.2 Belanja

Secara umum pagu anggaran belanja APBN di Provinsi Lampung tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Pagu anggaran belanja APBN pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp33,46 triliun lebih tinggi 33,95% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan jenis belanja, peningkatan pagu belanja APBN di Provinsi Lampung terutama disebabkan oleh lebih tingginya pagu alokasi belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) di sektor pendidikan, kesehatan, dan Barang/Jasa yang meningkat sebesar 85,98% (yoy) dibandingkan tahun 2023. Peningkatan pagu anggaran APBN di Provinsi Lampung juga disebabkan meningkatnya alokasi belanja modal peralatan dan mesin yang meningkat 77,90% yoy dibandingkan triwulan III 2023. Selain peningkatan alokasi belanja modal, belanja barang juga mengalami peningkatan pagu belanja dengan peningkatan sebesar 50,46% (yoy) dibandingkan triwulan III 2023.

Realisasi belanja APBN di Provinsi Lampung tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Realisasi belanja APBN sampai pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp24,53 triliun lebih tinggi 34,09% (yoy) dibandingkan tahun 2023 seiring meningkatnya alokasi anggaran belanja APBN di Provinsi Lampung. Secara realisasi sampai triwulan III 2024, realisasi belanja pos kenaikan pagu tertinggi dari tahun sebelumnya a.l. belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) masih 9,88% dari pagu, realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar 34,18% dari pagu, dan realisasi belanja barang sebesar 56,69%. Adapun pos yang memiliki realisasi belanja terbesar sampai dengan triwulan III 2024 a.l. belanja pegawai sebesar 79,61% sejalan dengan belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta belanja berupa realisasi transfer ke daerah dan dana desa sampai triwulan III sebesar 78,03% sejalan dengan adanya penyesuaian desain lokasi berdasarkan UU HKPD untuk memenuhi standar pelayanan minimal layanan dasar publik daerah dan target pembangunan daerah.

Tabel 2.5 Laporan Arus Kas Keluar di Provinsi Lampung

LAPORAN ARUS KAS MASUK	TW III TAHUN 2023 (MILIAR RP)	TW IV TAHUN 2023 (MILIAR RP)	TW I TAHUN 2024 (MILIAR RP)	TW II TAHUN 2024 (MILIAR RP)	TW III TAHUN 2024 (MILIAR RP)	% Δ Tw III 2023 - 2024 (yoy)
Belanja	22.102,21	31.704,50	7.626,39	16.170,83	24.534,92	9,92
Belanja Pegawai Pusat	6.243,03	10.234,02	2.399,68	4.712,43	7.029,47	11,19
Belanja Pegawai	2.809,01	3.782,84	1.058,54	2.299,97	3.273,77	14,20
Belanja Barang	2.724,29	4.901,78	1.176,66	2.078,70	3.117,58	12,62
Belanja Modal	679,09	1.511,22	144,13	312,94	613,38	(10,71)
- Belanja Modal Tanah	6,72	8,52	-	-	-	-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67,08	184,99	16,26	42,48	103,72	35,33
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129,42	286,57	32,74	89,96	161,51	19,87
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	418,19	814,51	83,25	153,99	295,85	(41,35)
- Belanja Modal Lainnya	27,66	44,02	11,28	20,68	31,14	11,16
- Belanja Modal Badan Layanan Umum	30,02	172,61	0,61	5,84	21,16	(41,84)
Belanja Bantuan Sosial	30,64	38,18	20,35	20,82	24,74	(23,87)
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	15.859,18	21.470,48	5.226,71	11.458,40	17.505,45	9,40

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung, diolah





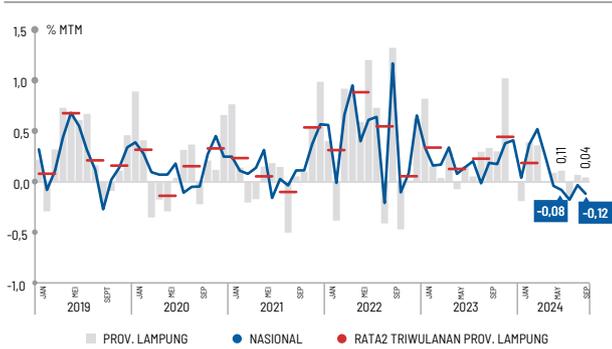
BAB 3

Perkembangan Inflasi

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 terpantau lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,84% (yoy). Tekanan inflasi pada periode laporan disebabkan oleh meningkatnya harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2024 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,13% dan inflasi 3,51% (yoy).

Perkembangan tersebut menunjukkan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah melalui TPID dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Dalam menghadapi tekanan inflasi ke depan, TPID Provinsi Lampung terus berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). TPID Provinsi Lampung turut memantau kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus memberikan himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, sebagai langkah komitmen bersama, KPw BI Provinsi Lampung terus mendukung Gernas Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Ke depan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah perlu mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi termasuk dampak kenaikan harga pangan global, ketersediaan pupuk, iklim yang membasah, serta peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.1 Inflasi Lampung dan Nasional

3.1 INFLASI UMUM GABUNGAN DUA KOTA DAN DUA KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

3.1.1 Inflasi Bulanan

Rata-rata IHK Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 secara bulanan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,02% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan II 2024 yang mencatat inflasi sebesar 0,06% (mtm) (Grafik 3.1). Secara garis besar, melandainya tekanan inflasi sepanjang triwulan III 2024 dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan terjaganya tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (Grafik 3.2). Terjaganya inflasi pada kelompok tersebut sejalan dengan masih tingginya pasokan pangan dan hortikultura di tengah periode *low demand*.

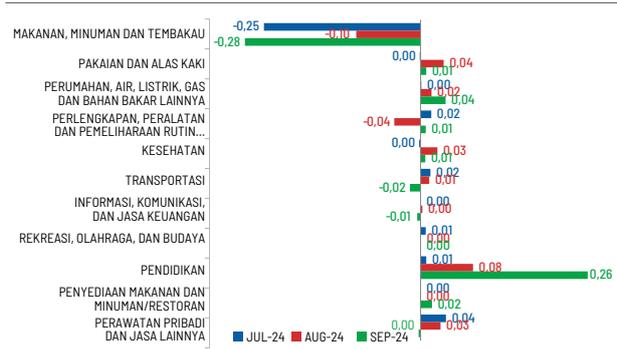
Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung bulan Juli 2024 tercatat mengalami deflasi 0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode Juni 2024 yang mengalami deflasi 0,11% (mtm) dan rata-rata inflasi bulan Juli pada 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat mengalami inflasi 0,31% (mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung bulan Juli 2024 tercatat sebesar 2,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,13% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, deflasi pada Juli 2024 terutama didorong oleh penurunan harga pada beberapa komoditas seperti: bawang merah, tomat, cabai merah, bawang putih, dan susu cair kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,32%; -0,10%; -0,08%; -0,02%; dan -0,02%. Penurunan harga bawang merah sejalan dengan terjaganya pasokan seiring dengan tengah berlangsungnya musim panen dari Brebes. Lebih lanjut, penurunan harga tomat disebabkan

Tabel 3.1 Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Juli 2024

KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
BERAS	0,12	BAWANG MERAH	(0,32)
CABAI RAWIT	0,05	TOMAT	(0,10)
KOPI BUBUK	0,05	CABAI MERAH	(0,08)
EMAS PERHIASAN	0,03	BAWANG PUTIH	(0,02)
SIGARET KRETEK TANGAN (SKT)	0,02	SUSU CAIR KEMASAN	(0,02)

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah



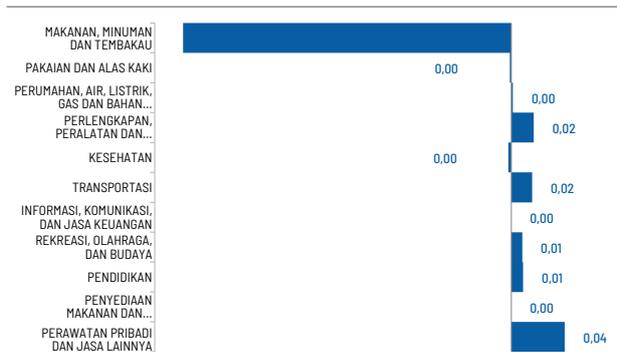
Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.2 Sumbangan Inflasi Bulanan Juli, Agustus, September 2024

oleh terjaganya produksi didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif. Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh terjaganya pasokan seiring dengan masuknya masa panen di beberapa sentra produksi di Lampung Selatan dan Tanggamus. Adapun penurunan harga bawang putih sejalan dengan masih terjaganya pasokan pasca realisasi importasi bawang putih pada triwulan II 2024.

Di sisi lain, pada Juli 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, antara lain beras, cabai rawit, kopi bubuk, emas perhiasan, dan sigaret tangan kretek (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,12%; 0,05%; 0,05%; 0,03%; dan 0,02%. Kenaikan harga beras disebabkan oleh penurunan pasokan pasca puncak panen pada periode April-Mei 2024. Kenaikan cabai rawit disebabkan oleh penurunan pasokan di tingkat distributor. Kenaikan harga emas di Provinsi Lampung sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia. Lebih lanjut kenaikan harga kopi bubuk sejalan dengan kenaikan harga kopi robusta sejalan dengan tingginya permintaan ekspor di tengah tetap tingginya harga kopi robusta dunia. Adapun kenaikan harga sigaret kretek tangan (SKT) sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2024.

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung bulan Agustus 2024 tercatat mengalami inflasi 0,07% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode Juli 2024 yang mengalami deflasi 0,16% (mtm) dan rata-rata inflasi bulan Agustus pada 3 (tiga) tahun terakhir yang mencatat deflasi sebesar 0,20% (mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung bulan



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.3 Sumbangan Inflasi Bulanan Juli 2024

Tabel 3.2 Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Agustus 2024

KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
BERAS	0,15	JERUK	(0,13)
KOPI BUBUK	0,07	BAWANG MERAH	(0,12)
SEKOLAH MENENGAH ATAS	0,06	TOMAT	(0,05)
SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,06	TELUR AYAM RAS	(0,04)
SIGARET KRETEK TANGAN (SKT)	0,02	DAGING AYAM RAS	(0,04)

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Agustus 2024 tercatat sebesar 2,33% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,12% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,55% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, pada Agustus 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, antara lain beras, kopi bubuk, sekolah menengah atas, sigaret kretek mesin (SKM), dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,15%; 0,07%; 0,06%; 0,06%; dan 0,02%. Peningkatan harga beras dan kopi bubuk sejalan dengan berakhir puncak panen raya padi dan kopi robusta pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, harga acuan kopi robusta dunia tetap tinggi sejalan dengan kuatnya permintaan ekspor di tengah belum optimalnya panen kopi robusta di Vietnam. Peningkatan harga sekolah menengah atas sejalan dengan penyesuaian tarif SPP memasuki tahun ajaran baru. Adapun peningkatan harga SKM dan SKT terjadi seiring dengan berlanjutnya penyesuaian harga pasca kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2024.

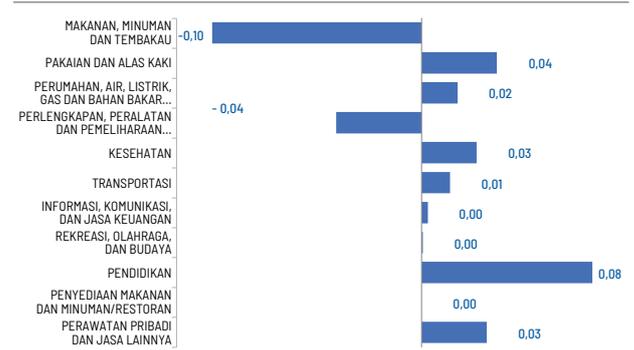
Di sisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti: jeruk, bawang merah, tomat, telur ayam ras, dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar -0,13%; -0,12%; -0,05%; -0,04%; dan -0,04%. Penurunan harga jeruk sejalan masuknya panen raya jeruk di sentra produksi Lampung Timur dan Lampung Tengah pada awal triwulan III 2024. Penurunan harga bawang merah terjadi seiring masuknya periode panen raya di sentra produksi Brebes yang merupakan daerah pemasok bawang merah untuk Provinsi Lampung. Adapun penurunan harga telur dan daging ayam ras disebabkan oleh penurunan harga pakan ternak di tengah periode low season pasca HBKN.

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan di Provinsi Lampung bulan September 2024 tercatat mengalami inflasi 0,04% (mtm),

Tabel 3.3 Lima Komoditas Inflasi & Deflasi September 2024

KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	0,26	CABAI MERAH	(0,17)
BAWANG MERAH	0,06	CABAI RAWIT	(0,07)
BERAS	0,03	TELUR AYAM RAS	(0,06)
KONTRAK RUMAH	0,03	TOMAT	(0,04)
NASI DENGAN LAUK	0,02	BENSIN	(0,03)

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

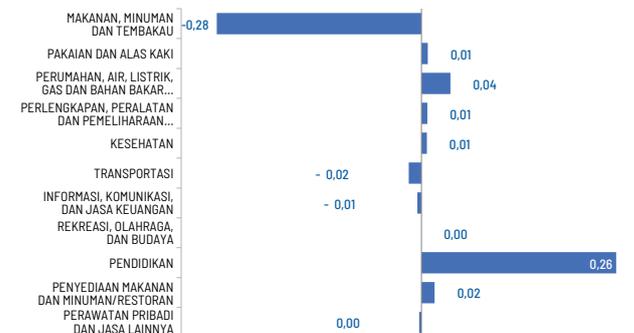


Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.4 Sumbangan Inflasi Bulanan Agustus 2024

lebih rendah dibandingkan periode Agustus 2024 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm) dan rata-rata inflasi bulan September pada 3 (tiga) tahun terakhir yang mencatat inflasi sebesar 0,57% (mtm). Secara tahunan, IHK gabungan di Provinsi Lampung bulan September 2024 tercatat mengalami inflasi 2,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,84% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,33% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga yaitu akademi/perguruan tinggi, bawang merah, beras, kontrak rumah, dan nasi dengan lauk dengan andil masing-masing sebesar 0,26%; 0,06%; 0,03%; 0,03%; dan 0,02%. Peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi disebabkan oleh penyesuaian biaya pendidikan seiring masuknya periode akademik baru di lembaga pendidikan tinggi. Adapun harga bawang merah meningkat disebabkan oleh terbatasnya pasokan pasca berakhirnya periode panen di Brebes. Sejalan dengan itu, harga beras juga mengalami peningkatan dampak tidak optimalnya produksi padi akibat rendahnya curah hujan pada periode panen gadu. Lebih lanjut, biaya kontrak rumah tercatat meningkat sejalan dengan hasil SHPR Bank Indonesia yang mencatat peningkatan harga sewa properti segmen ritel dan hotel. Sementara itu, meningkatnya harga nasi dengan lauk sejalan dengan peningkatan harga beras akibat pasokan yang semakin melambat.



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.5 Sumbangan Inflasi Bulanan September 2024

Tabel 3.4 Inflasi Bulanan Menurut Kelompok (pangsa % mtm)

NO	KELOMPOK INFLASI	JUL-24	AUG-24	SEP-24
UMUM		(0,16)	0,07	0,04
1	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	(0,25)	(0,10)	(0,28)
2	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	(0,00)	0,04	0,01
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	0,00	0,02	0,04
4	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0,02	(0,04)	0,01
5	KESEHATAN	(0,00)	0,03	0,01
6	TRANSPORTASI	0,02	0,01	(0,02)
7	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	-	0,00	(0,01)
8	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0,01	0,00	-
9	PENDIDIKAN	0,01	0,08	0,26
10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	-	-	0,02
11	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	0,04	0,03	(0,00)

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Di sisi lain, pada September 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami deflasi antara lain cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, dan bensin dengan andil masing-masing sebesar **-0,17%**; **-0,07%**; **-0,06%**; **-0,04%**; dan **-0,03%**. Penurunan harga aneka cabai disebabkan oleh meningkatnya pasokan sejalan dengan masuknya musim panen di sentra produksi Jawa Timur. Adapun penurunan harga telur ayam ras disebabkan oleh pasokan yang melimpah pada periode *low demand*. Penurunan harga tomat turut disebabkan oleh terjaganya pasokan pada periode panen. Sementara itu, penurunan harga bensin disebabkan oleh penyesuaian harga BBM non subsidi, yaitu penurunan harga Pertamina per 1 Oktober 2024 seiring dengan penurunan harga minyak dunia.

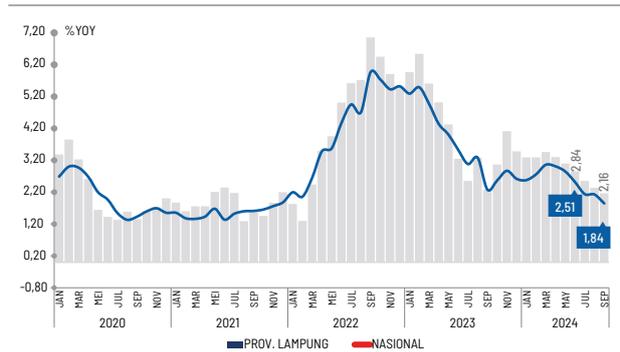
3.1.2 Inflasi Tahunan

Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar **2,16% (yoy)**, melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar **2,84% (yoy)**. Adapun tingkat inflasi tersebut

Tabel 3.5 Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok (% yoy)

NO	KELOMPOK INFLASI	TW I 2022	TW II 2022	TW III 2022	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024
UMUM		5,61	5,70	7,04	5,51	5,59	3,24	2,27	3,47	3,45	2,84	2,16
1	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	3,81	3,10	2,98	1,46	1,88	0,43	1,43	2,77	2,64	2,05	1,13
2	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	0,07	0,07	0,27	0,27	0,28	0,28	0,11	0,09	0,24	0,22	0,17
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	0,31	0,35	0,45	0,33	0,29	0,27	0,16	0,12	0,10	0,07	0,09
4	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0,22	0,24	0,22	0,14	0,15	0,13	0,09	0,11	0,02	0,04	0,03
5	KESEHATAN	0,10	0,11	0,11	0,12	0,08	0,05	0,03	0,03	0,03	0,00	0,04
6	TRANSPORTASI	0,91	0,93	1,84	2,02	1,86	1,19	0,05	-0,04	0,03	0,06	0,04
7	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	-0,12	-0,09	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
8	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0,07	0,08	0,12	0,11	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02	-0,02	-0,01
9	PENDIDIKAN	-0,17	0,48	0,47	0,47	0,46	0,45	0,19	0,19	0,18	0,18	0,37
10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0,23	0,24	0,35	0,26	0,25	0,21	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09
11	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	0,17	0,19	0,27	0,37	0,31	0,20	0,12	0,09	0,12	0,17	0,25

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.6 Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional

terpantau lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,84% (yoy) (**Grafik 3.6**). Melambatnya tekanan Inflasi Provinsi Lampung triwulan III 2024 ini disebabkan terjaganya pasokan pangan di tengah terbatasnya permintaan. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2024 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,13% dengan nilai inflasi 3,51% (yoy).

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terpantau mengalami penurunan tekanan inflasi yaitu sebesar **3,51% (yoy)** pada triwulan III 2024, lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya **4,67% (yoy)**. Pada triwulan III 2024, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau merupakan kelompok penyumbang inflasi dengan andil terbesar pertama, yaitu **1,13% (yoy)**. Dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, sub kelompok makanan merupakan penyumbang inflasi dengan andil sebesar (0,47%). Komoditas utama yang penyumbang tekanan inflasi pada sub kelompok tersebut antara lain bawang merah (0,18%), gula pasir (0,11%) dan bawang putih (0,08%). Penyumbang Inflasi pada sub kelompok ini umumnya didorong oleh terbatasnya pasokan menjelang periode panen. Untuk komoditas gula, inflasi yang terjadi sejalan dengan impor yang berkontraksi sebesar 82,32% (qtq) pada September 2024. Di sisi lain, tekanan inflasi

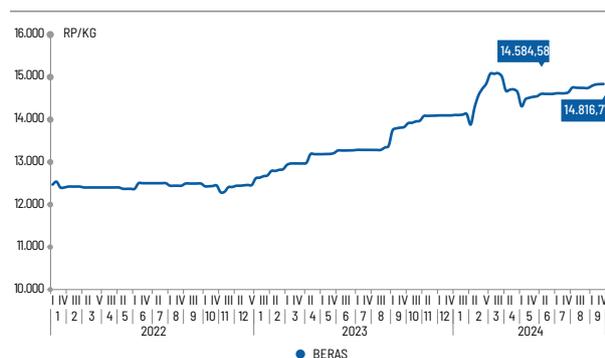
Tabel 3.6 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman Non Alkohol & Tembakau (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU (1,13%)						
MAKANAN (0,47%)						
1	BAWANG MERAH	27,03	0,18	TOMAT	-40,23	-0,11
2	GULA PASIR	22,98	0,11	CABAI MERAH	-23,93	-0,11
3	BAWANG PUTIH	8,54	0,08	JERUK	-10,81	-0,06
MINUMAN NON ALKOHOL (0,29%)						
1	KOPI BUBUK	44,23	0,32	AIR KEMASAN	-4,06	-0,03
ROKOK DAN TEMBAKAU (0,37%)						
1	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	8,83	0,24			
2	SIGARET KRETEK TANGAN (SKT)	5,93	0,09			
3	SIGARET PUTIH MESIN (SPM)	9,42	0,04			

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

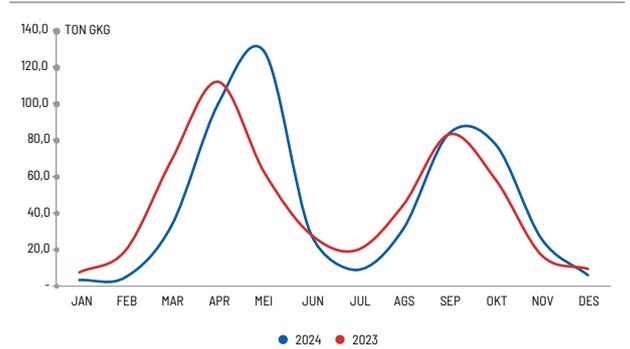
pada sub kelompok makanan tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti tomat, cabai merah, dan jeruk dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,11%, -0,11%, dan -0,06%. Penurunan harga komoditas tersebut disebabkan oleh terjaganya pasokan di daerah pasca panen masing-masing komoditas. Sebagai contoh, harga tomat melambat secara tajam sejalan dengan periode panen raya di hampir seluruh sentra produksi di Provinsi Lampung pada bulan Agustus-September 2024.

Walaupun bukan merupakan komoditas penyumbang utama inflasi pada bulan September, harga beras tercatat melanjutkan tren peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mengacu kepada data Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia hingga triwulan III 2024, harga beras tercatat senilai Rp14.818 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Rp14.584 pada triwulan sebelumnya. Adapun hal tersebut utamanya disebabkan oleh telah selesainya periode panen raya khususnya di wilayah sentra produksi pangan antara lain Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Mesuji. Hal tersebut juga sejalan dengan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik, dimana Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 diperkirakan menghasilkan sebesar 944 ribu ton



Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.7 Perkembangan Harga Beras



Sumber: BPS, diolah

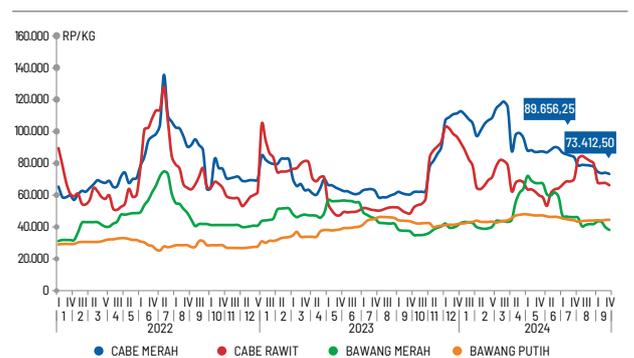
Grafik 3.8 Luas Panen Padi

Gabah Kering Giling (GKG), lebih rendah dibandingkan 1,35 ton GKG pada triwulan sebelumnya.

Semakin terkendalinya inflasi di kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didukung oleh terjaganya harga komoditas hortikultura. Mengacu kepada data Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia hingga triwulan III 2024, harga cabai merah tercatat senilai Rp73.412 melambat jika dibandingkan dengan Rp89.656 pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, harga cabai rawit tercatat senilai Rp66.246 meningkat dibandingkan Rp64.325 pada triwulan sebelumnya. Terkendalinya harga aneka cabai utamanya didorong oleh meningkatnya pasokan pasca panen cabai di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesawaran. Sejalan dengan aneka cabai, harga komoditas bawang merah berdasarkan SPH triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp38.181 lebih rendah dibandingkan Rp58.968 pada triwulan sebelumnya. Terjaganya harga bawang merah disebabkan oleh lancarnya pasokan yang berasal dari Kabupaten Brebes sebagai rekanan pemasok utama komoditas bawang merah.

Kelompok Pendidikan

Pada triwulan III 2024, kelompok pendidikan dengan andil sebesar 0,37% tercatat mengalami inflasi sebesar 5,63% (yoy), relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,77% (yoy). Inflasi pada kelompok pendidikan terutama didorong oleh inflasi pada sub kelompok pendidikan tinggi dengan andil 0,27%, sub pendidikan menengah dengan andil (0,08%) dan pendidikan dasar dan anak usia dini dengan andil (0,01%). Kenaikan harga tercatat



Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.9 Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan

Tabel 3.7 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
PENDIDIKAN (0,37%)						
PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI (0,01%)						
1	SEKOLAH DASAR	0,91	0,01			
PENDIDIKAN MENENGAH (0,08%)						
1	SEKOLAH MENENGAH ATAS	3,63	0,06			
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	2,38	0,02			
PENDIDIKAN TINGGI (0,27%)						
1	PENDIDIKAN TINGGI	11,95	0,27			

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

disumbang oleh pendidikan tinggi dan sekolah menengah atas dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 11,95% (yoy) dan 3,63% (yoy) (**Tabel 3.7**).

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 4,08% dengan andil sebesar 0,25%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 2,68% (yoy) dengan andil sebesar 0,17%. Komoditas pendorong tekanan inflasi pada kelompok ini bersumber dari peningkatan harga pada komoditas emas perhiasan, krim wajah, sabun wajah, dan tisu dengan andil masing-masing sebesar 0,20% (yoy); 0,02% (yoy); 0,01% (yoy); dan 0,01% (yoy). Peningkatan harga emas perhiasan mengikuti kecenderungan investor untuk melakukan investasi pada *safe haven assets* di tengah ketidakpastian global. Lebih lanjut, peningkatan harga emas tersebut juga tercermin dari harga emas 22 & 24 karat di Provinsi Lampung, yang tercatat melanjutkan tren peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya (**Tabel 3.8**).

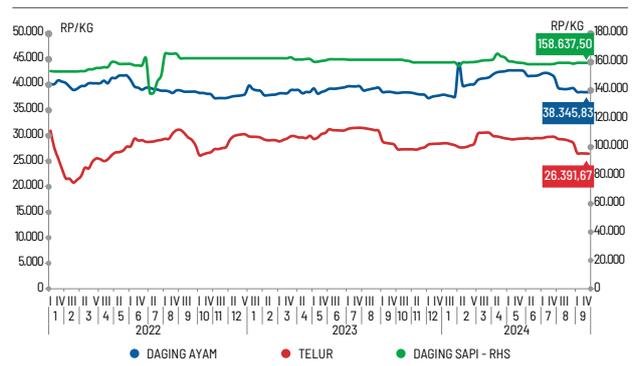
Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran

Inflasi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,04% (yoy) dengan andil sebesar 0,09%, stabil jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan II 2024 yang sebesar 1,04% (yoy), dengan andil sebesar 0,09%. Tekanan inflasi yang terjadi pada sub kelompok jasa penyediaan

Tabel 3.8 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)

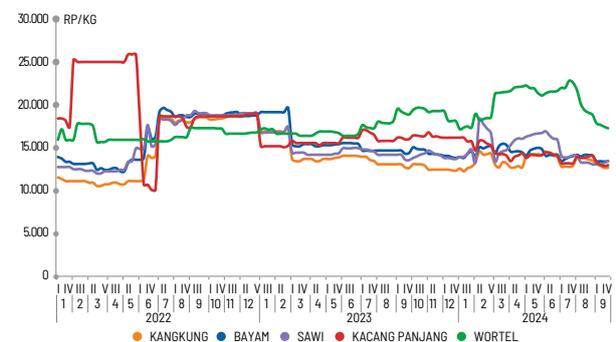
NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA (0,25%)						
PERAWATAN PRIBADI (0,17%)						
1	KRIM WAJAH	14,66	0,02	PARFUM	-3,81	-0,02
2	SABUN WAJAH	6,99	0,01	SHAMPO	-1,51	-0,01
3	TISSU	3,56	0,01	HAND BODY LOTION	-1,79	-0,004
PERAWATAN PRIBADI LAINNYA (0,16%)						
1	EMAS PERHIASAN	30,72	0,20			

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah



Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.10 Perkembangan Harga Daging dan Telur



Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.11 Perkembangan Harga Sayur Sayuran

makanan dan minuman terutama berasal dari peningkatan harga pada komoditas nasi dengan lauk, siomay, dan pecel dengan andil masing-masing komoditas sebesar 0,04%; 0,01%; dan 0,01% (yoy) (**Tabel 3.9**). Terjaganya tekanan Inflasi pada kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran disebabkan oleh permintaan masyarakat yang disandingi dengan pasokan (nasi, ikan, sayuran) yang memadai.

Kelompok Transportasi

Kelompok transportasi pada periode triwulan III 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37% (yoy) dengan andil sebesar 0,04%, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,58% (yoy) dengan andil sebesar 0,06% (**Tabel 3.10**). Inflasi pada kelompok tersebut utamanya disumbang oleh sub

Tabel 3.9 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN (0,09%)						
JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN (0,09%)						
1	NASI DENGAN LAUK	2,17	0,04			
2	SIOMAY	4,59	0,01			
3	PECEL	4,72	0,01			

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Tabel 3.10 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
TRANSPORTASI (0,04%)						
PEMBELIAN KENDARAAN (0,04%)						
1	SEPEDA MOTOR	2,45	0,03			
PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI (0,00%)						
1	PEMELIHARAAN/ SERVICE	2,03	0,02	BENSIN	-0,76	-0,04
2	PERBAIKAN RINGAN KENDARAAN	4,30	0,01			
3	PELUMAS OLI/ MESIN	2,22	0,01			
JASA ANGKUTAN PENUMPANG (0,00%)						
1				TARIF KENDARAAN RODA 2 ONLINE	-3,84	-0,01

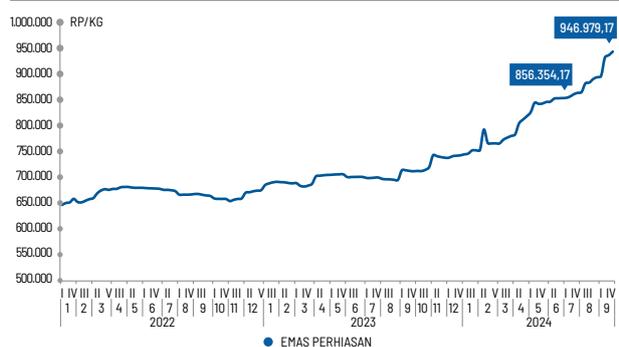
Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

kelompok pembelian kendaraan, utamanya pada komoditas sepeda motor, yang mengalami inflasi sebesar 2,45%(yoy) dan dengan andil sebesar 0,03% (yoy). Peningkatan pada sub kelompok tersebut sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat pada triwulan berjalan. Di sisi lain, peningkatan lebih tinggi tertahan oleh menurunnya harga bensin dan tarif kendaraan roda 2 online yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,76% (yoy); 3,84% (yoy) dengan andil sebesar -0,04% (yoy); -0,01% (yoy).

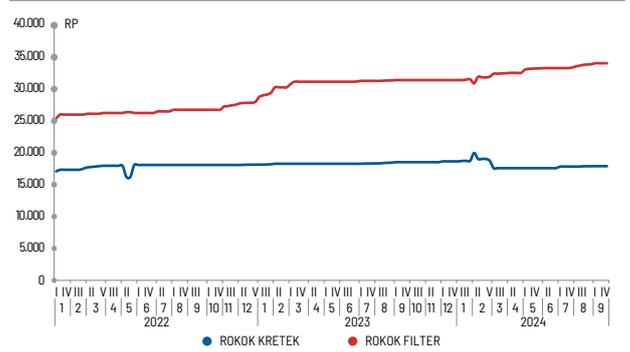
3.2 INFLASI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

3.2.1 Inflasi Kota Bandar Lampung

Pada bulan Juli 2024, IHK Kota Bandar Lampung tercatat stabil (0,00%; mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,01% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 2,18% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 2,25% (yoy). Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang inflasi bulanan di Kota Bandar Lampung adalah beras, kopi bubuk, dan cabai rawit dengan andil masing-masing secara bulanan sebesar 0,10%; 0,05%; 0,04% dan 0,02% (mtm).



Sumber : SPH Bank Indonesia

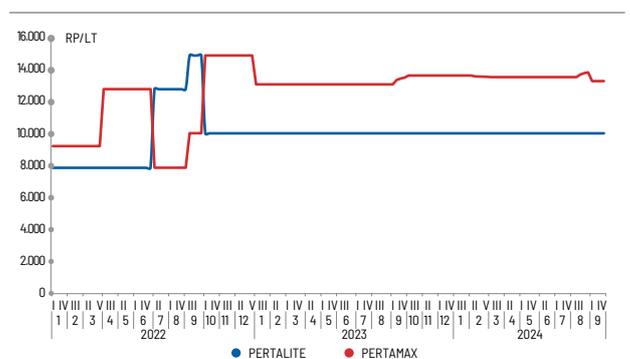
Grafik 3.13 Perkembangan Harga Emas Perhiasan

Sumber : SPH Bank Indonesia

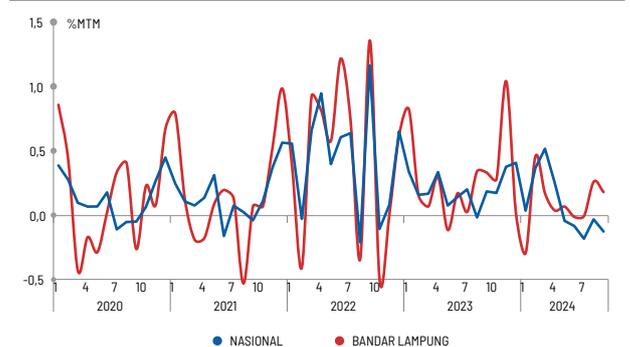
Grafik 3.12 Perkembangan Harga Rokok

Lebih lanjut, Kota Bandar Lampung di bulan Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat stabil (0,00%; mtm). Secara tahunan, inflasi di Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2024 tercatat sebesar 2,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 2,18% (yoy). Komoditas penyumbang inflasi di Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2024 antara lain beras, sekolah menengah atas, dan sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil masing-masing sebesar 0,06%; 0,06%; dan 0,04% (mtm).

Pada bulan September 2024, Kota Bandar Lampung terpantau mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm), lebih rendah dari periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm). Secara

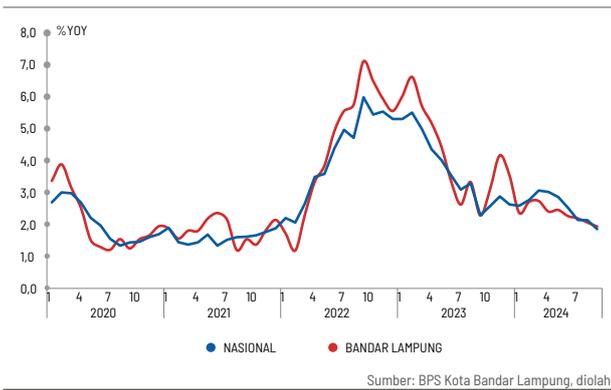


Sumber : SPH Bank Indonesia

Grafik 3.14 Perkembangan Harga Bensin

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, diolah

Grafik 3.15 Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung



Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, diolah

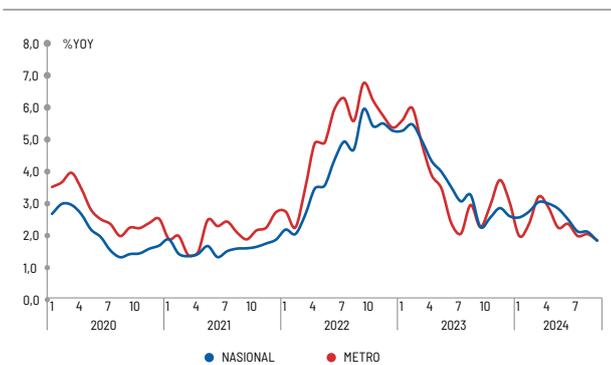
Grafik 3.16 Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung

tahunan, inflasi Kota Bandar Lampung pada bulan September 2024 tercatat sebesar 1,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 2,05% (yoy). Komoditas penyumbang inflasi di Kota Bandar Lampung pada bulan September 2024 antara lain akademi/ perguruan tinggi, nasi dengan lauk, dan kontrak rumah dengan andil masing-masing sebesar 0,44%; 0,06%; dan 0,04% (mtm).

3.2.2 Inflasi Kota Metro

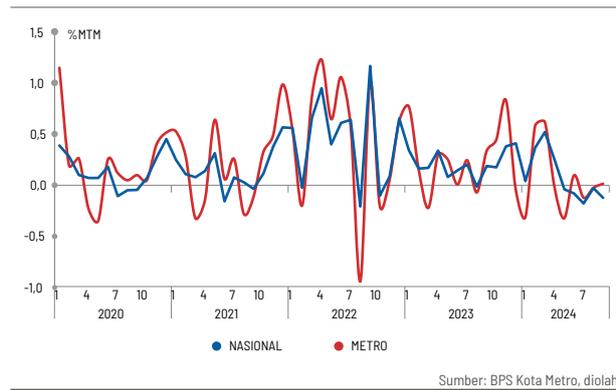
Berbeda dengan Kota Bandar Lampung, Kota Metro pada bulan Juli 2024 mencatatkan deflasi sebesar 0,12% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Metro pada bulan Juli 2024 adalah sebesar 1,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan 2,37% (yoy) pada periode sebelumnya. Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang deflasi adalah bawang merah, cabai merah, jeruk, dan ayam hidup dengan andil masing-masing sebesar 0,21%; 0,09%; 0,09%; dan 0,09% (mtm).

Di bulan Agustus 2024, Kota Metro mengalami deflasi sebesar 0,02% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,12% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kota Metro pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,05% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 1,99% (yoy). Deflasi yang terjadi pada periode ini didorong oleh beberapa komoditas antara lain daging ayam ras, bawang merah,



Sumber: BPS Kota Metro, diolah

Grafik 3.18 Inflasi Tahunan Kota Metro



Sumber: BPS Kota Metro, diolah

Grafik 3.17 Inflasi Bulanan Kota Metro

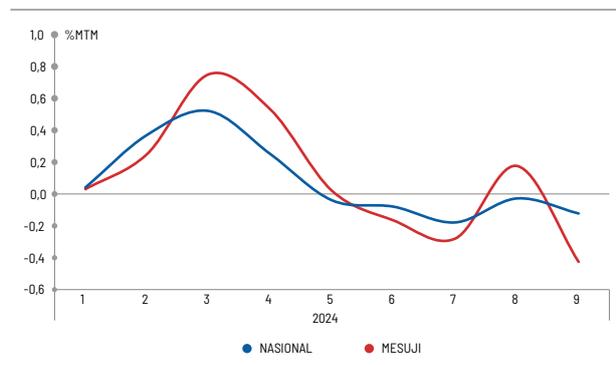
telur ayam ras, dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,08%; 0,07%; 0,05%; dan 0,05% (mtm).

Pada bulan September 2024, Kota Metro kembali mengalami inflasi sebesar 0,01% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,02% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kota Metro pada September 2024 tercatat sebesar 1,86% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 2,05% (yoy). Adapun tekanan inflasi pada periode ini didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti bahan bakar rumah tangga, sigaret kretek mesin (SKM), shampo, dan telepon seluler dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,08%, 0,06%; 0,06%; dan 0,04% (mtm).

3.2.3 Inflasi Kabupaten Mesuji

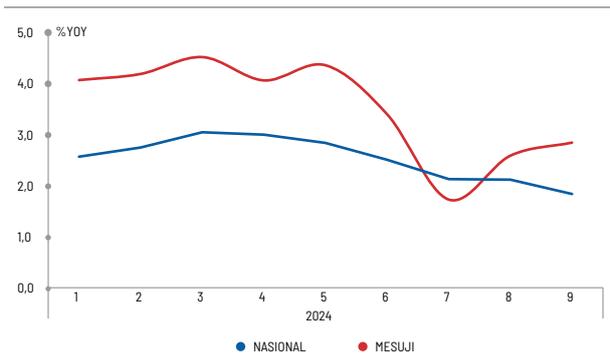
Terhitung tahun 2024, terdapat dua Kabupaten baru yang menjadi wilayah penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji menyumbang sekitar 6% terhadap IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kabupaten Mesuji pada bulan Juli 2024 mengalami deflasi sebesar 0,28% (mtm), lebih rendah dibandingkan deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,17% (mtm). Secara tahunan, Kabupaten Mesuji tercatat mengalami inflasi pada Juli 2024 sebesar 1,73% (yoy), lebih rendah



Sumber: BPS Kab Mesuji, diolah

Grafik 3.19 Inflasi Bulanan Kabupaten Mesuji



Sumber: BPS Kab Mesuji, diolah

Grafik 3.20 Inflasi Tahunan Kabupaten Mesuji

dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,40% (yoy). Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang deflasi adalah bawang merah, tomat, dan cabai merah dengan andil masing-masing sebesar 0,60%; 0,12%; dan 0,07% (mtm).

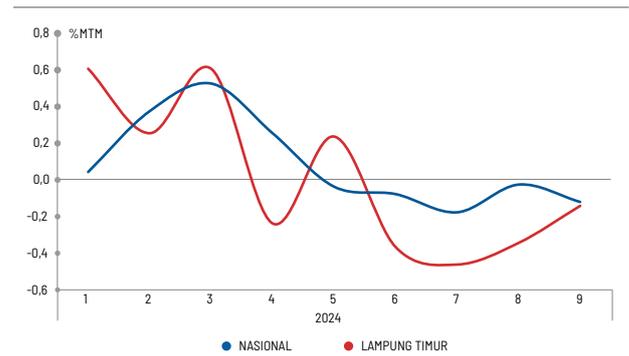
Di bulan Agustus 2024, Kabupaten Mesuji mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,28% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Mesuji pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,73% (yoy). Inflasi yang terjadi pada bulan Agustus 2024 terutama didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti sigaret kretek mesin (SKM), kopi bubuk, dan ayam hidup dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,22%; 0,15%; dan 0,05% (mtm).

Pada bulan September 2024, Kabupaten Mesuji mengalami deflasi sebesar 0,43% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,18% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Mesuji pada September 2024 tercatat sebesar 2,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 2,59% (yoy). Adapun deflasi pada periode ini didorong oleh terkendalinya harga pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai merah, dan cabai rawit dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,35%; 0,13%; dan 0,11% (mtm).

3.2.4 Inflasi Kabupaten Lampung Timur

Serupa dengan Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah baru penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur menyumbang sekitar 28% terhadap IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Timur pada bulan Juli 2024 mencatatkan deflasi sebesar 0,46% (mtm), lebih rendah dibandingkan deflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,37% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Lampung Timur pada Juli 2024 tercatat sebesar 3,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang



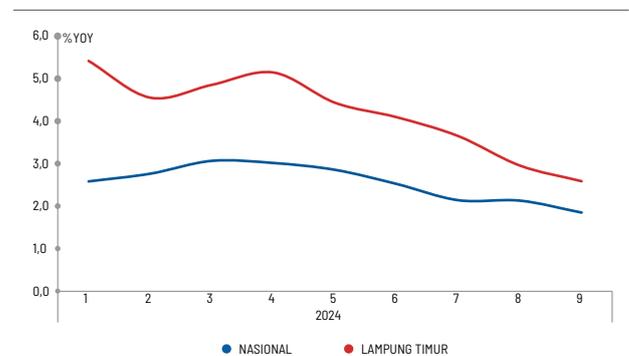
Sumber: BPS Kab Lampung Timur, diolah

Grafik 3.21 Inflasi Bulanan Kabupaten Lampung Timur

tercatat sebesar 4,07% (yoy). Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang deflasi adalah bawang merah, tomat, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar 0,59%; 0,16%; dan 0,04% (mtm).

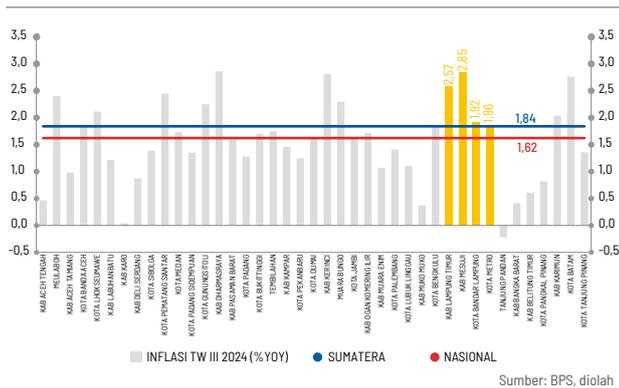
Pada bulan Agustus 2024, Kabupaten Lampung Timur mengalami deflasi sebesar 0,35% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,46% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Lampung Timur pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan 3,63% (yoy) pada bulan sebelumnya. Deflasi yang terjadi pada bulan Agustus terutama didorong oleh penurunan harga pada beberapa komoditas seperti jeruk dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,44%; dan 0,17%(mtm).

Pada bulan September 2024, Kabupaten Lampung Timur mengalami deflasi sebesar 0,14% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,35% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Lampung Timur pada September 2024 tercatat sebesar 2,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan 2,94% (yoy) pada bulan sebelumnya. Penahan inflasi pada periode ini didorong oleh penurunan harga pada beberapa komoditas seperti cabai merah, daging ayam ras, dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,24%; 0,08%; 0,06% (mtm).



Sumber: BPS Kab Lampung Timur, diolah

Grafik 3.22 Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Timur



Grafik 3.23 Inflasi Sumatera

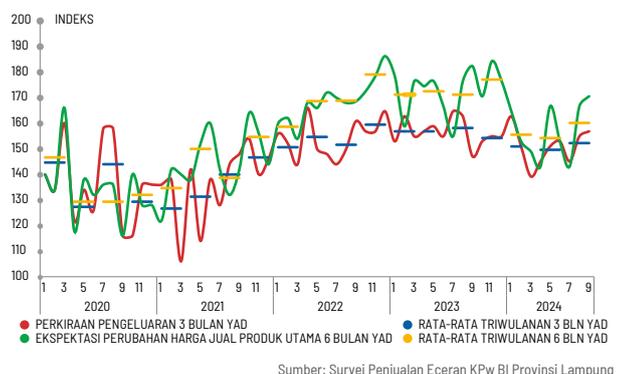
3.3 INFLASI SUMATERA

Dari 41 kabupaten/kota di Sumatera (SBH 2022), terdapat sebanyak 14 kabupaten/kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Secara keseluruhan, tingkat inflasi 2 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (1,84%; yoy). Kabupaten Mesuji berada pada urutan kedua tertinggi di Sumatera dengan inflasi mencapai 2,85% (yoy), sementara Kabupaten Lampung Timur menempati posisi kelima dengan inflasi sebesar 2,57% (yoy). Adapun inflasi di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro masing-masing tercatat sebesar 1,92% (yoy) dan 1,86% (yoy), menempati peringkat ke-12 dan ke-13, keduanya sedikit lebih tinggi di atas inflasi nasional. Lebih lanjut, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji masih perlu menjadi perhatian atas posisinya yang relatif tinggi di Sumatera.

3.4 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN IV 2024

3.4.1 Ekspektasi Inflasi

Inflasi pada triwulan IV 2024 diperkirakan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya seiring dengan melambatnya pasokan pangan dalam masa transisi antar panen raya dan panen gadu di tengah La Nina serta meningkatnya permintaan pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Peningkatan



Sumber: Survei Penjualan Eceran KPw BI Provinsi Lampung

Grafik 3.24 Ekspektasi Perubahan Harga 3 & 6 Bulan Ke Depan

tersebut sejalan dengan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 yang mengindikasikan peningkatan indeks ekspektasi perubahan harga jual produk 3 (tiga) bulan ke depan senilai 156,9, lebih tinggi jika dibandingkan 152,9 pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, indeks ekspektasi perubahan harga jual 6 (enam) bulan ke depan tercatat sebesar 170,6, lebih tinggi dibandingkan 152,9 pada triwulan sebelumnya (Grafik 3.24).

3.4.2 Pengendalian Inflasi

Dalam rangka menjaga sasaran inflasi Provinsi Lampung dalam kisaran yang terjaga di tahun 2024, beberapa upaya pengendalian inflasi telah ditempuh tim TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota Lampung selama triwulan III 2024. Upaya-upaya dimaksud meliputi:

- Monitoring kecukupan pasokan dan perkembangan harga-harga kebutuhan pokok di pasar, distributor, dan gudang oleh TPID** baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sekaligus memastikan kualitas barang pokok memiliki kualitas yang baik dan layak konsumsi, di antaranya:
 - Melaksanakan pemantauan harga secara harian yang dilaksanakan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang aktif disosialisasikan dalam setiap rapat koordinasi TPID. Selain itu, pemantauan harga juga aktif dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
 - KPwBI Provinsi Lampung secara aktif menyampaikan analisis perkembangan harga komoditas bahan pokok di Lampung secara harian berdasarkan data PIHPS yang disampaikan pada platform komunikasi bersama TPID Lampung dan Satgas Pangan Lampung.
- Implementasi Lanjutan GNPIP Provinsi Lampung**

Sebagai bentuk tindak lanjut implementasi GNPIP, telah dilaksanakan program TPID Lampung sebagai upaya penguatan produktivitas dan stabilitas harga pangan secara *end to end*, yang terdiri atas:

 - Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi, dengan fokus komoditas aneka cabai, dan KAD Antar Provinsi, dengan fokus komoditas beras, bawang merah, telur, daging sapi, dan aneka produk UMKM;
 - Peningkatan nilai tambah hilirisasi produk pertanian dengan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, a.l alsintan, demplot budidaya, rumah produksi, serta pendampingan pra dan pasca panen.
 - Mendorong peningkatan konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan melalui sosialisasi/penyelenggaraan regional event dengan fokus komoditas a.l cabai olahan, tepung singkong, dan bawang goreng olahan.

4. Melakukan peningkatan kapasitas kepada petani champion binaan untuk dapat mengimplementasi hilirisasi pangan a.l. melalui transisi menuju organik, mekanisasi & pemanfaatan *Internet of Things* (IoT).

c. Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Menghadapi risiko inflasi pada triwulan III 2024, TPID Provinsi Lampung melakukan beberapa langkah dalam rangka menjaga laju inflasi agar berada dalam *range* 2,5%±1%, antara lain sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Memastikan kelancaran distribusi **pupuk subsidi** kepada petani.
- b. Melakukan **operasi pasar beras/SPHP** secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
- c. Melakukan **monitoring harga** dan **pasokan**, salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (<https://www.bi.go.id/hargapangan>), khususnya pada komoditas-komoditas sbb:
 - a) Komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya: beras dan daging ayam ras;
 - b) Komoditas yang relatif terjaga, namun masih memiliki risiko kenaikan harga: Aneka cabai, bawang merah, telur ayam ras.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi Lampung, utamanya untuk komoditas yang sering bergejolak di Kabupaten/Kota IHK.
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat penanaman padi, optimalisasi peran bendungan dan pompanisasi, pendistribusian varietas yang cukup resisten terhadap genangan, dan pendistribusian traktor/alsintan.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas angkutan barang dan manusia.
- b. Penguatan kapasitas transportasi udara dan laut, melalui penambahan rute & volume penerbangan Lampung dengan Provinsi lain.
- c. Melanjutkan upaya percepatan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
- d. Penguatan koordinasi antar OPD dan Kabupaten/Kota dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 23 tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian distribusi gabah.
- e. Penguatan dan perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi seperti sebelumnya dilakukan

melalui program MAPAN (Metro Antisipatif Pengendalian Inflasi Pangan) di Kota Metro, TAPIS (Tokok Pengendalian Inflasi) di Bandar Lampung.

- f. Bersama dengan BUMD Provinsi, melakukan penguatan dan perluasan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar).

4. Komunikasi efektif

- a. Melakukan rapat koordinasi secara formal, dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal dalam rangka menjaga *awareness* TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
- b. Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) yang dipimpin oleh kepala daerah untuk meningkatkan *awareness* terkait inflasi di seluruh daerah IHK maupun non-IHK.
- c. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku *panic buying*.

d. Quick Wins Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Diperlukan upaya dan pengambilan kebijakan yang bersifat *quick win* dan perbaikan faktor struktural untuk menahan laju inflasi saat ini dan ke depan diantaranya:

1. Pelaksanaan operasi pasar/Gerakan pangan murah dengan fokus komoditas beras, aneka cabai, daging & telur ayam ras, serta komoditas lainnya;
2. Sinergi pengendalian dan stabilisasi harga pangan dan hortikultura secara *end to end*;
3. Pelaksanaan Kerjasama Antar Dearah (KAD) Intra Provinsi, dengan fokus komoditas beras, dan KAD dengan Brebes untuk komoditas Bawang Merah;
4. Pelaksanaan pemeriksaan kesiapan angkutan, pelabuhan, bandara, jalan tol, sarana prasarana pendukung, dan personil, penambahan *extra flight*, persiapan layanan *e-ticketing* serta pos pengamanan dan layanan, perencanaan rekayasa lalin untuk memastikan kelancaran distribusi;
5. Penguatan upaya Perluasan Area Tani (PAT) untuk komoditas pangan pada periode masa tanam April-September;
6. Mempercepat realisasi pupuk ber-subsidi bagi petani padi;
7. Koordinasi Dinas Pertanian, BPS, BMKG, dan Pengelola Irigasi untuk memetakan jadwal tanam dan mengalokasikan ketersediaan air irigasi berdasarkan proyeksi curah hujan.

BOKS 1

Jurus TPID Kendalikan Inflasi: Sinergi yang Kokoh, Inovasi yang Masif



Gambar B1.1 Program Unggulan GNPIP Tahun 2024

Dari 3,47% (yoy) pada tahun 2023, inflasi Lampung tahun 2024 turun ke 2,16% (yoy) pada September 2024. Dinamika tersebut memperkuat posisi inflasi Provinsi Lampung tahun 2024 dalam kisaran yang terjaga. Laju inflasi yang semakin terjaga tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan pangan, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah.

Meskipun penurunan laju inflasi tersebut disebabkan oleh deflasi komoditas bahan pangan, hal ini tidak berarti petani merugi. Upaya stabilisasi harga pangan yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Lampung bertujuan untuk memperkuat keseimbangan harga, agar tetap menguntungkan bagi petani – namun juga nyaman bagi konsumen. Sebagai ilustrasi, Beras, yang menjadi penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2023,

telah memiliki level harga yang berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), namun dengan level harga yang masih menguntungkan petani (lebih tinggi dibandingkan tahun 2022). Hal ini mendukung Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman pangan agar tetap terjaga di atas 100. Artinya, penerimaan petani kelompok ini masih lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

Kokohnya sinergi Pemerintah, Bank Indonesia, dan seluruh stakeholders dalam TPID menjadi kunci pertama terjaganya laju inflasi. Sejak awal tahun 2024, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Lampung terus berupaya untuk menjalin sinergi dengan seluruh elemen TPID dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). GNPIP merupakan suatu langkah pengendalian inflasi yang sinergis dan masif, dilakukan pada level

Tabel B1.1 Capaian GNPIP 2024 dibandingkan Tahun 2023

NOMOR PROGRAM UNGGULAN	NAMA PROGRAM GNPIP	SATUAN	CAPAIAN JAN - DES 2023	CAPAIAN JAN - OKT 2024
1	Penerapan GAP	Kegiatan	2	3
	Penguatan Ketahanan Komoditas Strategis	Best Practice	Kegiatan	4
	Hilirisasi	Kegiatan	1	3
2	Penguatan Kapasitas Budidaya Pangan Mandiri	Sosialisasi	1	4
3	Kerjasama Antardaerah (KAD)	Jumlah MoU atau PKS baru	3	8
4	Dukungan Fasilitas Distribusi Pangan	Frekuensi Fasilitas	4	19
5	Operasi Pasar/Pasar Murah/SPHP	Frekuensi Kegiatan	90	827
6	Penguatan Digitalisasi dan Data Pangan	Kegiatan	1	3
7	Penguatan Koordinasi dan Komunikasi	Koordinasi Kelembagaan	Frekuensi Kegiatan	42
	Capacity Building	Frekuensi Kegiatan	3	6



Gambar B1.2 Toko MAPAN

pusat hingga ke seluruh daerah. Sinergi TPID Provinsi Lampung yang semakin kokoh ditunjukkan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) program unggulan GNPIP yang semakin baik.

Secara umum, seluruh capaian program unggulan GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 meningkat jika dibandingkan tahun 2023.

Peningkatan tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 1**. Selain sinergi, inovasi yang dilaksanakan dengan masif menjadi kunci penguatan GNPIP dalam pengendalian inflasi. Inovasi juga menjadi pengungkit utama peningkatan capaian beberapa program unggulan GNPIP, seperti Operasi Pasar, KAD, Fasilitasi Distribusi Pangan, dan Penguatan Digitalisasi Data Pangan.

Inovasi #1: Inisiasi Pembentukan Toko Pengendalian Inflasi

Memperkuat efektivitas pelaksanaan operasi pasar, TPID di Provinsi Lampung membentuk beberapa Toko Pengendalian Inflasi di lokasi-lokasi strategis. Tujuan pembentukan toko ini adalah untuk mempermudah konsumen dan pedagang dalam menjangkau komoditas bahan pangan strategis, terutama Ketika terjadi gejolak harga akibat terbatasnya pasokan.



Gambar B1.3 TAPIS BUMD Wahana Raharja



Gambar B1.4 TOP Natar

Bekerjasama dengan beberapa distributor, toko ini menyajikan bahan pangan dengan harga yang bersesuaian dengan HET maupun HAP, berlokasi di titik-titik strategis untuk meningkatkan efektivitas mekanisme buffer kenaikan/penurunan harga. Transmisi mekanisme stabilisasi harga tersebut dilakukan melalui kanal langsung (konsumen) dan tidak langsung (melalui pedagang yang kemudian bertransaksi dengan konsumen). Hingga Oktober 2024, toko-toko ini telah tersedia pada lokasi sebagai berikut:

1. Toko MAPAN (Metro Maju Antisipatif Pengendalian Harga Pangan)
Pasar Cendrawasih, Kota Metro
2. TAPIS (Toko Pemantau dan Pengendali Inflasi)
BUMD PT. Wahana Raharja, Kota Bandar Lampung
3. TOP (Toko Operasi Pasar)
Pasar Natar, Kabupaten Lampung Selatan
4. TOPIK (Toko Pengendalian Inflasi Kalianda)
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan

Pelaksanaan inovasi ini mendorong peningkatan realisasi GNPIP, misalnya program unggulan operasi pasar melalui aktivitas operasional toko pada hari Senin s.d. Jum'at. Selain itu, kemitraan antara TPID dengan distributor bahan pangan yang semakin kuat juga menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama (PKS).



Gambar B1.5 TOPIK



Gambar B1.6 Mobil TOP Mendukung Efisiensi Ongkos Angkut dan Operasi Pasar

Inovasi #2: Operasionalisasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar)

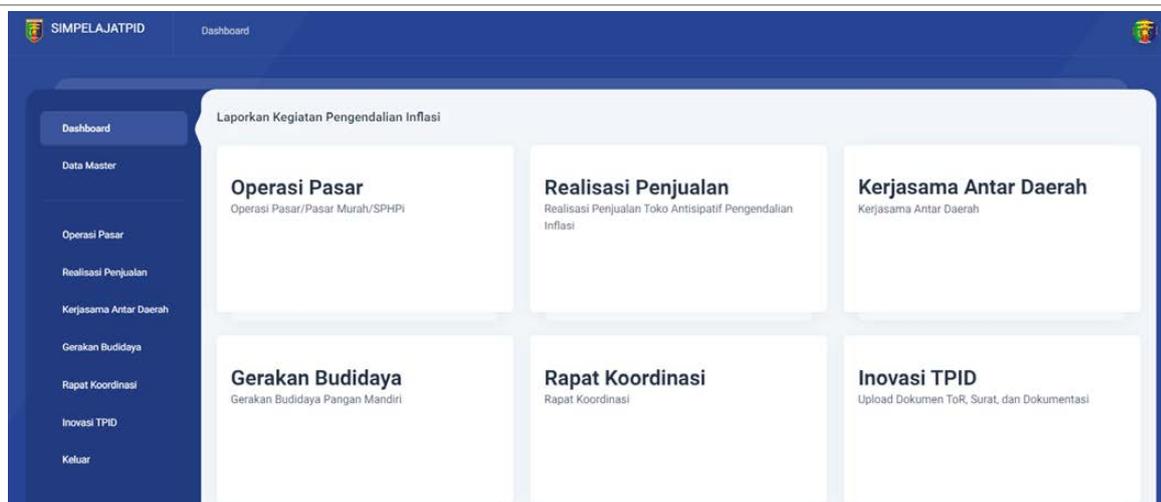
Melalui operasionalisasi Mobil TOP, TPID Provinsi Lampung berupaya memperkuat aspek kelancaran distribusi dalam pengendalian inflasi. Beroperasi sejak Juli 2024, Mobil TOP telah berkontribusi aktif dalam melakukan fasilitasi distribusi pangan dalam rangka stabilisasi harga. Pada kegiatan operasi pasar, Mobil TOP mendukung pengangkutan komoditas dengan tonase maksimal sekitar 4 (empat) ton.

Pengangkutan tersebut dilakukan dari gudang BUMD PT. Wahana Raharja, atau dari pabrik penggilingan gabah di Pringsewu, menuju lokasi operasi pasar di seluruh penjuru Provinsi Lampung. Melalui mekanisme ini, TPID melalui BUMD Pangan meningkatkan efisiensi dalam logistik distribusi komoditas pangan, yaitu ongkos angkut, dalam pelaksanaan kegiatan operasi pasar, atau bahkan aktivitas

penjualan toko pengendalian inflasi. Hingga saat ini, telah terdapat 2 (dua) Mobil TOP yang dimiliki oleh TPID Provinsi Lampung. Masing-masing Mobil TOP ini dikelola oleh KPw BI Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Inovasi #3: Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik Kinerja (SIMPEL AJA) untuk TPID Provinsi Lampung dan TPID seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Selain inovasi yang bersifat implementatif, inovasi yang memperkuat koordinasi antar anggota TPID di Provinsi Lampung juga dilakukan pada tahun 2024. Inovasi tersebut berupa perluasan fungsi website TPID Provinsi Lampung sebagai wadah koordinasi antar anggota TPID. Perluasan tersebut dilakukan melalui implementasi Sistem Pelaporan Kinerja Elektronik Kinerja (SIMPEL AJA) oleh setiap TPID di Provinsi



Gambar B1.7 Dashboard SIMPEL AJA



Gambar B1.8 Capacity Building Pelaporan Kinerja Digital TPID Lampung

Lampung. Koordinasi dimaksud berupa: (i) sentralisasi aktivitas pelaporan kinerja TPID masing-masing kabupaten/kota melalui kanal elektronik/digital berbasis website; (ii) check and balances kinerja masing-masing TPID antar provinsi maupun kabupaten/kota dengan *dashboard* capaian kinerja; dan (iii) implementasi *early warning system* harga pangan yang perlu diperhatikan masing-masing TPID.

Implementasi inovasi ini telah dilakukan bertahap sejak Februari 2024, melalui rangkaian diseminasi GNPIP 2024 yang dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali hingga capacity building pelaporan digital kinerja TPID pada Oktober 2024. SIMPEL AJA telah beroperasi sejak tahun 2021, untuk mendukung pelaporan kinerja TPID Lampung pada masa pandemi COVID-19. Namun demikian, penggunaannya baru dilakukan di skala Pemerintah Provinsi. Pada tahun ini, Bank Indonesia berkolaborasi bersama Biro Perekonomian Provinsi Lampung untuk memperkuat SIMPEL AJA, melalui standarisasi input yang disesuaikan dengan program-program GNPIP 2024, serta perluasan implementasinya hingga ke level kabupaten/kota.



PERBANKAN LAMPUNG

BAB 4

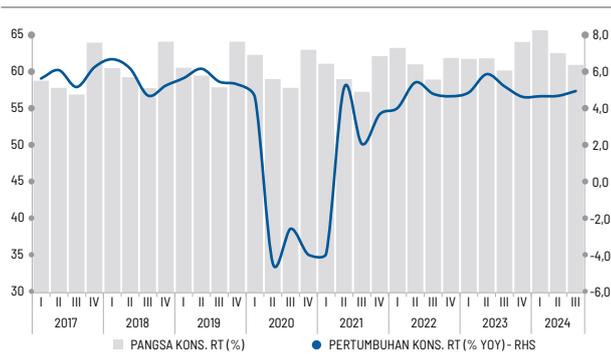
Stabilitas Keuangan Daerah

Kinerja rumah tangga pada triwulan III 2024 tetap kuat. Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian Lampung (60,94% PDRB) tumbuh 4,95% (yoy) pada triwulan III 2024, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,69% (yoy). Hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga yang tetap kuat. Pada triwulan III 2024, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh kuat sebesar 11,11% (yoy) dibandingkan dengan 8,76% (yoy) pada triwulan II 2024. Pertumbuhan positif ini sejalan dengan capaian rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Rata-rata IKE pada triwulan III 2024 masih berada di atas level optimis (100) yaitu sebesar 114,67.

Kinerja penyaluran kredit perbankan pada sektor korporasi pada triwulan III 2024 tumbuh kuat sebesar 15,5% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya tercatat sebesar -16,5% (yoy). Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada korporasi terutama bersumber dari kinerja penyaluran kredit pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 9,65% (yoy). Sementara itu, terdapat penurunan kinerja industri pengolahan pada triwulan III 2024 yang terkonfirmasi dari menurunnya indikator realisasi kegiatan usaha. Pada triwulan III 2024 realisasi kegiatan usaha yang ditunjukkan oleh Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tercatat sebesar -1,08% lebih rendah jika dibandingkan dengan 48,49% pada triwulan II 2024.

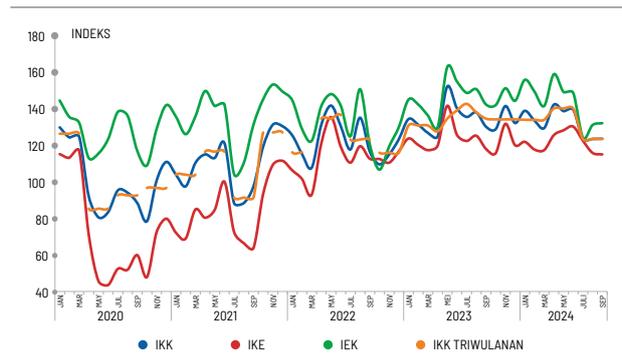
Kinerja perbankan syariah pada triwulan III 2024 terindikasi tumbuh melambat, dari sisi pembiayaan tumbuh melambat pada triwulan laporan tercatat sebesar 18,80% (yoy) dari 19,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, pertumbuhan DPK Bank Syariah terpantau tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. DPK Bank Syariah pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 15,84% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan 18,41% (yoy) pada periode sebelumnya.

Dukungan perbankan Lampung terhadap UMKM pada triwulan III 2024 tumbuh melambat, tercermin dari peningkatan kredit UMKM yang tercatat sebesar 8,87% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 14,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, terdapat penurunan kualitas kredit pada triwulan III 2024. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) kredit UMKM pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 3,70%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 3,64% pada triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2024 tersebut sejalan dengan masih adanya kebijakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Bank Indonesia. Pada triwulan III 2024, pangsa pasar kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 45,39 (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 45,37% (yoy) pada triwulan II 2024.



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.2 Indeks Keyakinan Konsumen

4.1 ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

Kinerja rumah tangga pada triwulan III 2024 tetap kuat. Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian Lampung (60,94% PDRB), tumbuh 4,95% (yoy) pada triwulan III 2024, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,69% (yoy). Hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tetap kuat mendukung kinerja sektor rumah tangga. Pada triwulan III 2024, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh kuat sebesar 11,11% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 8,76% (yoy) pada triwulan II 2024. Pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga sejalan dengan capaian rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Pada triwulan III 2024, rata-rata IKE sebesar 114,67. Hal ini mencerminkan keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Lampung masih berada di atas level optimis (100), meskipun menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 129,83.

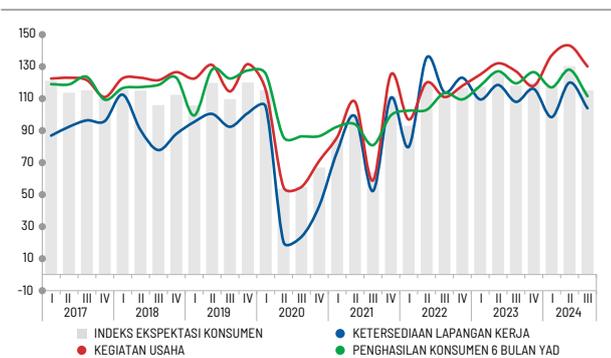
4.1.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Peningkatan konsumsi rumah tangga juga mengakselerasi ekspansi kredit konsumsi pada triwulan III 2024. Pertumbuhan kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 11,11% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 8,76% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, tingkat keyakinan konsumen tumbuh

melambat pada triwulan berjalan yang tercermin dari hasil IKE sebesar 114,67, menurun dibandingkan 129,83 pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.2). Hal tersebut sejalan dengan penurunan keyakinan konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta konsumsi barang tahan lama (Grafik 4.3). Meskipun menurun, beberapa komponen keyakinan konsumen tersebut masih berada di atas level 100. Peningkatan kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2024 terutama bersumber dari Alat RT dan Multiguna yang tumbuh positif masing-masing sebesar 65,72% (yoy) dan 7,02% (yoy). Adapun kredit konsumsi rumah tangga tertahan oleh penyaluran KKB pada triwulan II 2024 berkontraksi sebesar negatif 6,27% (yoy).

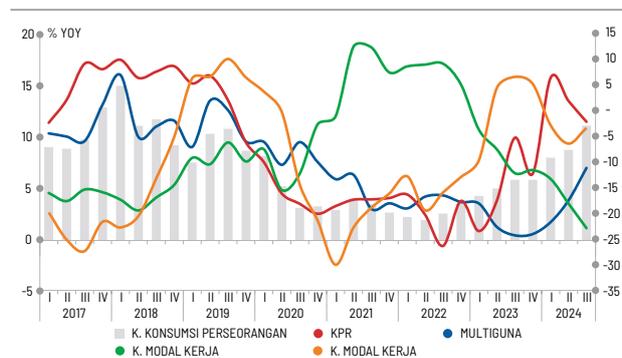
4.1.2 Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Penghasilan konsumen di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 mengalami penurunan sejalan dengan penurunan kinerja sektor industri dan masih tingginya jumlah pengangguran di Lampung pada triwulan berjalan. Hal tersebut tercermin dari indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini juga mengalami penurunan sebesar 103,5, lebih rendah dibandingkan 119,5 pada triwulan II 2024. Sementara itu, rata-rata indeks penghasilan konsumen juga melambat tercatat sebesar 128,5, lebih rendah jika dibandingkan dengan 142,5 pada triwulan sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan menurunnya konsumsi barang tahan lama sebagaimana tercermin dari indeks konsumsi barang tahan lama pada periode berjalan tercatat sebesar 111, lebih rendah dibandingkan 127,5 pada triwulan II 2024.



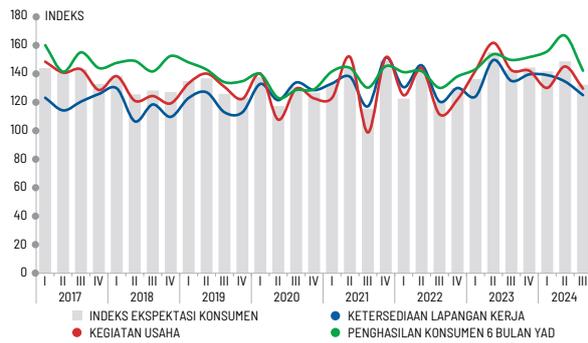
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 4.3 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini



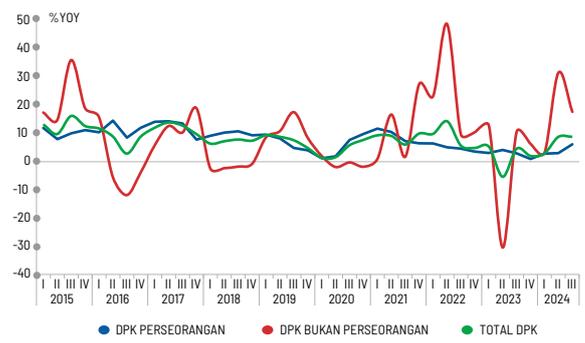
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 4.4 Kredit Perseorangan Lampung



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 4.5 Indeks Ekspektasi Konsumen 6 Bulan Mendatang



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.6 Pertumbuhan DPK Perbankan

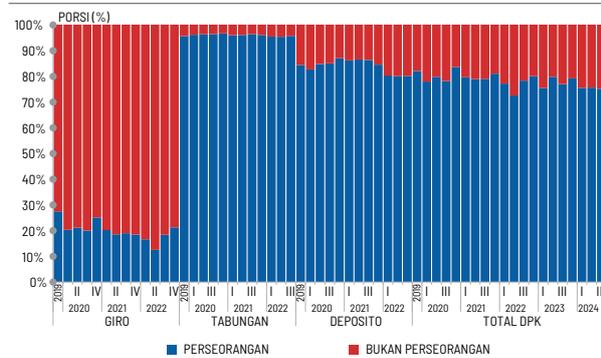
4.1.3 Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan

Simpanan rumah tangga di perbankan pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan. Pada triwulan III 2024, dana Pihak Ketiga (DPK) perseorangan di perbankan Lampung tercatat tumbuh kuat sebesar 6,15% (yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,03% (yoy) (Grafik 4.6). Meskipun demikian, DPK bukan perseorangan menurun 17,68% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 31,56% (yoy) (Grafik 4.7).

Meningkatnya pertumbuhan DPK perseorangan didorong oleh pertumbuhan tabungan, deposito, serta giro yang relatif stabil pada triwulan berjalan masing-masing sebesar 0,95 (yoy), 0,78 (yoy), dan 0,11 (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,95 (yoy), 0,79 (yoy), dan 0,13 (yoy) (Grafik 4.8).

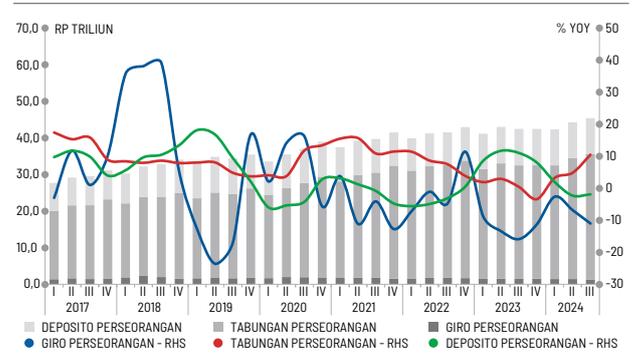
4.1.4 Eksposur Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

Portofolio kredit sektor rumah tangga (kredit perseorangan) pada triwulan berjalan tercatat tumbuh melambat. Pada triwulan III 2024, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tercatat sebesar 6,49% (yoy), menurun dari 6,75% (yoy) pada triwulan II 2024. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit dipengaruhi oleh penyaluran Kredit Alat RT (Grafik 4.11). Penyaluran Kredit Alat RT pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh kuat sebesar 65,72% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 23,82% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan kredit kepada sektor rumah tangga juga didukung oleh kinerja penyaluran kredit multiguna yang tercatat sebesar 7,02% (yoy) pada triwulan berjalan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,89% (yoy). Pada triwulan



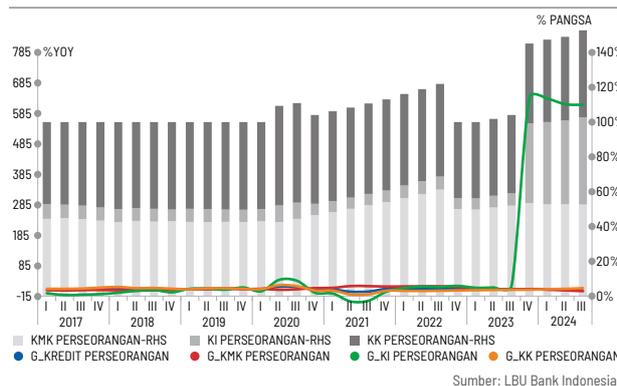
Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.7 Komposisi DPK Perbankan



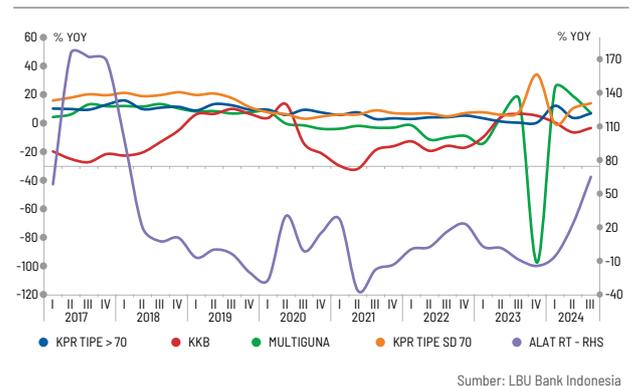
Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.8 Pertumbuhan DPK Perseorangan



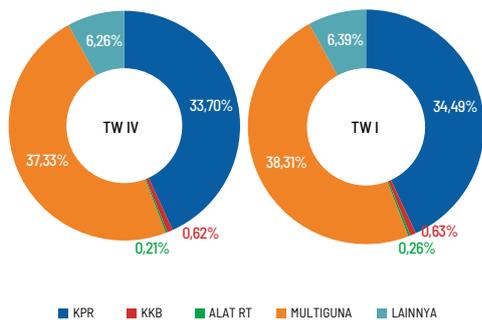
Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.9 Pertumbuhan Kredit Perseorangan



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.10 Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.11 Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan

III 2024, penyaluran KPR tumbuh melambat sebesar 11,48% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan 13,48% (yoy) pada triwulan II 2024. Penyaluran KPR didominasi oleh KPR tipe sd 70 sebesar 14,07% yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,51% (yoy). Sementara itu, penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) pada triwulan berjalan tumbuh sebesar negatif 3,22% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan negatif 6,27% (yoy) pada periode sebelumnya.

4.2 ASESMEN SEKTOR KORPORASI

4.2.1 Kinerja Korporasi

Penurunan kinerja industri pengolahan pada triwulan III 2024 terkonfirmasi dari menurunnya kinerja ekspor serta indikator realisasi kegiatan usaha, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Liaison. Pada triwulan III 2024 realisasi kegiatan usaha yang ditunjukkan oleh Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tercatat sebesar -1,08% lebih rendah jika dibandingkan dengan 48,49% pada triwulan II 2024. Sementara itu, berdasarkan hasil liaison, likert scale (LS) penjualan domestik korporasi pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 0,27, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan II 2024 tercatat sebesar -0,18 (Grafik 4.13).

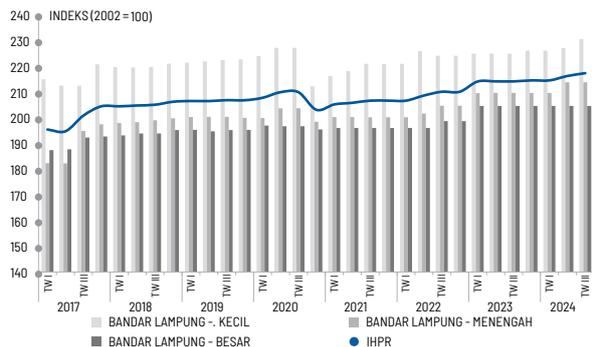
4.2.2 Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit perbankan pada sektor korporasi pada triwulan III 2024 tumbuh kuat sebesar 15,5% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya tercatat sebesar -16,5% (yoy). Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada



Sumber: Liaison Bank Indonesia dan BPS, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Ekspor

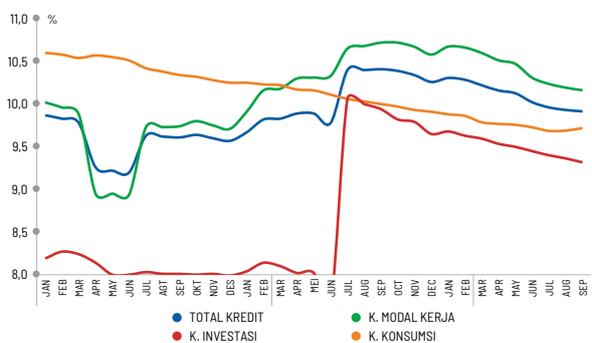


Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.12 Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial

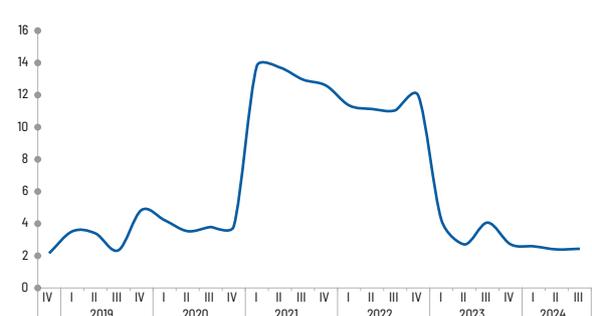
korporasi terutama bersumber dari kinerja penyaluran kredit pada LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada triwulan III 2024, penyaluran kredit perbankan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar mengalami peningkatan sebesar 18,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 9,65% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan penurunan rata-rata suku bunga kredit perbankan menjadi 9,92% pada triwulan II 2024 dari 10,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.14).

Di sisi lain, peningkatan kinerja penyaluran kredit korporasi pada triwulan III 2024 diikuti dengan peningkatan risiko kualitas kredit, terindikasi dari peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL). Pada triwulan III 2024, NPL kredit korporasi tercatat sebesar 2,43%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2,39% pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.15).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Rata-Rata Suku Bunga Kredit Bank Umum



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15 Perkembangan NPL Kredit Korporasi

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Bank Umum Provinsi Lampung

INDIKATOR PERBANKAN	2021				2022				2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Total Aset (Rp. Milyar)	66.467,35	69.067	70.251	72.213	73.958	76.262	75.214	74.788	74.475	77.556	79.048	78.447	74.030	76.636	77.186
Pertumbuhan Aset (%yoy)	4,49	6,07	3,81	10,17	11,27	10,42	7,07	3,57	0,70	1,70	5,10	4,89	(0,60)	(1,19)	(2,35)
Total DPK (Rp. Milyar)	43.869,12	46.522	46.964	47.688	48.325	50.016	49.479	49.916	50.649	50.143	51.565	50.261	51.214	53.322	54.813
Pertumbuhan DPK (%yoy)	9,07	8,78	5,70	10,03	10,16	7,70	5,36	4,67	4,81	0,25	4,22	0,69	1,12	6,34	6,30
Total Kredit (Rp. Milyar)	57.379,46	58.955	59.890	60.858	60.627	62.309	63.275	64.939	63.782	67.457	63.698	65.010	60.365	62.471	63.716
Pertumbuhan Kredit (%yoy)	2,87	7,46	5,77	6,03	5,66	5,69	5,65	6,71	5,20	8,26	0,67	0,11	(5,36)	(7,39)	0,03
NPL (%)	5,52	5,49	5,36	5,00	4,70	4,94	4,66	4,55	2,60	2,29	2,81	2,42	2,53	2,39	2,43
LDR (%)	123,22	119,64	120,58	119,58	118,34	117,04	120,30	121,49	118,04	126,24	115,68	119,56	119,31	118,99	118,01

Sumber: LBUS Bank Indonesia

4.3 ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN

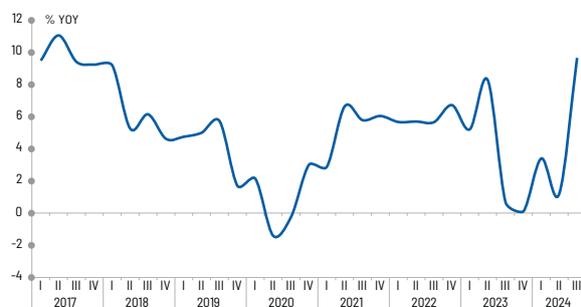
4.3.1 Bank Umum

Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tumbuh melambat. Pertumbuhan aset Bank Umum di Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar negatif 2,35% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan triwulan II 2024 sebesar negatif 1,19% (yoy) (Tabel 4.1). Sementara, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) triwulan III 2024 tercatat sebesar 6,30% (yoy) atau secara nominal sebesar Rp 54,813 M, tumbuh melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 6,34% (yoy).

Kinerja kredit Bank Umum pada triwulan III 2024 meningkat sebesar 0,03% (yoy) atau secara nominal sebesar Rp63,716 M, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -7,39% (yoy) atau secara nominal sebesar Rp62,471 M. Berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit Bank Umum di Provinsi Lampung masih terkonsentrasi untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dengan pangsa yang mencapai 56,01% dari keseluruhan penyaluran kredit Bank Umum, diikuti oleh Kredit Konsumsi (KK) sebesar 31,23% dan Kredit Investasi (KI) sebesar 12,76%. Pada triwulan III 2024, KI dan KK Bank Umum tercatat masing-masing sebesar 29,84% (yoy) dan 10,96% (yoy), tumbuh kuat dari -31,02% (yoy) dan 8,61% (yoy) pada triwulan

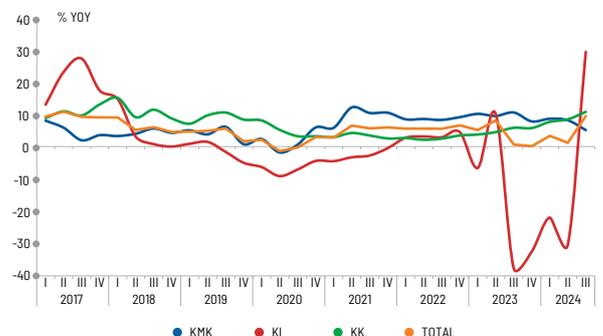
sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah ASN di Provinsi Lampung, diikuti adanya program kredit khusus bagi ASN (Kredit Anggota Dewan). Hal tersebut mempengaruhi stabilitas pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan peningkatan kredit yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sementara itu, KMK triwulan III 2024 tercatat sebesar 5,21% (yoy) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,31% (yoy) (Grafik 4.17). Kendati demikian, kualitas kredit Bank Umum di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tetap terjaga di bawah 5% tercermin dari NPL yang relatif rendah yaitu sebesar 2,43% (yoy).

Dari sisi pendanaan, kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 6,30% (yoy), tumbuh melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 6,34% (yoy). Komponen tabungan menopang pertumbuhan DPK pada triwulan laporan tercatat sebesar 10,26% (yoy), tumbuh kuat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,73% (yoy). Di sisi lain pertumbuhan DPK tertahan oleh perlambatan pada komponen giro dan deposito. Pertumbuhan giro dan deposito pada triwulan III 2024 masing-masing tercatat sebesar 14,83% (yoy) dan -4,30% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 34,14% (yoy) dan -2,09%



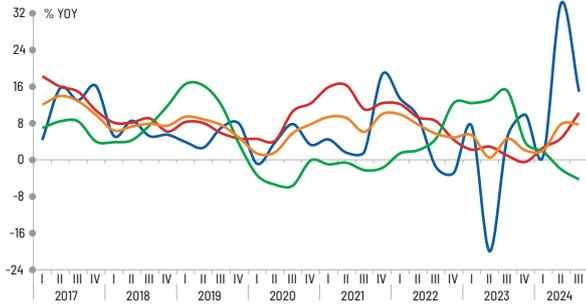
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16 Pertumbuhan Kredit Bank Umum



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17 Pertumbuhan Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.18 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

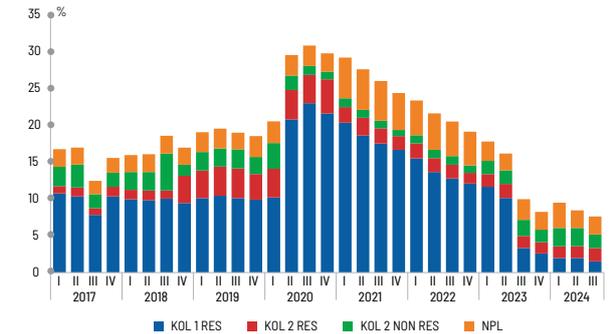
(yoy) (Grafik 4.18). Fenomena ini ditengarai oleh suku bunga deposito yang kurang atraktif diakibatkan penurunan *Deposit Facility* BI Rate yang turun sebesar 25 bps menjadi 5,25% pada triwulan laporan.

Secara umum, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan di Lampung terpantau mengalami penurunan.

BOPO perbankan di Lampung tercatat sebesar 65,83% pada triwulan III 2024, menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 71,18%. Kondisi ini mencerminkan peningkatan efisiensi bank dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasional, serta rasio BOPO yang masih dalam rentang rasio BOPO ideal yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 85%. Penurunan BOPO juga mengindikasikan dampak positif pada profitabilitas perbankan yang tercermin dari peningkatan ROA pada triwulan III 2024 yang mencapai 2,63%, lebih tinggi dari ROA triwulan II 2024 yaitu sebesar 1,19%.

4.3.2 Bank Syariah

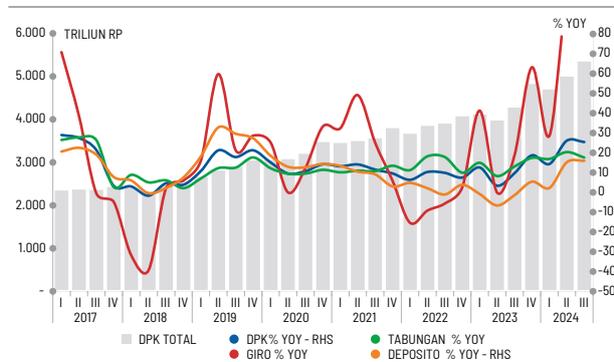
Kinerja perbankan syariah pada triwulan III 2024 terindikasi tumbuh melambat. Aset bank syariah pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 19,02% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 19,08% (yoy) pada triwulan II 2024 (Tabel 4.2). Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan pada triwulan III 2024 tumbuh melambat sebesar 18,80% (yoy) dari 19,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.2).



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.19 Pertumbuhan NPL dan LaR Lampung

Pada triwulan III 2024, pertumbuhan DPK Bank Syariah terpantau tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. DPK Bank Syariah pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 15,84% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan 18,41% (yoy) pada periode sebelumnya. Pertumbuhan DPK pada triwulan berjalan didorong terutama oleh meningkatnya pertumbuhan giro yang pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 105,17% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 97,73% (yoy). Hal ini didukung juga oleh pertumbuhan deposito pada triwulan laporan sebesar 15,80% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,04% (yoy) (Grafik 4.20). Di sisi lain perlambatan pertumbuhan DPK Bank Syariah tercermin dari komponen tabungan yang mengalami penurunan pada triwulan III



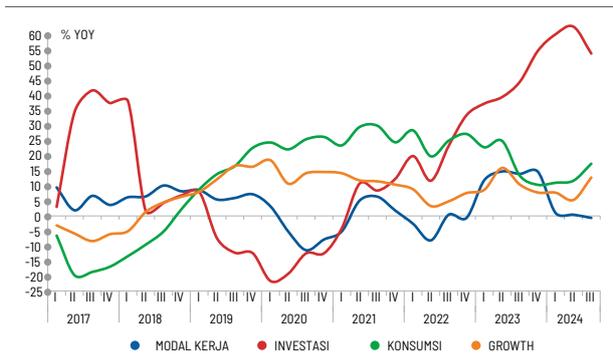
Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.20 Pertumbuhan DPK Bank Syariah

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Bank Syariah Provinsi Lampung

INDIKATOR PERBANKAN	2021				2022				2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Total Aset (Rp. Miliar)	4.830	4.669	4.722	5.352	4.990	5.174	5.372	5.244	5.326	5.436	5.775	6.123	6.190	6.474	6.874
Pertumbuhan Aset (%yoy)	11,02	6,93	5,03	9,80	3,31	10,82	13,76	-2,01	6,74	5,06	7,50	16,76	16,22	19,08	19,02
Total DPK (Rp. Miliar)	3.420	3.465	3.527	3.763	3.633	3.822	3.871	4.039	3.987	3.869	4.138	4.556	4.377	4.581	4.793
Pertumbuhan DPK (%yoy)	13,04	13,97	11,37	9,44	6,23	10,28	9,74	7,35	9,74	1,23	6,90	12,77	9,77	18,41	15,84
Total Pembiayaan (Rp. Miliar)	3.612	3.788	3.774	3.833	3.892	3.990	4.258	4.434	4.672	4.857	5.154	5.397	5.580	5.792	6.123
Pertumbuhan Pembiayaan (%yoy)	8,73	15,97	10,40	7,81	7,74	5,34	12,81	15,69	20,05	21,72	21,05	21,70	19,43	19,24	18,80
NPF (%)	2,46	2,24	1,76	1,77	2,05	2,16	2,10	1,98	1,93	1,92	2,23	2,39	2,44	2,35	2,41
FDR (%)	107,08	110,72	108,57	102,46	107,17	104,51	110,10	109,77	117,19	125,55	124,57	118,46	127,50	126,43	127,75

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.21 Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

2024 tercatat sebesar 17,43% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 20,18% (yoy).

Dari sisi pengelolaan risiko, rasio *Non Performing Financing* (NPF) kredit Bank Syariah pada triwulan III 2024 masih tetap tegang dalam batas aman di bawah 5% yaitu sebesar 2,41%, meningkat jika dibandingkan dengan 2,35% pada triwulan II 2024. Sementara itu, terdapat perlambatan pertumbuhan komponen pembiayaan Bank Syariah pada triwulan III 2024 yang sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK Bank Syariah Lampung. Pertumbuhan pembiayaan modal kerja dan investasi pada triwulan III 2024 tercatat masing-masing sebesar -0,66% (yoy) dan 54,09% (yoy), menurun dibandingkan dengan 0,43% (yoy) dan 63,05% (yoy) pada triwulan II 2024 (Grafik 4.21). Sebaliknya, terdapat peningkatan pembiayaan konsumsi pada triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 17,05% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 15,81% (yoy). Sementara itu, berdasarkan sektornya, pembiayaan tertinggi tercatat masih dialokasikan untuk sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,94%.

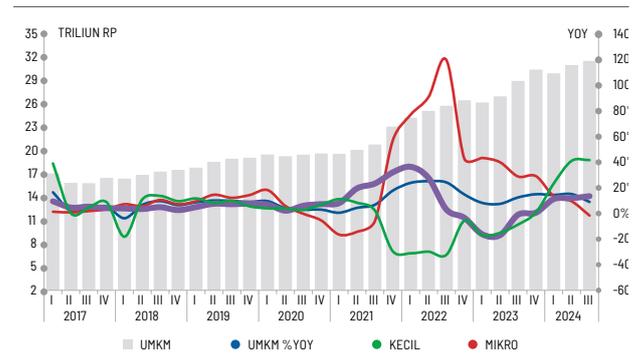
4.4 PERKEMBANGAN KREDIT UMKM

Dukungan perbankan Lampung terhadap UMKM pada triwulan III 2024 tumbuh melambat, tercermin dari peningkatan kredit UMKM yang tercatat sebesar 8,87% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 14,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.23).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.23 NPL Kredit UMKM



Sumber: Bank Indonesia

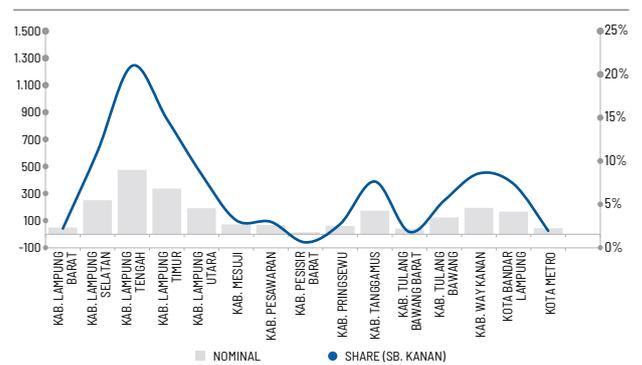
Grafik 4.22 Perkembangan Kredit UMKM

Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2024, sejalan dengan masih adanya kebijakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makprudensial (RPIM) Bank Indonesia. Pada triwulan III 2024, pangsa pasar kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 45,11 (yoy), menurun jika dibandingkan dengan 45,39% (yoy) pada triwulan II 2024.

Penurunan penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2024 tercermin dari penurunan kualitas kredit. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) kredit UMKM pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 3,70%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 3,64% pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan diantaranya karena kesulitan akses pasar, permintaan pasar yang fluktuatif, serta keterbatasan modal bagi pelaku UMKM. Meskipun terdapat peningkatan rasio NPL kredit UMKM, kualitas kredit UMKM Provinsi Lampung pada triwulan berjalan terpantau masih dalam batas aman di bawah 5% (Grafik 4.24).

4.5 PENINGKATAN AKSES KEUANGAN UMKM

Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM baik dari sisi peningkatan produksi, pemasaran, dan akses keuangan, Bank Indonesia Provinsi Lampung memiliki program kluster binaan. Sampai dengan triwulan III 2024, terdapat 18 (delapan belas) UMKM binaan yang mendapat pendampingan dari Bank Indonesia, dengan 7 (tujuh) diantaranya telah mendapatkan pinjaman dari perbankan (Tabel 4.3).



Sumber: DJPB Provinsi Lampung

Grafik 4.24 Penyaluran KUR berdasarkan Kabupaten/Kota

Tabel 4.3 Akses Klaster Binaan Bank Indonesia

NAMA UMKM	KABUPATEN/ KOTA	NAMA BANK PEMBERI PINJAMAN
Klaster Padi Lampung Timur	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	PT BPD LAMPUNG
PT Suhita Lebah Indonesia	KOTA BANDAR LAMPUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk
Klaster Budidaya Bawang Merah (Koperasi Koga Sera Tani)	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk
Klaster Budidaya Klaster Petani Cabai (Koperasi Bina Mandiri Jaya Pringsewu)	KABUPATEN PRINGSEWU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk
Telaga Rizky	KOTA METRO	PT BANK SYARIAH INDONESIA
GENDIS AYU JAHE	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	- PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk
		- PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk
		- PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk
Usaha Bahari	KOTA BANDAR LAMPUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk

Sumber: Fungsi Pengembangan UMKM, Bank Indonesia Provinsi Lampung

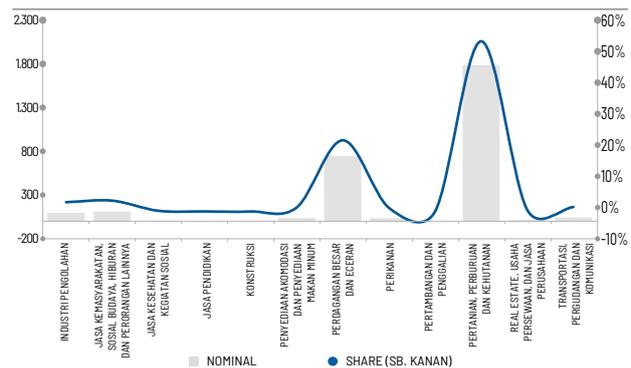
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan di Provinsi Lampung selama triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp2,87 Triliun meningkat 10,56% (qtq) dan 26,60% (yoy) dibandingkan triwulan II 2024 sebesar Rp2,60 Triliun dan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,27 Triliun. Secara lokasi peningkatan ini terutama a.l. didorong oleh peningkatan penyaluran KUR di kab. Lampung Tengah yang selama triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp693,665 Miliar, meningkat 33,96% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp612,277 Miliar (Grafik 4.29). Sementara dari sisi LU peningkatan KUR terutama a.l. didorong oleh peningkatan penyaluran KUR pada LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yang memiliki share terbesar dibanding seluruh LU (61,60%) yaitu sebesar Rp1,77 Triliun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp1,52 Triliun (Grafik 4.30).

Total debitur yang menerima manfaat KUR di Provinsi Lampung selama triwulan III 2024 mencapai 58.526 debitur dengan sebaran debitur terbanyak di kabupaten Lampung Tengah sejalan dengan jumlah penyaluran KUR (Tabel 4.4) yaitu sebesar 13.936 debitur (23,81%). Total debitur yang menerima KUR di Provinsi Lampung selama triwulan III 2024 tercatat paling banyak dengan skema Kecil (Grafik 4.27) mencapai 55,592 debitur atau sebesar Rp2,32 Triliun, diikuti dengan skema Kecil mencapai 2,458 debitur atau sebesar Rp548 Miliar.

Tabel 4.4 Sebaran Debitur KUR berdasarkan Kabupaten/ Kota Tw III 2024

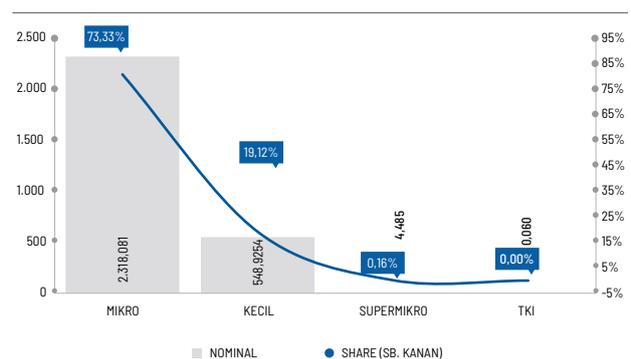
KABUPATEN/KOTA	DEBITUR	SHARE (%)
Lampung Barat	2.012	3,44%
Lampung Selatan	5.743	9,81%
Lampung Tengah	13.936	23,81%
Lampung Timur	7.777	13,29%
Lampung Utara	6.424	10,98%
Mesuji	1.443	2,47%
Pesawaran	1.464	2,50%
Pesisir Barat	391	0,67%
Pringsewu	1.190	2,03%
Tanggamus	5.186	8,86%
Tulang Bawang Barat	843	1,44%
Tulangbawang	2.350	4,02%
Way Kanan	6.283	10,74%
Bandarlampung	2.674	4,57%
Metro	810	1,38%
Total	58.526	100,00%

Sumber: DJPB Provinsi Lampung



Sumber: DJPB Provinsi Lampung

Grafik 4.25 Penyaluran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: DJPB Provinsi Lampung

Grafik 4.26 Penyaluran KUR berdasarkan Skema





BAB 5

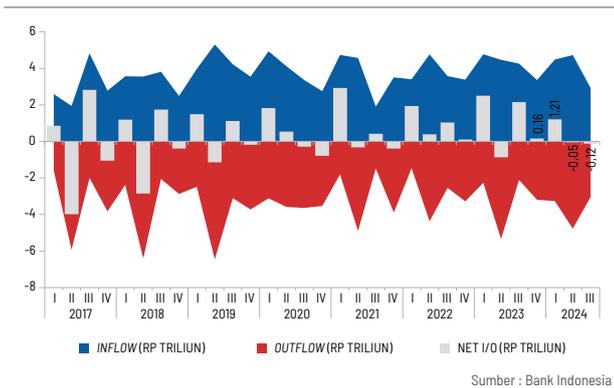
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp0,12 triliun. Kondisi ini sejalan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp0,05 triliun. Kondisi *net outflow* yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan kinerja ekonomi yang membaik.

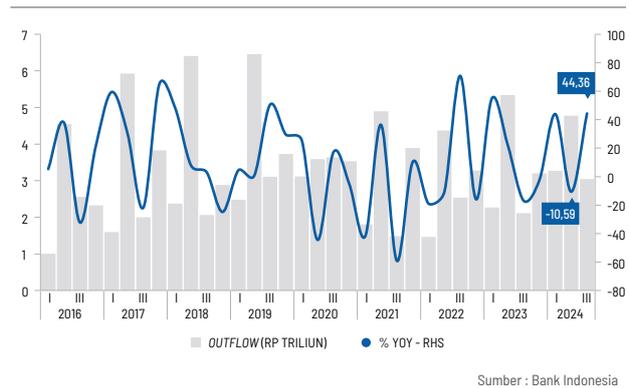
Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, *Real Time Gross Settlement* (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,41% (yoy) pada triwulan III 2024. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami kontraksi sebesar 8,55% (yoy).

Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit tercatat menurun sebesar 10,18% (yoy), penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 10,83% (yoy).

Sampai dengan September 2024, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 574.291 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatera. Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi merchant QRIS se-Sumatera pada triwulan III 2024 dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara, Provinsi, Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 24,26%, 16,18%, dan 13,33% (qtq). Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 10,58% (qtq). Sementara itu berdasarkan pangsaanya, merchant QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-4 (10,58%) setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau.



Grafik 5.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan



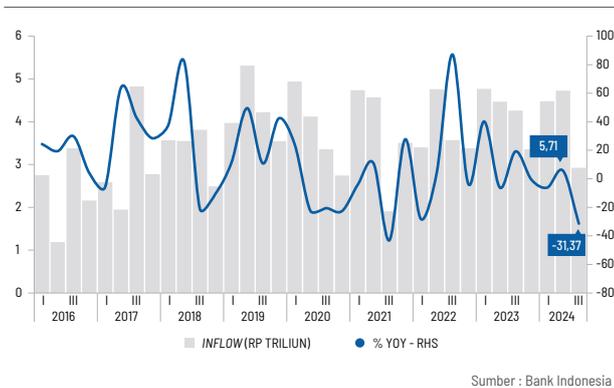
Grafik 5.3 Aliran Uang Kartal Outflow

5.1 PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

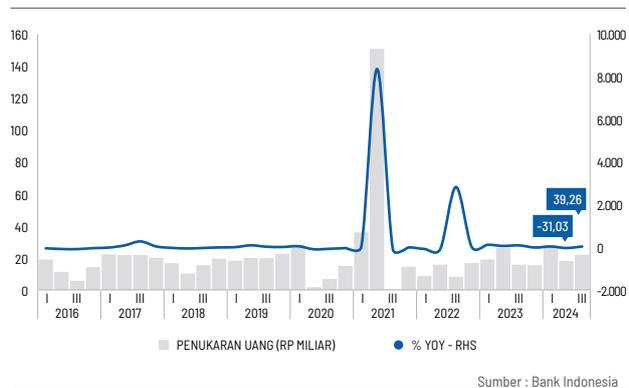
Perkembangan transaksi sistem pembayaran tunai dilihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah aliran uang masuk dari Perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*), jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke Perbankan (*outflow*), termasuk dukungan penyediaan Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan, seperti penukaran uang melalui Bank Indonesia, Kas Keliling, dan Kas Titipan.

5.1.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat mengalami net outflow sebesar Rp0,12 triliun. Kondisi ini sejalan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net outflow sebesar Rp0,05 triliun. Kondisi *net outflow* yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan kinerja ekonomi yang membaik (Grafik 5.1). Namun, secara lebih rinci, dapat dilihat bahwa aliran uang kartal *inflow* tercatat menurun sebesar 31,37% (yoy) (Grafik 5.2) pada triwulan III 2024 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat meningkat sebesar 5,71% (yoy). Di sisi lain, aliran uang kartal *Outflow* meningkat sebesar 44,36% (yoy) (Grafik 5.3), berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 10,59% (yoy).



Grafik 5.2 Aliran Uang Kartal Inflow



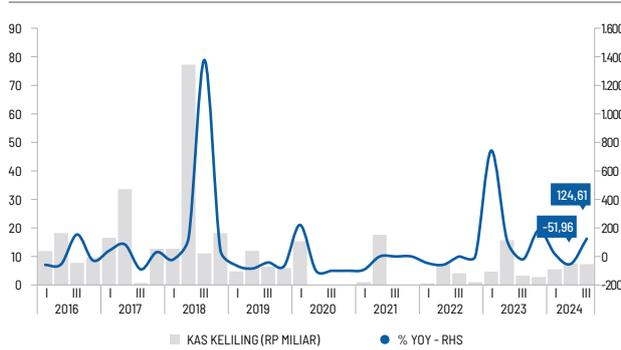
Grafik 5.4 Penukaran Uang Melalui BI

5.1.2 Penyediaan Uang Layak Edar

Dalam pelaksanaan tugas pada bidang Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pengedaran uang ke berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan tentunya dalam kondisi yang layak edar.

Sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan uang kartal yang layak edar (*clean money policy*) tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung secara berkala melaksanakan layanan penukaran Uang Tidak Layak Edar (UTLE) baik secara langsung melalui loket penukaran kantor Bank Indonesia dan kas keliling, serta bersinergi dengan Perbankan untuk turut menerima penukaran uang. Selain itu, untuk terus meningkatkan kualitasnya (*soil level*), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE).

Pada triwulan III 2024 penukaran uang melalui Bank Indonesia tercatat sebesar Rp21,99 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp18,13 miliar (Grafik 5.4). Peningkatan ini diantaranya disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang tidak layak edar yang disetor oleh masyarakat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2024, penukaran melalui kas keliling tercatat sebesar



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.5 Kas Keliling

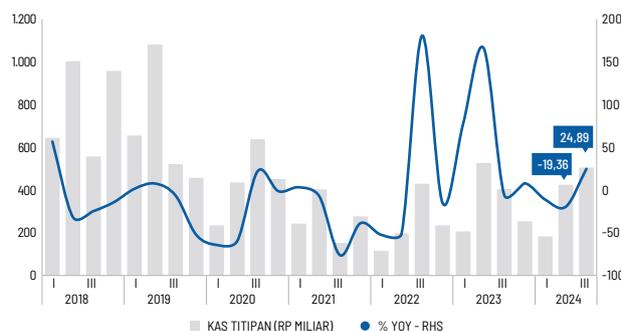
Rp7,35 miliar menurun jika dibandingkan dengan Rp7,57 miliar triwulan sebelumnya (**Grafik 5.5**).

Selanjutnya, KPwBI Provinsi Lampung tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan Uang Layak Edar (ULE) khususnya di daerah terpencil melalui kegiatan kas titipan dan kas keliling 3T (Terdepan, Terluar dan Terpencil). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung saat ini memiliki 1 (satu) Kas Titipan yang berada di Liwa, Kabupaten Lampung Barat dengan Bank Pengelola PT BRI KC Liwa. Kas Titipan Liwa memiliki 4 (empat) Bank Peserta yang terdiri dari BNI, Bank Mandiri, BSI, dan BPD Lampung. Adapun selama triwulan III 2024, transaksi keluar kas titipan Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp505,46 miliar (**Grafik 5.6**), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp424,99 miliar. Selain itu, penukaran kas keliling 3T tercatat sebesar Rp.4miliar

Pada periode laporan, UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp2,32 Miliar. Dibandingkan dengan nominal inflow, persentase pemusnahan tersebut tercatat sebesar 7,94%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,16% (**Grafik 5.7**).

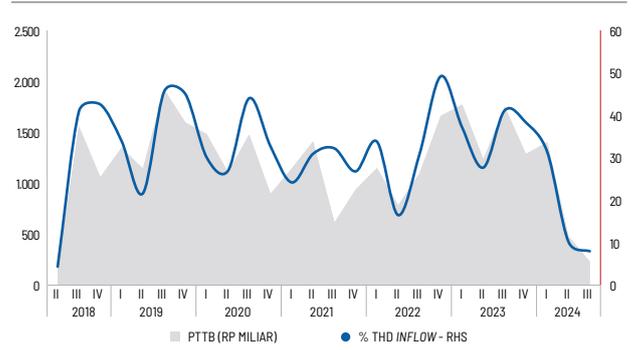
5.1.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu

Pada triwulan III 2024, terdapat temuan uang palsu sebanyak 663 lembar di Provinsi Lampung (**Grafik 5.8**). Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan temuan uang palsu pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 852 lembar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah uang palsu yang



Sumber : Bank Indonesia

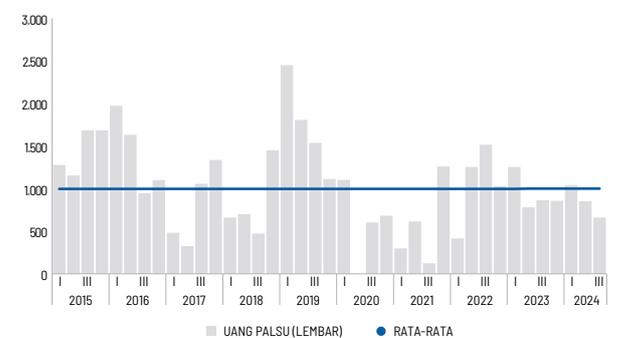
Grafik 5.6 Kas Titipan



Sumber : Bank Indonesia

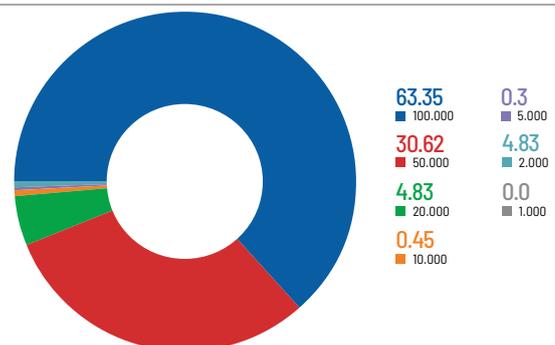
Grafik 5.7 Perkembangan Pemusnahan UTLE

ditemukan mengalami penurunan sebesar 23,44% (yoy). Berdasarkan komposisinya, temuan uang palsu pada triwulan III 2024 didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB) (**Grafik 5.9**), dengan pecahan terbanyak Rp100.000. Sementara itu, untuk Uang Pecahan Kecil (UPK) tercatat ditemukan 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp20.000, 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000 dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000. Upaya pencegahan dan penanganan uang palsu tetap terus dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung melalui sosialisasi dan edukasi program Cinta Bangga Paham Rupiah yang mencakup materi ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR) kepada masyarakat secara berkelanjutan dan melalui berbagai platform. Selain itu, sinergi dengan perbankan dan pihak aparaturnya juga dilakukan sebagai upaya untuk terus menurunkan tindak kejahatan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung.



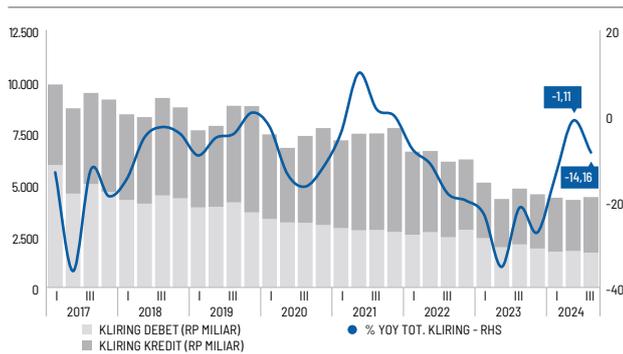
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.8 Temuan Uang Palsu



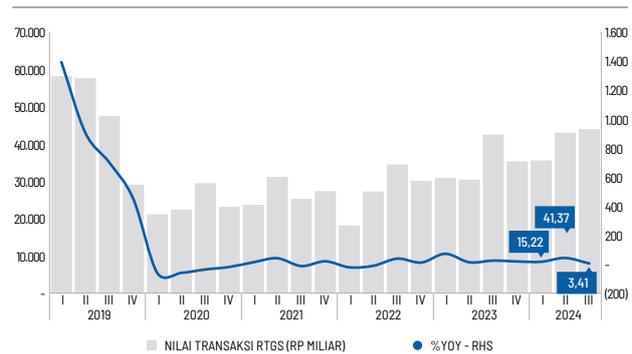
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9 Pecahan Uang Palsu Tw I 2024



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.10 Perkembangan Transaksi Kliring



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi RTGS

5.2 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, *Real Time Gross Settlement* (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan III 2024. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif.

Transaksi pembayaran melalui SKNBI tercatat terkontraksi sebesar 8,55% (yoy), kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 1,11% (yoy) (**Grafik 5.10**). Berdasarkan jenisnya, fenomena melambatnya penurunan transaksi kliring tersebut didorong oleh pertumbuhan kliring kredit serta kliring debit yang tercatat terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nominal transaksi kliring debit tercatat terkontraksi sebesar 18,78% (yoy). Begitu pula nominal transaksi kliring kredit terkontraksi sebesar 0,74% (yoy).

Selanjutnya, berbeda dengan SKNBI, nilai transaksi pembayaran melalui RTGS tercatat tumbuh positif, yakni sebesar 3,41% (yoy) (Grafik 5.11). Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nominal transaksi RTGS mengalami peningkatan yakni dari Rp42,97 triliun menjadi sebesar Rp43,94 triliun. Adapun perkembangan transaksi RTGS tersebut merupakan salah satu indikator atas membaiknya aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung. Hal ini juga menjadi indikasi perubahan *landscape* penggunaan sistem pembayaran di Provinsi Lampung seiring peningkatan akseptasi sistem pembayaran non tunai.

Lebih lanjut, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat (*real-time*), serta tersedia setiap saat (24/7), Bank Indonesia telah mengembangkan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan dimaksud. Dengan kehadiran BI-FAST, diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran ritel nasional melalui penyediaan alternatif terhadap infrastruktur sistem

pembayaran nasional eksisting yang terbatas pada jam operasional tertentu.

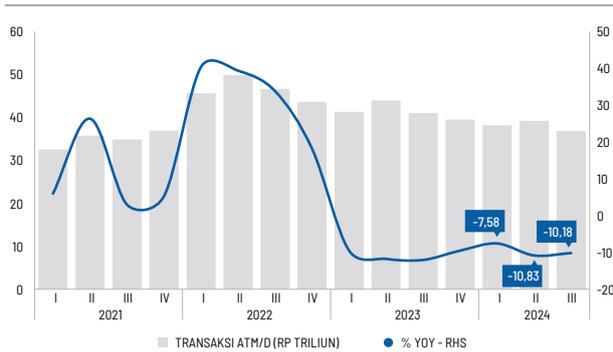
Fitur BI-FAST antara lain mencakup operasional setiap saat (24/7), dana diterima secara *real-time* oleh nasabah dan bank, melayani transfer kredit (*push*) dan debit (*pull*), dapat menggunakan *proxy address* (antara lain nomor *handphone* dan *email*) sebagai pengganti nomor rekening, notifikasi kepada nasabah secara otomatis, *fraud detection system* dan *Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* (AML/CFT). BI-FAST telah diimplementasikan mulai Desember 2021 melalui kanal *mobile/internet* maupun *counter*, yang kemudian akan dikembangkan melalui kanal lainnya, a.l. QRIS, ATM, dan EDC.

5.3 PERKEMBANGAN TRANSAKSI ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) DAN UANG ELEKTRONIK

Sejalan dengan peningkatan akseptasi pembayaran non tunai, preferensi metode pembayaran masyarakat mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba *mobile*, cepat, serta aman melalui berbagai *platform*. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki tugas untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. Perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keamanan berjalannya kegiatan sistem pembayaran nasional.

5.3.1 Perkembangan Transaksi APMK

Pada periode laporan, nominal transaksi kartu ATM/Debit tercatat menurun sebesar 10,18% (yoy), penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 10,83% (yoy) (**Grafik 5.12**). Pertumbuhan transaksi kartu ATM/Debit yang melambat tersebut terpantau juga sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, dimana indeks pengeluaran konsumsi untuk barang tahan lama menunjukkan angka yang optimis (>100) namun lebih rendah selama periode triwulan III 2023, dengan rata-rata sebesar 115,00 (**Grafik 5.13**).

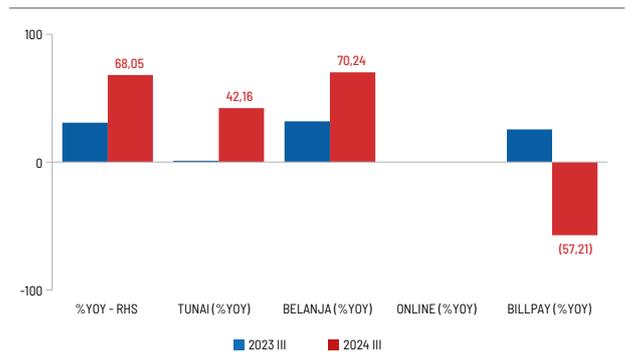


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.12 Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D

Sejalan dengan perkembangan kartu ATM/Debit, transaksi pembayaran melalui kartu kredit pada triwulan III 2024 terpantau meningkat sebesar 68,05% (yoy) (**Grafik 5.14**), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 9,36% (yoy). Tercatat, transaksi pembayaran kartu kredit pada triwulan III 2024 merupakan level tertinggi sejak tahun 2021.

Secara lebih rinci, berdasarkan jenis transaksinya terlihat bahwa pertumbuhan yang lebih rendah transaksi kartu kredit secara signifikan disebabkan oleh lebih dalam terkontraksinya transaksi billpay yang pada periode sebelumnya tercatat sebesar 76,10% (yoy)



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.15 Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.16 Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan (Hasil SK)

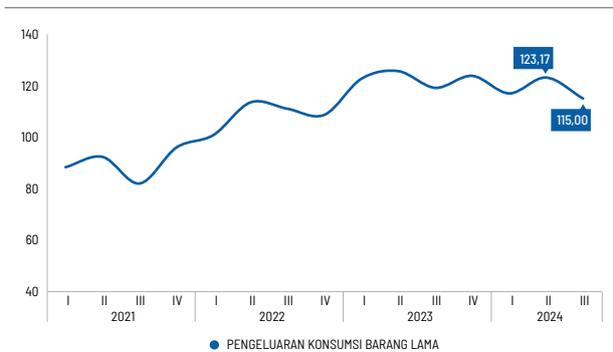
menjadi terkontraksi sebesar 57,21% (yoy). Di sisi lain, transaksi belanja tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 70,24%, lebih tinggi jika dibandingkan 10,55% triwulan sebelumnya (**Grafik 5.15**).

Lebih lanjut, lebih rendahnya transaksi belanja juga terpantau sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung. Pada periode laporan, pangsa penghasilan untuk pembayaran cicilan terpantau mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (**Grafik 5.16**).

5.3.2 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

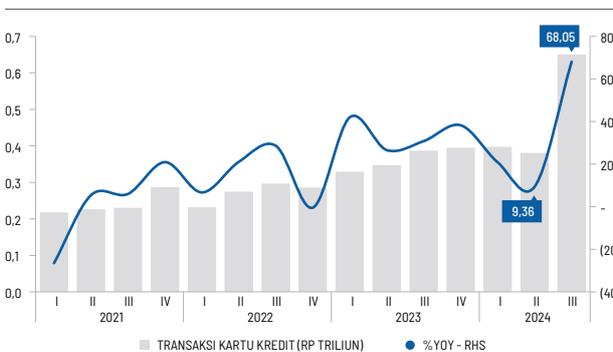
Pada triwulan III 2024, dana float atau nilai uang elektronik yang merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna tercatat sebesar Rp187,48 miliar (**Grafik 5.17**), tumbuh dibandingkan triwulan II 2024 sebesar Rp184,94 miliar. Berdasarkan jenis transaksinya, perkembangan uang elektronik pada triwulan III 2024 mengalami pertumbuhan pada transaksi belanja sebesar 23,50% (yoy) meningkat jika dibandingkan 20,88% pada triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan transaksi transfer yang juga tumbuh sebesar 9,08% (yoy), sedangkan tarik tunai mengalami kontraksi sebesar 37,11% (yoy) (**Grafik 5.18**).

Berdasarkan pangsaanya, transaksi uang elektronik pada periode laporan sebagian besar berasal dari transaksi belanja dengan pangsa



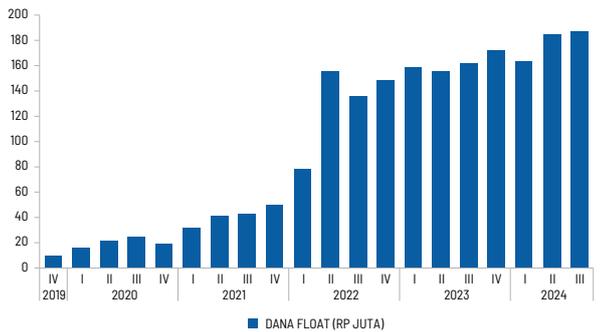
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.13 Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

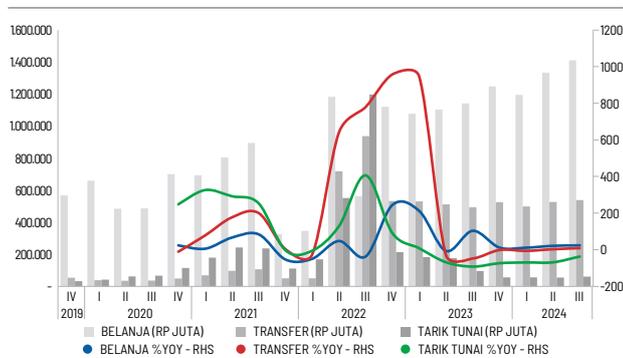


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.17 Perkembangan Dana Float UE

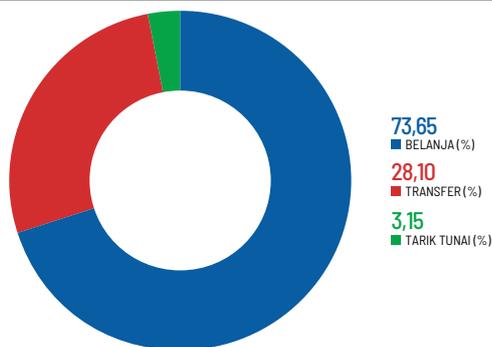
mencapai 73,65% (Grafik 5.19). Sementara itu, pada kedua jenis transaksi lainnya, yaitu tarik tunai dan transfer pangasanya masing-masing sebesar 3,16% dan 28,10%.

Secara umum, tren peningkatan penggunaan digitalisasi pembayaran di Provinsi Lampung juga tergambar dari terus membaiknya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), yakni dari 5,58 di tahun 2021 menjadi sebesar 5,63 di tahun 2022. Peningkatan tersebut ditopang oleh komponen penggunaan yang meningkat sebesar 3,31%. (Grafik 5.20).



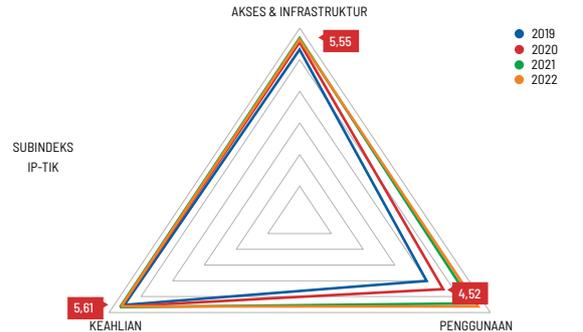
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.18 Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.19 Pangsa Transaksi UE Triwulan II 2024

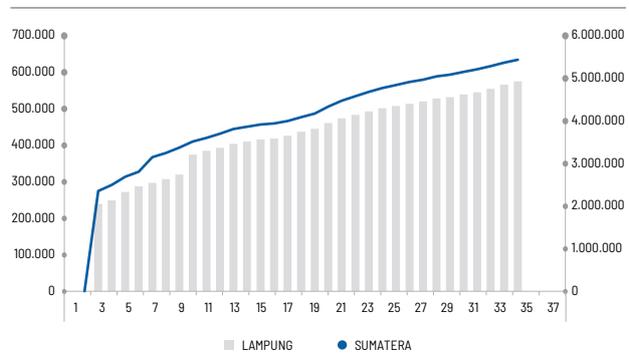


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 5.20 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi

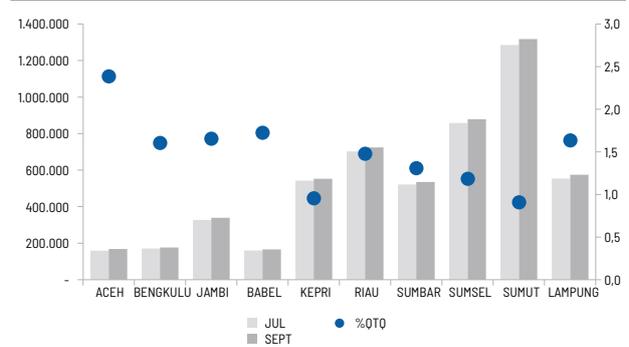
5.4 PERKEMBANGAN MERCHANT & PENGGUNA QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD)

Sampai dengan September 2024, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 574.291 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatera (Grafik 5.21). Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi merchant QRIS se-Sumatera pada triwulan III 2024 dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara, Provinsi, Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 24,26%, 16,18%, dan 13,33% (qtq) (Grafik 5.22). Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 10,58% (qtq). Sementara itu berdasarkan pangsa, merchant



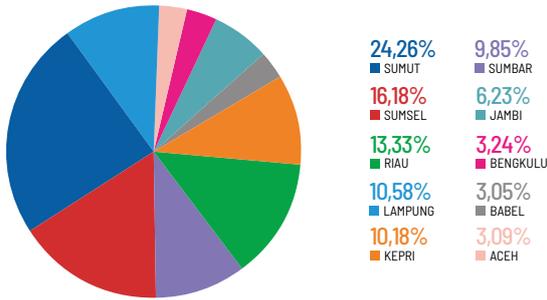
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.21 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.22 Pertumbuhan Merchant QRIS Triwulanan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.23 Pangsa Merchant QRIS di Sumatera

QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-4 (10,58%) setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau (**Grafik 5.23**).

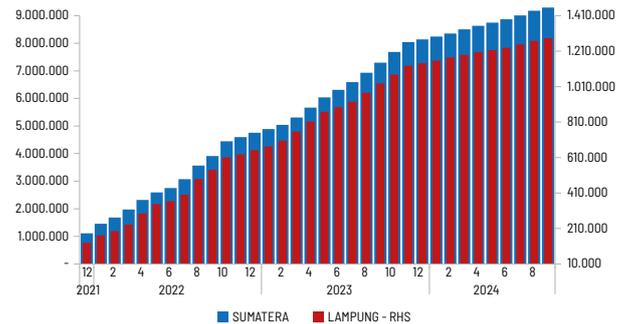
Sampai dengan September 2024, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.283.363 (**Grafik 5.24**). Jumlah ini mengalami pertumbuhan 1,21% (qoq) dari triwulan sebelumnya.

Berbagai strategi program perluasan QRIS telah dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung dalam rangka perluasan QRIS pada tahun 2024, antara lain:

- Berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam penyediaan Posko Mudik Lebaran tahun 2024 di KM20 Tol Bakauheni – Terbanggi Besar.
- Dukungan penyelenggaraan *High Level Meeting* TP2DD Kota Metro pada 27 Juli 2024 dengan tema “Kolaborasi bersama PJP dan Masyarakat untuk meningkatkan Transaksi Non Tunai”
- Dukungan penyelenggaraan *High Level Meeting* TP2DD Kabupaten Tubaba pada 31 Juli 2024 dengan tema “Mendorong Realisasi Pendapatan Kabupaten Tubaba” dalam rangka peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- Partisipasi pengambilan race pack Lampung Half Maraton dengan menggunakan QRIS Rp1,- pada penyelenggaraan HUT Provinsi Lampung ke-60.
- Kontribusi dalam event Kuliner, berupa QRIS *Experience* kepada *tenant* dengan penggunaan QRIS terbanyak
- Sosialisasi penggunaan QRIS, BI-FAST, CBP Rupiah dan Perlindungan Konsumen kepada berbagai komunitas Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa dan GenBI.
- Penyelenggaraan Capacity Building dan koordinasi bersama dengan BBPOM dalam rangka QRIS Pusaka 2.0

Triwulan III 2024

- Berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dan Tanggamus dalam mendorong Bantuan Sosial Non Tunai dengan penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan survey kepada KPM dan Agen bank penyalur.



Sumber : Bank Indonesia

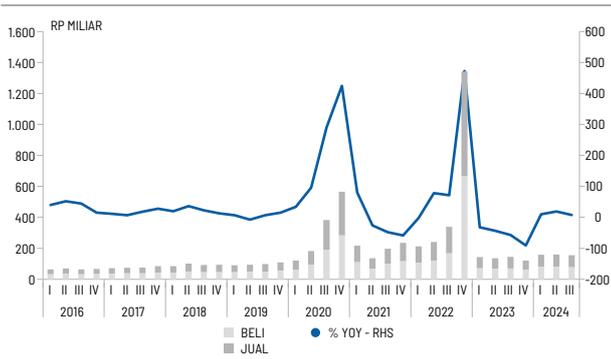
Grafik 5.24 Perkembangan Pengguna QRIS

- Dukungan penyelenggaraan *High Level Meeting* TP2DD dan Audiensi mengenai ETPD di Kabupaten Pesisir Barat, Mesuji, Lampung Utara, dan Pesawaran.
- Apresiasi berupa voucher grandprize dalam event kuliner dan wastra pengunjung kegiatan Lampung Begawi dengan penggunaan QRIS terbanyak.
- Penyelenggaraan QRIS experience dalam kegiatan QRIS 3x3 Sigerslam berupa menggunakan QRIS untuk mendukung tim basket peserta kegiatan.
- Pelaksanaan UMKM Showcase berupa discount pada UMKM Binaan Bank Indonesia bagi customer yang transaksi dengan menggunakan QRIS.
- Partisipasi dalam pengambilan snack untuk menggunakan QRIS Rp.79 pada kegiatan HUT RI Ke-79 bagi peserta kegiatan.
- Penyelenggaraan Focus Group Discussion mengenai elektronifikasi transportasi dan jalan tol di Provinsi Lampung dengan Dinas Perhubungan, Perum Damri, PT. Pelindo, PT. Angkasa Pura II, PT. ASDP Indonesia Ferry, PT. Hakaaston, PT. Utama Karya, dan Perbankan.

5.5 KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB)

Kegiatan Penukaran Valuta Asing merupakan kegiatan jual beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (*Traveller's Cheque*). Kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh Perbankan maupun badan usaha bukan bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, atau biasa disebut dengan *money changer*. Guna mendukung terciptanya perdagangan valuta asing yang sehat dan aman bagi masyarakat, Bank Indonesia telah mengatur tata cara perizinan dan pengawasan Kegiatan Penukaran Valuta Asing yang dilakukan oleh Bukan Bank (KUPVA BB). Ketentuan tersebut tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

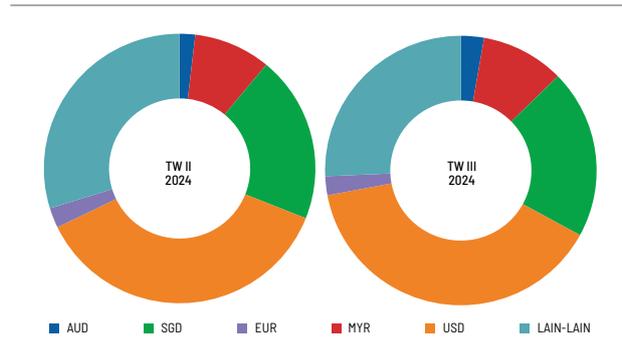
Pada triwulan III 2024 transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp154,73 miliar, menurun dibandingkan total transaksi triwulan



Sumber : Bank Indonesia

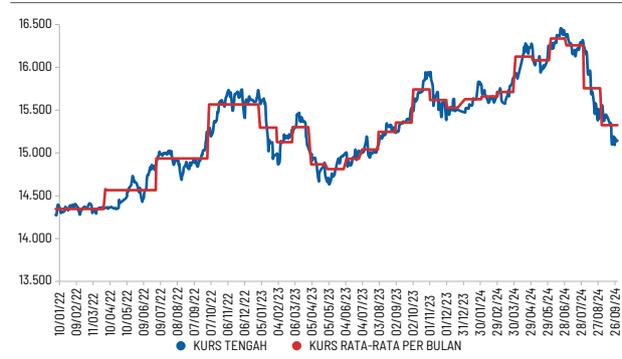
Grafik 5.25 Transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung

sebelumnya sebesar Rp159,72 miliar. Nominal transaksi tersebut tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 7,38% (yoy) (**Grafik 5.25**). Berdasarkan jenis transaksinya, pangsa transaksi jual (dilihat dari sisi KUPVA BB) pada periode laporan tercatat sebesar 50,74%, sedangkan transaksi beli sebesar 49,26%. Berdasarkan komposisi mata uangnya, dapat dilihat bahwa pangsa transaksi penjualan dan pembelian mata uang USD dan SGD mendominasi transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung, masing-masing sebesar 39,09% dan 20,29% (**Grafik 5.26**). Nilai rata-rata kurs tengah US Dollar pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp16.257,30, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2024 yang sebesar Rp16.337,33 (**Grafik 5.27**).



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.26 Transaksi KUPVA BB Per Jenis Mata Uang



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.27 Pergerakan Kurs Nilai Tukar USD-IDR



BOKS 2

Ajak Masyarakat Cinta Rupiah, Bi Lampung Gelar Siger Fest 2024



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Lampung

Gambar B1.1 Sambutan Kepala Perwakilan BI Lampung pada Pembukaan Siger Fest

Bank Indonesia Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Museum Bank Indonesia (MuBI), Dinas Pendidikan Kota Metro, dan Kuliner Lampung Festival menyelenggarakan Festival Semarak Inspirasi dan Gebyar Edukasi Rupiah (Siger Fest) 2024 pada 10 – 13 Oktober 2024 bertempat di Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana, Kota Metro. Kegiatan ini memiliki tujuan utama mengampanyekan Cinta Bangsa Paham Rupiah dan QRIS kepada masyarakat. Selaras dengan Hari Sumpah Pemuda, Siger Fest mengangkat tema **"Rupiahku, Identitasku: Perjalanan Waktu Menempa Nilai"** yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan dalam membela identitas bangsa, yaitu Rupiah.

Pada pembukaan Siger Fest 2024, Junanto Herdiawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyampaikan, "Kedaulatan negara atau bangsa ditunjukkan salah satunya dengan memiliki mata uang sendiri. Indonesia memiliki Rupiah melalui perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, masyarakat harus terus mencintai Rupiah." Sebagai bentuk menjaga kedaulatan negara, Bank Indonesia mendistribusikan uang Rupiah ke seluruh penjuru negeri, termasuk ke daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil). Pada kesempatan ini, Museum Bank Indonesia (MuBI) hadir dengan koleksi numismatik dan replika emas moneter untuk memperkenalkan sejarah mata uang Republik Indonesia kepada masyarakat.

Turut hadir pada pembukaan Siger Fest, Ketua Yayasan Mohammad Hatta, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Direktur Utama PT. Bank Lampung, tenaga pengajar dan siswa di kota Metro. Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan Dedikasi Untuk Negeri berupa sarana pendukung aktivitas belajar dan mengajar kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah tingkat



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Lampung

Gambar B1.2 Pameran Museum Bank Indonesia

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Metro.

Mengangkat sejarah penerbitan Uang Republik Indonesia dan kiprah Mohammad Hatta, pembukaan dirangkaikan dengan *talkshow* "Peran Bung Hatta di Tanah Siger" yang menghadirkan narasumber putri Proklamator Republik Indonesia Ibu Halida Hatta dan peneliti Sejarah museum Bank Indonesia Bapak Syefri Luwis. Ibu Halida Hatta mengingatkan generasi muda untuk selalu membaca, mempelajari sejarah bangsa Indonesia sehingga dapat meneruskan perjuangan Bung Hatta dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif.

Selain pameran Museum Bank Indonesia, Siger Fest memiliki rangkaian kegiatan menarik seperti festival kuliner, praktik kecakapan dan keterampilan, serta lomba-lomba edukatif yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Lampung, khususnya kota Metro.



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Lampung

Gambar B1.3 Closing Ceremony Siger Fest 2024







BAB 6

Ketenagakerjaan & Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Agustus 2024 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,79 juta pekerja, meningkat 1,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami pertumbuhan sebesar 0,37% poin dari 70,04% pada Agustus 2023 menjadi 70,41% per Agustus 2024. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 sebesar 4,81% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Agustus 2024 tercatat berkontraksi sebesar 0,04% poin, dari 4,23% pada Agustus 2023 menjadi 4,19% per Agustus 2024. Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Agustus 2024 yang sebesar 4,91%.

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan III 2024 mencapai 27,34%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 40,57% penduduk bekerja, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,63%.

Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan. Rata-rata Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 128,71; meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2024 yang sebesar 122,56.

Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (10,69%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,03%. Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 941,23 ribu jiwa pada Maret 2024.

Tabel 6.1 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

INDIKATOR	2020		2021		2022		2023		2024		Δ YoY	Δ qtq
	FEB	AUG										
Penduduk Usia Kerja (15+)(ribu)	6.189,40	6.399,50	6.440,10	6.481,20	6.855,56	6.560,30	6.941,98	7.003,29	7.053,58	7.096,22	92,93	42,64
Angkatan Kerja (ribu)	4.433,60	4.489,70	4.619,70	4.495,00	4.971,09	4.595,90	5.003,14	4.904,90	5.044,04	4.996,75	91,85	(47,29)
Bekerja	4.243,80	4.280,10	4.409,80	4.284,30	4.756,82	4.388,00	4.794,03	4.697,66	4.836,33	4.787,59	89,93	(48,74)
Pengangguran	189,70	209,60	209,90	210,60	214,27	208,00	209,11	207,24	207,70	209,16	1,92	1,46
Bukan Angkatan Kerja (ribu)	1.755,80	1.909,90	1.820,50	1.986,20	1.884,47	1.964,30	1.938,84	2.098,32	2.009,54	2.099,47	1,15	89,93
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	71,63	70,16	71,73	69,35	72,51	70,06	72,07	70,04	71,51	70,41	0,37	(1,10)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4,28	4,67	4,54	4,69	4,31	4,52	4,18	4,23	4,12	4,19	(0,04)	0,07
Pekerja Tidak Penuh (ribu)	1.605,40	1.917,60	1.890,70	1.792,50	1.953,77	1.606,90	1.986,20	1.744,92	2.011,60	1.890,89	145,97	(120,71)
Setengah Penganggur	378,10	564,30	422,90	442,40	390,90	303,50	369,90	399,56	521,60	461,02	61,46	(60,58)
Pekerja Paruh Waktu	1.227,30	1.353,30	1.467,80	1.350,10	1.562,87	1.303,40	1.616,30	1.345,37	1.490,00	1.429,88	84,51	(60,12)

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

6.1 KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Agustus 2024 secara umum membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,79 juta pekerja, meningkat 1,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

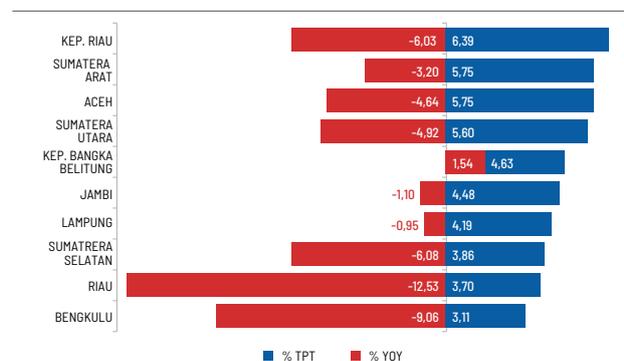
Sejalan dengan hal tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami pertumbuhan sebesar 0,37% poin dari 70,04% pada Agustus 2023 menjadi 70,41% per Agustus 2024. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 sebesar 4,81% (yoy). Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, peningkatan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 terjadi pada sektor pengadaan listrik, gas, dan air minum dengan penambahan persentase angkatan kerja sebesar 18,35% (yoy) serta pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,60% (yoy). Sedangkan jika dibandingkan dengan Februari 2024, peningkatan jumlah angkatan kerja terbesar berada pada sektor pengadaan listrik, gas, dan air minum (85,93%); jasa lainnya (72,06%); serta jasa keuangan dan asuransi, real estat, dan jasa perusahaan (35,00%).

Apabila dilihat dari komposisi, tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 40,57%; perdagangan besar dan eceran sebesar 19,63%; serta pertambangan, penggalian, dan industri pengolahan sebesar 9,55%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 0,67% dan sektor jasa lainnya sebesar 0,49%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Februari 2024, peningkatan distribusi terbesar berada pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 1,71%, jasa lainnya sebesar 1,69%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,89%.

Aspek lain terkait TPAK adalah disparitas gender di pasar tenaga kerja. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2023, TPAK pria mengalami kontraksi sebesar 1,69% poin (dari 87,30% pada Agustus 2023 menjadi 85,61% pada Agustus 2024). Disisi lain, TPAK Perempuan mengalami peningkatan sebesar 2,57% poin (dari 52,01% per Agustus 2023 menjadi 54,58% per Agustus 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan disparitas gender terutama bagi pria di pasar tenaga kerja Provinsi Lampung.

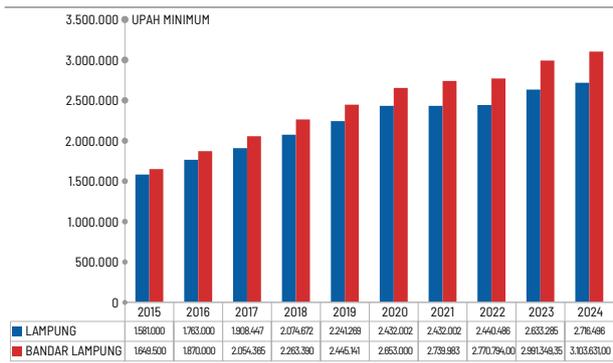
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Agustus 2024 tercatat terkontraksi sebesar 0,04% poin dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu dari 4,23% pada Agustus 2023 menjadi 4,19% pada periode laporan. Terkontraksinya angka TPT merupakan salah satu tolak ukur berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang kuat. Angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT nasional pada Agustus 2024 yang sebesar 4,91%.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) se-Sumatera relative bervariasi. TPT tertinggi dialami oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu 6,39%. Sedangkan TPT yang paling rendah sebesar 3,11% dialami oleh Provinsi Bengkulu. Adapun Provinsi Lampung memiliki TPT terendah ke-empat se-Sumatera (**Grafik 6.1**).



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatera



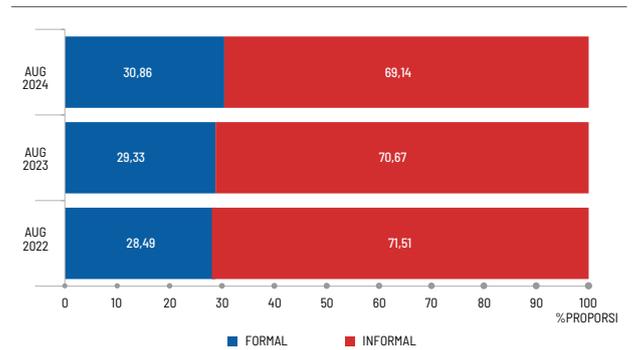
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.2 Perkembangan Upah Minimum Lampung

Patut dicermati bahwa angka pengangguran terbuka relatif lebih tinggi di kawasan perkotaan (5,33%) dibandingkan kawasan pedesaan (3,54%). Jika dibandingkan dengan Agustus 2023, TPT perkotaan mengalami kontraksi sebesar 0,38% poin dan TPT pedesaan mengalami peningkatan sebesar 0,09% poin. Hal ini terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang terus membaik sejalan dengan banyaknya investasi bangunan di daerah perkotaan. Hal ini didukung dengan realisasi kegiatan usaha berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menunjukkan adanya peningkatan signifikan 39,54%, sejalan dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja sebesar 4,43%.

Selain dilihat dari sisi faktor penawaran yang mengalami perbaikan, kondisi pasar tenaga kerja Provinsi Lampung juga perlu dilihat dari sisi perkembangan tingkat upah tenaga kerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2024 tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp83.211,89 (3,16%) menjadi Rp2.716.496,39 dibanding tahun 2023 yang semula sebesar Rp2.633.285,50. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan tingkat UMP pada tahun 2024 sebesar 3,75% menjadi Rp3.103.631,00 dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.991.349,35 (Grafik 6.2).

Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja di periode laporan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami perlambatan. Hal ini tercermin dari menurunnya jumlah *full time worker* (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 2,35% dibanding Agustus 2023 atau tercatat sebesar 2.896,70 ribu orang (60,50%). Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja paruh waktu dan tidak memerlukan tambahan pekerjaan mengalami peningkatan sebesar 1,23% atau tercatat sebesar 1.429,88 ribu orang (29,87%) dari total penduduk bekerja. Selanjutnya untuk kategori pekerja setengah penganggur dalam arti bekerja kurang dari 35 jam dan masih mengharapkan tambahan pekerjaan dan jam kerja, tercatat juga mengalami peningkatan sebesar 1,12% atau sebesar 461,02 ribu orang (9,63%).

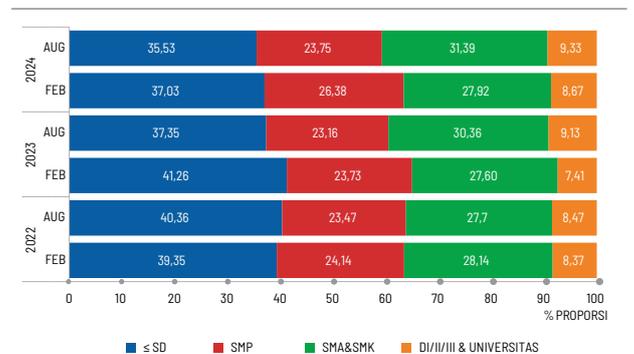


Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.3 Porsi Penduduk Bekerja

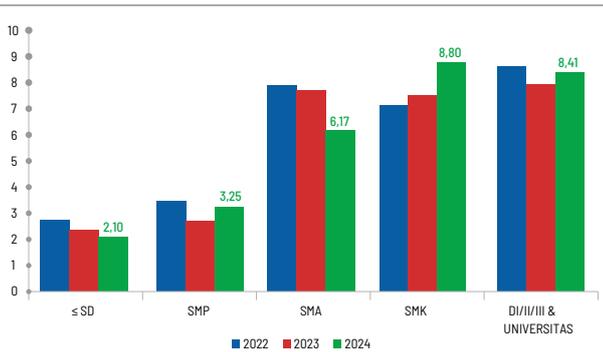
Berdasarkan status pekerjaan utama, belum terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi tenaga kerja di Provinsi Lampung pada Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana sektor informal terpantau masih mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan pangsa 69,14% jauh lebih tinggi dibanding sektor formal yang hanya mencapai 30,86% dari keseluruhan tenaga kerja di Provinsi Lampung (Grafik 6.3). Dibandingkan posisi Agustus 2023, jumlah pekerja informal dan formal masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar -1,53% dan 1,53%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan kerja formal meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Selaras dengan status pekerjaan utama tenaga kerja di Provinsi Lampung pada periode Agustus 2024 yang masih didominasi oleh pekerjaan informal, ditinjau dari tingkat pendidikan tercatat bahwa sebagian besar pekerja berada pada kategori pendidikan rendah. Sebesar 1.700,90 ribu orang (35,53%) merupakan tamatan SD ke bawah dan 1.137,07 ribu orang (23,75%) merupakan tamatan SMP. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah atau tamatan SMA maupun SMK, tercatat masing-masing sebesar 1.005,95 ribu orang (21,01%) dan 497,09 ribu orang (10,38%). Adapun untuk level pendidikan tinggi atau DI/II/III dan Universitas tercatat sebesar 446,57 ribu orang (9,33%) (Grafik 6.4).



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.4 TPAK Menurut Tingkat Pendidikan

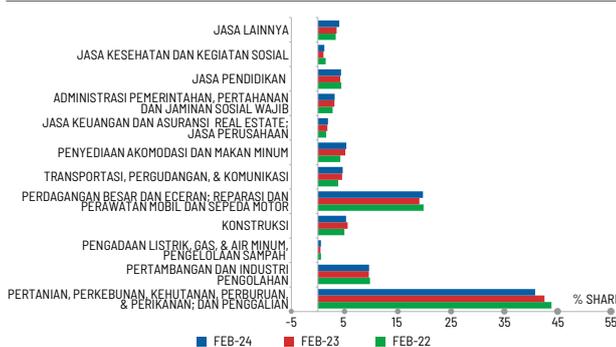


Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.5 TPT Menurut Tingkat Pendidikan

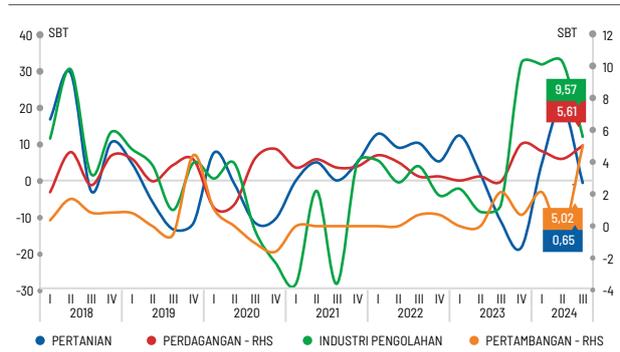
Perlu menjadi perhatian bahwa pada periode laporan, TPT terbesar disumbang oleh kategori tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,80%, sedangkan TPT yang paling rendah adalah tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah sebesar 2,10%. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara kualifikasi kebutuhan tenaga kerja (*skilled employees*) dengan angkatan kerja SMK (khususnya bersifat *unskilled employees*) (Grafik 6.5). Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi kerja dan kemandirian dalam membuka lapangan kerja, khususnya untuk percepatan pemulihan perekonomian. Program tersebut ditujukan untuk para pencari kerja, buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi dalam pengembangan perekonomian dalam skala mikro dan kecil. Adapun pendaftaran Kartu Prakerja pada 2024 telah sampai pada gelombang 71 pada Agustus 2024.

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan III 2024 mencapai 27,34%, sektor industri pengolahan dengan pangsa 19,41% dan sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa mencapai 13,97%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 40,57% penduduk bekerja, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,63% (Grafik 6.6). Adapun sektor industri pengolahan berhasil menyerap 9,55% dari total penduduk bekerja.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.6 Share Tenaga Kerja



Sumber: SKDU KPw BI Prov. Lampung, diolah

Grafik 6.7 Hasil SKDU Realisasi Kegiatan Usaha Berdasarkan Sektor

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data realisasi kegiatan usaha hasil SKDU Provinsi Lampung triwulan III 2024 secara keseluruhan tercatat tumbuh kuat sebesar 39,54% SBT, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan SBT pada triwulan II 2024 yang sebesar 48,49%. Secara sektoral, realisasi kegiatan usaha mengalami pertumbuhan pada sektor Pertambangan dan Penggalian dari -0,43% SBT menjadi 5,02% SBT dan sektor Perdagangan dari 5,94% SBT menjadi 9,57% SBT. Di sisi lain, pada sektor Pertanian mengalami perlambatan dari 20,22% SBT menjadi -0,65% SBT dan sektor Industri Pengolahan dari 10,31% SBT menjadi 5,61% SBT. (Grafik 6.7).

Berdasarkan sektor lapangan pekerjaan, persentase penduduk bekerja di Lapangan Usaha (LU) Pengadaan Listrik, Gas, dan Air mengalami peningkatan tertinggi sebesar 18,35% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga mengalami peningkatan, tercermin dari pertumbuhan tenaga kerja sebesar 17,60% (yoy). Di sisi lain, jumlah penduduk bekerja di LU Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 3,72% (yoy). Adapun LU lain yang juga mencatatkan kontraksi serapan pekerja adalah LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,29% (yoy) (Tabel 6.2).

6.2 NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 128,71; meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2024 yang sebesar 122,56. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan pada indeks yang diterima petani (It) sebesar 4,53% (qtq) (Grafik 6.8). Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya NTP pada triwulan III 2024 dibanding triwulan sebelumnya, maka tingkat kemampuan/daya beli petani di Provinsi Lampung menguat; sehingga dinilai kesejahteraan petani secara umum pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan.

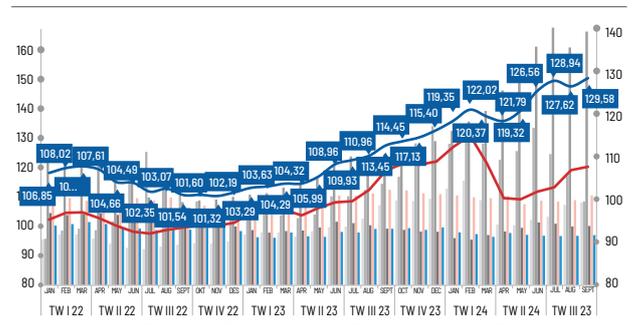


Tabel 6.2 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung

NO	INDIKATOR	2020		2021		2022		2023		2024		YOY (%)										
		FEB-20	PORSI	AUG-20	PORSI	FEB-21	PORSI	AUG-21	PORSI	FEB-22	PORSI		AUG-22	PORSI	FEB-23	PORSI	AUG-23	PORSI	FEB-24	PORSI	AUG-24	PORSI
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, & Perikanan; dan Penggalian	1.984,70	46,88	1.938,2	45,29	45,81	45,81	43,59	43,59	2.023,55	42,54	1.914	43,62	2.201,2	45,92	1.988,0	42,32	2.233,8	46,19	1.942,35	40,57	(2,29)
2	Pertambangan dan Industri Pengolahan	393,10	9,26	392,6	9,17	8,85	8,85	9,29	9,29	454,28	9,55	426,8	9,73	435,6	9,09	446,7	9,51	437,3	9,04	457,38	9,55	2,40
3	Pengadaan Listrik, Gas, & Air Minum, Pengelolaan Sampah	22,10	0,52	14,2	0,33	0,49	0,49	0,4	0,40	19,03	0,40	25,4	0,58	23,1	0,48	22,8	0,48	14,5	0,30	26,96	0,56	18,35
4	Konstruksi	190,80	4,50	241	5,63	4,92	4,92	5,86	5,86	207,40	4,36	216,7	4,94	231,3	4,82	261,0	5,56	228,5	4,73	251,33	5,25	(3,72)
5	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	781,70	18,42	807,3	18,86	18,41	18,41	19,36	19,36	913,79	19,21	866	19,74	885,8	18,48	890,5	18,96	866,8	17,92	939,79	19,63	5,54
6	Transportasi, Perdagangan, & Komunikasi	142,70	3,36	161,8	3,78	3,76	3,76	3,86	3,86	215,01	4,52	166,3	3,79	181,7	3,79	211,7	4,51	237,5	4,91	221,61	4,63	4,67
7	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	163,90	3,86	168,8	3,94	4,49	4,49	4,55	4,55	251,64	5,29	183,5	4,18	179,0	3,73	240,0	5,11	213,9	4,42	254,30	5,31	5,95
8	Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate; Jasa Perusahaan	57,60	1,36	61,5	1,44	1,07	1,07	1,18	1,18	65,17	1,37	67,7	1,54	83,7	1,75	83,1	1,77	66,2	1,37	89,37	1,87	7,58
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	144,60	3,41	123,4	2,88	3,02	3,02	3,09	3,09	151,27	3,18	120,5	2,75	123,2	2,57	144,7	3,08	144,6	2,99	149,62	3,13	3,42
10	Jasa Pendidikan	181,60	4,28	180,6	4,22	4,26	4,26	4,33	4,33	227,38	4,78	191,7	4,37	178,7	3,73	195,7	4,17	230,5	4,77	206,30	4,31	5,41
11	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,60	1,22	45,5	1,06	1,33	1,33	1,43	1,43	62,79	1,32	63,3	1,44	81,5	1,70	49,0	1,04	51,7	1,07	57,60	1,20	17,60
12	Jasa Lainnya	124,40	2,93	145,1	3,39	3,59	3,59	3,06	3,06	166,49	3,50	146	3,33	189,3	3,95	164,6	3,5	111,0	2,30	190,99	3,99	16,05

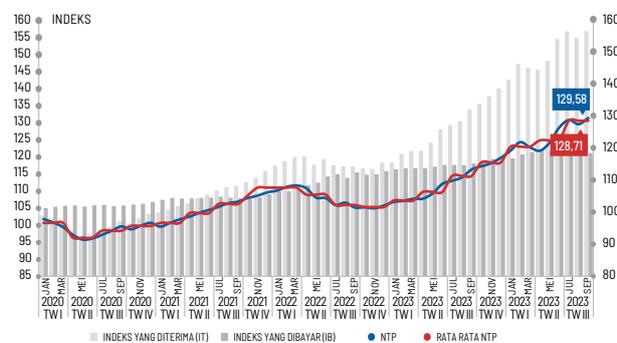
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Kemudian secara sektoral, rata-rata NTP beberapa sektor tercatat mengalami pertumbuhan pada triwulan III 2024, yaitu sektor perkebunan rakyat yang tumbuh 7,65% (qtq), tanaman pangan yang tumbuh 5,12% (qtq), peternakan yang tumbuh 0,66% (qtq), dan perikanan tangkap yang tumbuh 0,36% (qtq). Disisi lain, NTP pada sektor hortikultura tercatat kontraksi sebesar 8,32% (qtq) dan perikanan budidaya yang kontraksi sebesar 0,41% (qtq) (Grafik 6.9). Secara lebih rinci, rata-rata indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) di Provinsi Lampung pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan menjadi sebesar 121,44 dari 122,01 pada triwulan sebelumnya (Grafik 6.10). Lain halnya dengan rata-rata indeks harga yang diterima petani (It) di Provinsi Lampung pada triwulan III 2024 yang tercatat mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 156,31 dari 149,53 pada triwulan sebelumnya. (Grafik 6.11).



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.9 NTP Per Sub Sektor



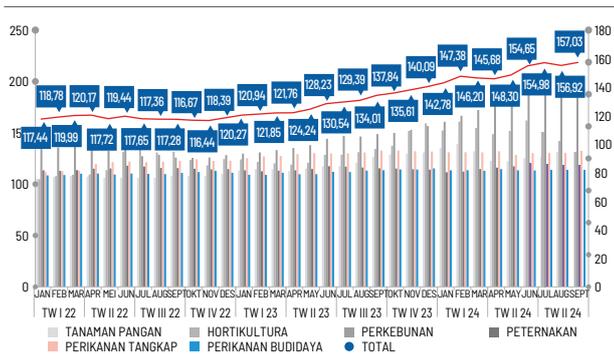
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.8 NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

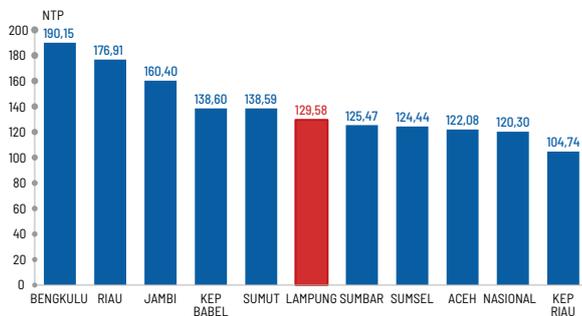
Grafik 6.10 Indeks yang Diterima per Sub Sektor



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.11 Indeks yang Diterima per Sub Sektor

Sejalan dengan hal tersebut, bila dibandingkan dengan petani provinsi lain di Sumatera, NTP Provinsi Lampung pada Triwulan III 2024 sebesar 129,58 menempati posisi keenam terbawah dari 10 Provinsi dan berada di atas Nasional yang sebesar 120,30 (Grafik 6.12). Sementara dilihat dari NTUP yang mencerminkan pengeluaran riil petani untuk usaha taninya, tercatat NTUP Provinsi Lampung meningkat sebesar 4,16% (qtq), dengan peningkatan terbesar terjadi pada sektor perkebunan dan sektor tanaman pangan masing-masing sebesar 6,43% (qtq) dan 4,31% (qtq) (Grafik 6.13).



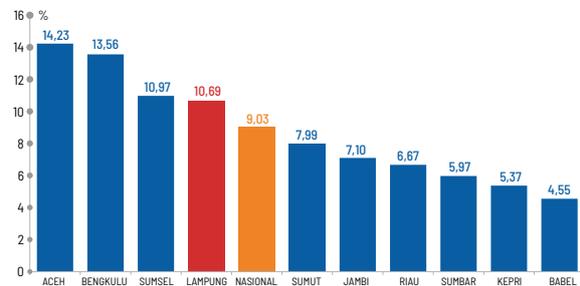
Sumber: BPS Nasional, diolah

Grafik 6.12 NTP Provinsi-Provinsi di Sumatera

6.3 KEMISKINAN

Terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 3,03% (yoy), dari 970,67 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 941,23 ribu jiwa pada Maret 2024. Dari sisi komposisinya, hingga Maret 2024 penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani. Penduduk miskin yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan tercatat sebesar 74%, sedangkan sisanya sebesar 26% berada di daerah perkotaan. Dibandingkan dengan Nasional (9,03%), persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi yakni sebesar 10,69% (Grafik 6.14). Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 jika dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Sumatera, di bawah Provinsi Aceh (14,23%), Provinsi Bengkulu (13,56%) dan Provinsi Sumatera Selatan (10,97%).

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan Provinsi Lampung pada Maret 2024 mencapai 244,04 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 4,76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 232,96 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan Provinsi Lampung pada Maret 2024 tercatat sebanyak 697,19 ribu jiwa atau menurun sebesar 5,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 737,71 ribu jiwa (Grafik 6.15).



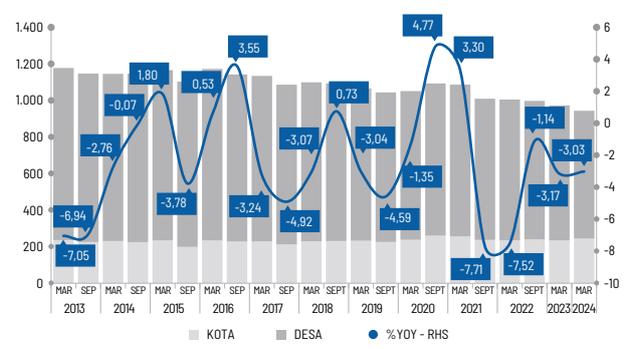
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.14 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.13 Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.15 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Lampung

Tabel 6.3 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2024

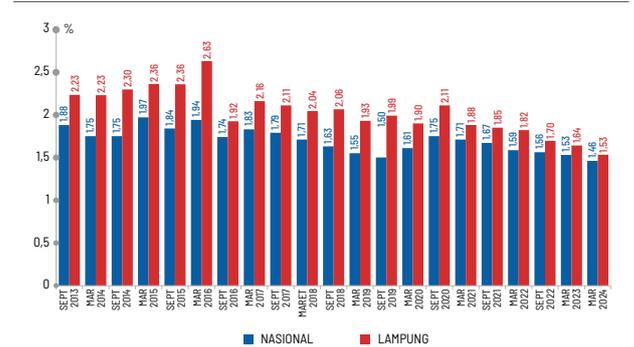
JENIS KOMODITI	PERKOTAAN	JENIS KOMODITI	PERDESAAN
Makanan	74,00	Makanan	75,16
Beras	22,32	Beras	24,28
Rokok Kretek Filter	13,09	Rokok Kretek Filter	11,72
Telur Ayam Ras	4,61	Telur Ayam Ras	3,98
Cabe Rawit	2,40	Cabe Rawit	3,07
Tempe	2,38	Roti	2,40
Daging Ayam Ras	2,33	Tempe	2,20
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,29	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,14
Mie instan	2,05	Gula Pasir	2,13
Bukan Makanan	22,32	Bukan Makanan	24,28
Perumahan	7,63	Perumahan	7,43
Bensin	3,81	Bensin	4,78
Listrik	3,27	Listrik	2,36
Pendidikan	2,35	Pendidikan	1,36
Perlengkapan Mandi	1,26	Perlengkapan Mandi	1,06

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Dilihat dari pergerakan Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Lampung pada periode Maret 2023 sampai dengan Maret 2024 tercatat meningkat 4,93% menjadi sebesar Rp586.551,- per kapita/bulan pada Maret 2024 dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebesar Rp559.011,- per kapita/bulan. GK merupakan faktor lain yang menentukan tingkat kemiskinan selain faktor penghasilan. Angka GK dipengaruhi oleh komponennya yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Pergerakan harga kelompok makanan sebagai komponen utama GKM dengan beras dan rokok kretek filter sebagai komoditas kelompok makanan yang memiliki sumbangan terbesar terhadap GK di kota maupun desa. Hal ini berarti bahwa kenaikan harga bahan makanan menjadi salah satu penyebab kenaikan garis kemiskinan di Provinsi Lampung.

Di perkotaan dan pedesaan, beras memberikan sumbangan terbesar terhadap GKM, yaitu 22,32% di perkotaan dan 24,28% di pedesaan, diikuti oleh komoditi rokok kretek filter, telur ayam ras, cabe rawit, tempe, roti, daging ayam ras, serta kopi bubuk dan kopi instan (sachet). Selain kelompok makanan, komoditi bukan makanan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap GKM adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi sehingga perkembangan harga komoditas-komoditas tersebut juga perlu terus dicermati (Tabel 6.3).

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan hingga 0,11 poin, yakni dari 1,64 pada Maret 2023 menjadi 1,53 pada Maret 2024 (Grafik 6.16). Sementara itu, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung dalam satu tahun terakhir juga turut mengalami



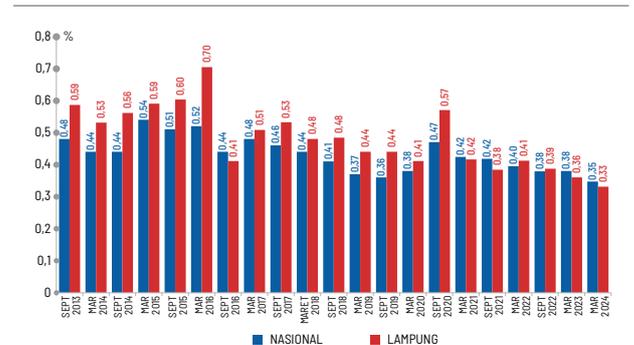
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.16 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

penurunan sebesar 0,03 poin, yakni dari 0,36 pada Maret 2023 menjadi 0,33 pada Maret 2024 (Grafik 6.17). P1 dan P2 merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta keragaman tingkat pengeluaran penduduk miskin.

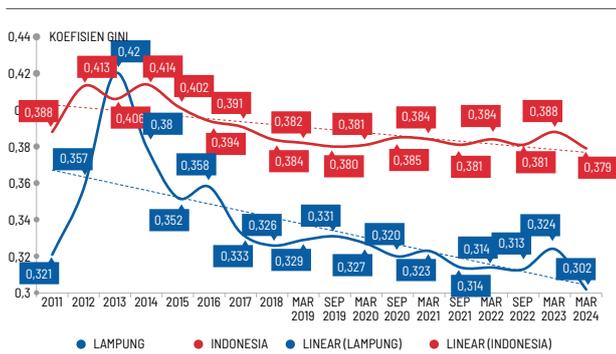
Sementara itu, Koefisien Gini tercatat menurun sebesar 0,022 poin, dari indeks 0,324 pada Maret 2023 menjadi sebesar 0,302 pada Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan ketimpangan pendapatan pada masyarakat Provinsi Lampung. Sejalan dengan hal tersebut, Koefisien Gini Nasional tercatat juga menurun sebesar 0,009 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 0,379 poin pada Maret 2024 dan 0,388 poin pada Maret 2023 (Grafik 6.18).

Dana bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2024 masih terus berlanjut di Provinsi Lampung. Untuk periode triwulan III 2024, di Provinsi Lampung telah dilakukan penyaluran bansos PKH kepada 367.704 keluarga penerima manfaat (KPM) atau dengan total nominal sebesar Rp254,58 miliar dan telah terserap sebesar 99,67% (Tabel 6.4). Berdasarkan kebijakan dari Kementerian Sosial per Juli 2024, bantuan sosial tersebut disalurkan kepada 15 Kabupaten/Kota secara non tunai oleh Himbara (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) dan Bank Syariah Indonesia di 502 Kab/Kota. PKH merupakan salah satu program untuk



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.17 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.18 Koefisien Gini Lampung dan Nasional

menurunkan angka kemiskinan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk keluarga kurang mampu, dengan besaran Rp900 ribu hingga Rp3 juta per tahun.

Tabel 6.4 Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan III 2024

ROW LABELS	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	PENYALURAN (Jml KPM)	PENYALURAN (Nominal)	% PENYALURAN (Jml KPM)	% PENYALURAN (Nominal)	PENYERAPAN (Jml KPM)	% PENYERAPAN (Jml KPM)
LAMPUNG	367.707	254.581.888.458	367.704	254.580.688.458	100,00%	100,00%	366.490	99,67%
KOTA BANDAR LAMPUNG	28.147	19.456.087.039	28.146	19.455.687.039	100,00%	100,00%	27.981	99,41%
KOTA METRO	4.022	2.802.749.451	4.022	2.802.749.451	100,00%	100,00%	4.018	99,90%
LAMPUNG BARAT	13.416	9.163.514.969	13.416	9.163.514.969	100,00%	100,00%	13.367	99,63%
LAMPUNG SELATAN	45.129	30.777.186.267	45.127	30.776.386.267	100,00%	100,00%	44.950	99,61%
LAMPUNG TENGAH	54.855	37.670.919.367	54.855	37.670.919.367	100,00%	100,00%	54.633	99,60%
LAMPUNG TIMUR	45.221	31.030.469.764	45.221	31.030.469.764	100,00%	100,00%	45.136	99,81%
LAMPUNG UTARA	39.533	27.663.286.333	39.533	27.663.286.333	100,00%	100,00%	39.399	99,66%
MESUJI	8.904	6.100.774.204	8.904	6.100.774.204	100,00%	100,00%	8.881	99,74%
PESAWARAN	24.236	17.026.022.040	24.236	17.026.022.040	100,00%	100,00%	24.191	99,81%
PESISIR BARAT	9.490	7.017.548.486	9.490	7.017.548.486	100,00%	100,00%	9.465	99,74%
PRINGSEWU	17.195	11.751.914.627	17.195	11.751.914.627	100,00%	100,00%	17.139	99,67%
TANGGAMUS	33.172	23.269.362.384	33.172	23.269.362.384	100,00%	100,00%	33.107	99,80%
TULANG BAWANG BARAT	10.077	6.980.240.721	10.077	6.980.240.721	100,00%	100,00%	10.030	99,53%
TULANG BAWANG	12.344	8.521.240.392	12.344	8.521.240.392	100,00%	100,00%	12.285	99,52%
WAY KANAN	21.966	15.350.572.416	21.966	15.350.572.416	100,00%	100,00%	21.908	99,74%

Sumber: HIMBARA, diolah

Sejalan dengan penyaluran PKH, Program Sembako hanya disalurkan melalui mekanisme non tunai oleh Himbara (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) dan Bank Syariah Indonesia di 420 Kab/Kota sejak Juli 2024. Berdasarkan hal tersebut, realisasi penyerapan program sembako yang disalurkan hingga saat ini secara non tunai per September 2024 sebanyak 13.988.375 KPM atau 94,39% dengan total nominal sebesar Rp 2,80 triliun.

Pada triwulan III 2024 penyaluran program sembako di Provinsi Lampung yang baru disalurkan adalah dengan persentase sebanyak 95,44% kepada 602.271 KPM. Adapun bantuan program sembako yang telah disalurkan kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan kabupaten penerima bansos terbanyak adalah Kabupaten Lampung Selatan yang tercatat memiliki 80.960 KPM, Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 78.624 KPM, dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 73.029 KPM. (Tabel 6.5).

Tabel 6.5 Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan III 2024

PROVINSI	KAB/KOTA	MEKANISME PENYALURAN	PENYALUR	SP2DKEMENSOS					
				TAHAP JULI		TAHAP AGUSTUS		TAHAP SEPTEMBER	
				JUMLAH KPM	NOMINAL Rp	JUMLAH KPM	NOMINAL Rp	JUMLAH KPM	NOMINAL Rp
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BRI	47.902	9.580.400.000	47.902	9.580.400.000	47.725	9.545.000.000
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	KOTA METRO	NON TUNAI	BRI	7.019	1.403.800.000	7.019	1.403.800.000	6.994	1.398.800.000
LAMPUNG	KOTA METRO	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BMRI	24.318	4.863.600.000	24.318	4.863.600.000	24.173	4.834.600.000
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BRI	85.665	17.133.000.000	85.665	17.133.000.000	85.360	17.072.000.000
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BRI	83.647	16.729.400.000	83.647	16.729.400.000	83.245	16.649.000.000
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BMRI	77.038	15.407.600.000	77.038	15.407.600.000	76.455	15.291.200.000
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BMRI	62.234	12.446.800.000	62.234	12.446.800.000	61.840	12.368.000.000
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	MESUJI	NON TUNAI	BMRI	16.745	3.349.000.000	16.745	3.349.000.000	16.670	3.334.000.000
LAMPUNG	MESUJI	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	PESAWARAN	NON TUNAI	BMRI	41.823	8.364.600.000	41.823	8.364.600.000	41.638	8.327.600.000
LAMPUNG	PESAWARAN	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	PESISIR BARAT	NON TUNAI	BRI	15.474	3.094.800.000	15.474	3.094.800.000	15.426	3.085.200.000
LAMPUNG	PESISIR BARAT	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	PRINGSEWU	NON TUNAI	BRI	29.999	5.999.800.000	29.999	5.999.800.000	29.769	5.953.800.000
LAMPUNG	PRINGSEWU	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	TANGGAMUS	NON TUNAI	BMRI	59.048	11.809.600.000	59.048	11.809.600.000	58.793	11.758.600.000
LAMPUNG	TANGGAMUS	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	TULANG BAWANG	NON TUNAI	BMRI	25.094	5.018.800.000	25.094	5.018.800.000	24.972	4.994.400.000
LAMPUNG	TULANG BAWANG	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BMRI	17.269	3.453.800.000	17.269	3.453.800.000	17.234	3.446.800.000
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG	WAY KANAN	NON TUNAI	BMRI	40.978	8.195.600.000	40.978	8.195.600.000	40.771	8.154.200.000
LAMPUNG	WAY KANAN	TUNAI	POS	0	0	0	0	0	0

PROVINSI	KAB/KOTA	MEKANISME PENYALURAN	PENYALUR	PENYALURAN											
				TAHAP JULI				TAHAP AGUSTUS				TAHAP SEPTEMBER			
				JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BRI	47.902	100,00%	9.580.400.000	100,00%	47.902	100,00%	9.580.400.000	100,00%	47.725	100,00%	9.545.000.000	100,00%
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	KOTA METRO	NON TUNAI	BRI	7.019	100,00%	1.403.800.000	100,00%	7.019	100,00%	1.403.800.000	100,00%	6.994	100,00%	1.398.800.000	100,00%
LAMPUNG	KOTA METRO	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BMRI	24.318	100,00%	4.863.600.000	100,00%	24.318	100,00%	4.863.600.000	100,00%	24.173	100,00%	4.834.600.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BRI	85.665	100,00%	17.133.000.000	100,00%	85.665	100,00%	17.133.000.000	100,00%	85.360	100,00%	17.072.000.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BRI	83.647	100,00%	16.729.400.000	100,00%	83.647	100,00%	16.729.400.000	100,00%	83.245	100,00%	16.649.000.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BMRI	77.038	100,00%	15.407.600.000	100,00%	77.038	100,00%	15.407.600.000	100,00%	76.455	100,00%	15.291.200.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BMRI	62.234	100,00%	12.446.800.000	100,00%	62.234	100,00%	12.446.800.000	100,00%	61.840	100,00%	12.368.000.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	MESUJI	NON TUNAI	BMRI	16.745	100,00%	3.349.000.000	100,00%	16.745	100,00%	3.349.000.000	100,00%	16.670	100,00%	3.334.000.000	100,00%
LAMPUNG	MESUJI	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	PESAWARAN	NON TUNAI	BMRI	41.823	100,00%	8.364.600.000	100,00%	41.823	100,00%	8.364.600.000	100,00%	41.638	100,00%	8.327.600.000	100,00%
LAMPUNG	PESAWARAN	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	PESISIR BARAT	NON TUNAI	BRI	15.474	100,00%	3.094.800.000	100,00%	15.474	100,00%	3.094.800.000	100,00%	15.426	100,00%	3.085.200.000	100,00%
LAMPUNG	PESISIR BARAT	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	PRINGSEWU	NON TUNAI	BRI	29.999	100,00%	5.999.800.000	100,00%	29.999	100,00%	5.999.800.000	100,00%	29.769	100,00%	5.953.800.000	100,00%
LAMPUNG	PRINGSEWU	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	TANGGAMUS	NON TUNAI	BMRI	59.048	100,00%	11.809.600.000	100,00%	59.048	100,00%	11.809.600.000	100,00%	58.793	100,00%	11.758.600.000	100,00%
LAMPUNG	TANGGAMUS	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	TULANG BAWANG	NON TUNAI	BMRI	25.094	100,00%	5.018.800.000	100,00%	25.094	100,00%	5.018.800.000	100,00%	24.972	100,00%	4.994.400.000	100,00%
LAMPUNG	TULANG BAWANG	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BMRI	17.269	100,00%	3.453.800.000	100,00%	17.269	100,00%	3.453.800.000	100,00%	17.234	100,00%	3.446.800.000	100,00%
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LAMPUNG	WAY KANAN	NON TUNAI	BMRI	40.978	100,00%	8.195.600.000	100,00%	40.978	100,00%	8.195.600.000	100,00%	40.771	100,00%	8.154.200.000	100,00%
LAMPUNG	WAY KANAN	TUNAI	POS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%



PROVINSI	KAB/KOTA	MEKANISME PENYALURAN	PENYALUR	PENYERAPAN											
				TAHAP JULI				TAHAP AGUSTUS				TAHAP SEPTEMBER			
				JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BRI	46.591	97,26%	9.318.200.000	97,26%	46.591	97,26%	9.318.200.000	97,26%	45.172	94,65%	9.034.400.000	94,65%
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	KOTA METRO	NON TUNAI	BRI	6.854	97,65%	1.370.800.000	97,65%	6.854	97,65%	1.370.800.000	97,65%	6.700	95,80%	1.340.000.000	95,80%
LAMPUNG	KOTA METRO	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BMRI	23.533	96,77%	4.706.600.000	96,77%	23.533	96,77%	4.706.600.000	96,77%	22.287	92,20%	4.457.400.000	92,20%
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BRI	83.452	97,42%	16.690.400.000	97,42%	83.452	97,42%	16.690.400.000	97,42%	80.960	94,85%	16.192.000.000	94,85%
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BRI	81.896	97,91%	16.379.200.000	97,91%	81.896	97,91%	16.379.200.000	97,91%	78.624	94,45%	15.724.800.000	94,45%
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BMRI	74.506	96,71%	14.901.200.000	96,71%	74.506	96,71%	14.901.200.000	96,71%	73.029	95,52%	14.605.800.000	95,52%
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BMRI	60.566	97,32%	12.113.200.000	97,32%	60.566	97,32%	12.113.200.000	97,32%	59.800	96,70%	11.960.000.000	96,70%
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	MESUJI	NON TUNAI	BMRI	16.348	97,63%	3.269.600.000	97,63%	16.348	97,63%	3.269.600.000	97,63%	16.053	96,30%	3.210.600.000	96,30%
LAMPUNG	MESUJI	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	PESAWARAN	NON TUNAI	BMRI	40.903	97,80%	8.180.600.000	97,80%	40.903	97,80%	8.180.600.000	97,80%	40.488	97,24%	8.097.600.000	97,24%
LAMPUNG	PESAWARAN	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	PESISIR BARAT	NON TUNAI	BRI	15.258	98,60%	3.051.600.000	98,60%	15.258	98,60%	3.051.600.000	98,60%	14.632	94,85%	2.926.400.000	94,85%
LAMPUNG	PESISIR BARAT	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	PRINGSEWU	NON TUNAI	BRI	29.345	97,82%	5.869.000.000	97,82%	29.345	97,82%	5.869.000.000	97,82%	28.456	95,59%	5.691.200.000	95,59%
LAMPUNG	PRINGSEWU	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	TANGGAMUS	NON TUNAI	BMRI	57.470	97,33%	11.494.000.000	97,33%	57.470	97,33%	11.494.000.000	97,33%	56.822	96,65%	11.364.400.000	96,65%
LAMPUNG	TANGGAMUS	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	TULANG BAWANG	NON TUNAI	BMRI	24.170	96,32%	4.834.000.000	96,32%	24.170	96,32%	4.834.000.000	96,32%	23.658	94,74%	4.731.600.000	94,74%
LAMPUNG	TULANG BAWANG	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BMRI	16.668	96,52%	3.333.600.000	96,52%	16.668	96,52%	3.333.600.000	96,52%	16.345	94,84%	3.269.000.000	94,84%
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	
LAMPUNG	WAY KANAN	NON TUNAI	BMRI	39.886	97,34%	7.977.200.000	97,34%	39.886	97,34%	7.977.200.000	97,34%	39.245	96,26%	7.849.000.000	96,26%
LAMPUNG	WAY KANAN	TUNAI	POS	0		0		0		0		0		0	

Sumber: HIMBARA, diolah





BAB 7

Prospek Perekonomian

Perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2024 diperkirakan tetap baik dalam kisaran 4,10 – 4,90%, terutama didukung oleh terjaganya permintaan domestik dan penguatan kinerja neraca perdagangan. Prospek peningkatan kinerja konsumsi pemerintah dan LNPRT diperkirakan menjadi pendukung utama tetap baiknya kinerja permintaan domestik sejalan dengan puncak penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak. Adapun neraca perdagangan Provinsi Lampung diperkirakan menguat seiring peningkatan ekspor komoditas unggulan. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian didukung oleh kinerja LU Industri Pengolahan yang meningkat seiring kenaikan permintaan ekspor.

Pada tahun 2025, pemulihan ekonomi Provinsi Lampung terus berlanjut dengan pertumbuhan yang diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,40 – 5,20%. Dari sisi permintaan, prospek tersebut diperkirakan didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang diperkirakan meningkat di tengah normalisasi kinerja konsumsi pemerintah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, prospek tersebut didukung oleh perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan peningkatan LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring normalisasi dampak El Nino dan kondisi cuaca yang lebih kondusif.

Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2024 diperkirakan tetap terjaga pada sasaran, walaupun lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024. Adapun beberapa risiko yang berpotensi mendorong inflasi menjelang pertengahan tahun diantaranya terhadap kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Lebih lanjut, prospek inflasi keseluruhan tahun 2024 diperkirakan dalam level yang terjaga. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Tabel 7.1 Proyeksi Perekonomian Global 2024

SUBSTANSI	World Economic Outlook - IMF, October 2024				
	2023	2024F	Bias/Revisi WEO July 2024	2025F	Bias/Revisi WEO July 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%; yoy)					
Dunia	3,3	3,2	0,0	3,2	-0,1
Negara Maju	1,7	1,8	0,1	1,8	0,0
AS	2,9	2,8	0,2	2,2	0,3
Eropa	0,4	0,8	-0,1	1,2	-0,3
Jepang	1,7	0,3	-0,4	1,1	0,1
Negara Berkembang	4,4	4,2	0,0	4,2	-0,1
Tiongkok	5,2	4,8	-0,2	4,5	0,0
India	8,2	7,0	0,0	6,5	0,0
Laju Inflasi (%; yoy)					
Dunia	6,7	5,8	-0,1	4,3	-0,1
Negara Maju	4,6	2,6	-0,1	2	-0,1
Negara Berkembang	8,1	7,9	-0,1	5,9	0,0
Indikator lainnya (%; yoy)					
World Trade Volume	0,8	3,1	0	3,4	0
Oil Price	-16,4	0,9	0,1	-10,4	-4,4

Sumber: IMF, 2024

7.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

7.1.1. Prospek Ekonomi Global dan Nasional

Kinerja perekonomian global diperkirakan melambat pada tahun 2024 sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian global.

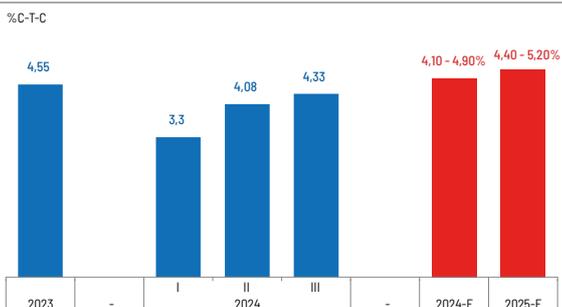
International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) periode Oktober 2024 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,20% pada tahun 2024 dan 2025 (Tabel 7.1). Proyeksi tahun 2024 tersebut *on track* terhadap WEO periode Juli 2024, namun terdapat revisi bawah pada prospek keseluruhan tahun 2025 disebabkan revisi yang lebih rendah terhadap prospek pertumbuhan negara-negara maju di kawasan Eropa dan negara-negara. Prospek tertahannya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang terutama dipengaruhi oleh gangguan produksi dan pengiriman komoditas minyak bumi seiring tensi geopolitik yang belum mereda dan cuaca ekstrem di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah dan Afrika.

Pertumbuhan ekonomi di negara maju diperkirakan melambat pada tahun 2024 dan tetap stabil di tahun 2025. Pertumbuhan

ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2024 diperkirakan tetap baik dan relatif stabil sejalan dengan prospek konsumsi yang lebih kuat akibat peningkatan upah riil, terutama di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah. Pertumbuhan Amerika Serikat diperkirakan melambat menjadi 2,5% pada tahun 2025 seiring berlanjutnya pengetatan kebijakan fiskal dan ekspansi pasar tenaga kerja yang melambat. Sementara itu, prospek pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa diperkirakan meningkat menjadi 0,8% pada tahun 2024, didorong oleh kinerja ekspor yang lebih baik. Peningkatan pertumbuhan kawasan Eropa diperkirakan berlanjut menjadi 1,2% pada tahun 2025 seiring peningkatan upah riil yang berpotensi mendorong konsumsi dan pelonggaran kebijakan moneter yang secara bertahap diharapkan dapat mendorong kinerja investasi.

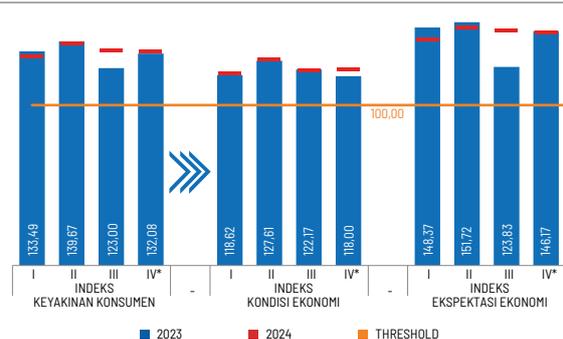
Pertumbuhan di kawasan *emerging* Asia diperkirakan tetap kuat meski mengalami perlambatan. Hal tersebut dengan prospek

berlanjutnya perlambatan kinerja perekonomian Tiongkok dan India yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi India diperkirakan tumbuh moderat dari 8,20%



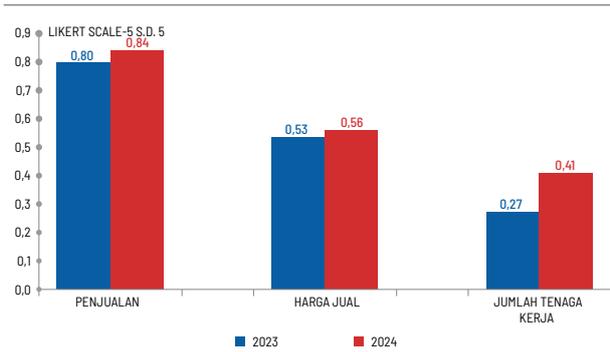
Sumber: BPS, diolah (perhitungan tim teknis)

Grafik 7.1 Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung



Sumber: Survei Konsumen

Grafik 7.2 Survei Konsumen Bank Indonesia



Sumber: Liaison KPw Bank Indonesia Provinsi Lampung

Grafik 7.3 Ekspektasi Pelaku Usaha atas Kegiatan Usaha ke Depan

pada tahun 2023 menjadi 7,00% pada tahun 2024 dan 6,5% pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh normalisasi faktor *pend up demand* pasca pandemi Covid-19. Sementara itu, prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan lebih bertahap, yaitu dari secara marginal dari 5,2% pada tahun 2024 menjadi 4,8% pada tahun 2024 dan 4,5% pada tahun 2025. Perспек perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tersebut terutama disebabkan oleh kinerja sektor real estate yang masih lemah dan keyakinan konsumen yang masih rendah, namun demikian prospek perbaikan kinerja ekspor dan kebijakan fiskal yang ekspansif diperkirakan berpotensi mendukung pertumbuhan jangka pendek yang lebih tinggi.

Bank Indonesia memprediksikan kinerja perekonomian Indonesia tetap kuat dalam kisaran 4,8 - 5,6% pada 2025 dan 4,9 - 5,7% pada 2026. Peningkatan tersebut diperkirakan akan didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi, serta ekspor yang masih cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Di samping itu nilai tukar Rupiah pada tahun 2025 akan dijaga tetap stabil.

7.1.2. Prospek Ekonomi Provinsi Lampung

Perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2024 diperkirakan tetap baik dalam kisaran 4,10 - 4,90%. Kinerja perekonomian Provinsi Lampung yang tetap baik diperkirakan didukung oleh terjaganya permintaan domestik dan penguatan kinerja neraca perdagangan. Prospek peningkatan kinerja konsumsi pemerintah dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tinggi (LNPR) diperkirakan menjadi pendukung utama tetap baiknya kinerja permintaan domestik sejalan dengan puncak penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Sementara itu, neraca perdagangan Provinsi Lampung diperkirakan tumbuh lebih kuat seiring peningkatan kinerja ekspor komoditas unggulan.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 diperkirakan tetap kuat, namun sedikit melambat sejalan dengan prospek penurunan kinerja lapangan usaha utama. Penurunan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan akibat dampak lanjutan dari tingginya intensitas El Nino pada akhir tahun 2023 diperkirakan akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan sebagian besar tenaga kerja, terutama sektor tanaman pangan. Lebih lanjut, optimisme konsumen di Provinsi



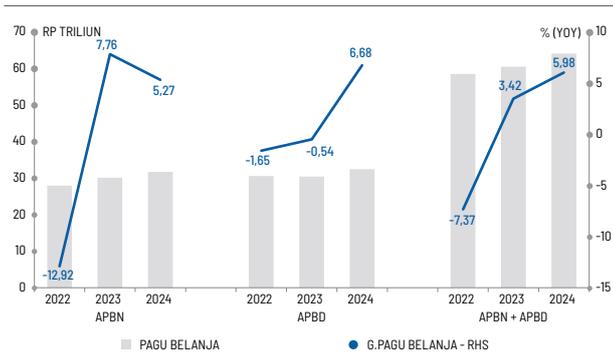
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.4 UMP Provinsi Lampung

Lampung di sepanjang tahun 2024 terpantau cukup baik, yakni terjaga di zona ekspansif (>100) meskipun berada dibawah level tahun sebelumnya (Grafik 7.1). Meskipun demikian, optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian ke depan cenderung meningkat seiring penurunan laju inflasi dan permintaan ekspor yang meningkat. Hal ini terkonfirmasi dari hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap penjualan dan penyerapan tenaga kerja di tengah kenaikan UMP Lampung sebesar 3,16% pada tahun 2024 (Grafik 7.2 dan 7.3). Di samping itu, penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 diperkirakan turut memengaruhi dinamika perekonomian Provinsi Lampung, dimana belanja yang timbul dari aktivitas politik, termasuk pengeluaran pemerintah dan LNPRP berpotensi menstimulus daya beli masyarakat.

Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat sejalan dengan kenaikan pagu belanja APBD tahun 2024. Pagu belanja APBD se-Provinsi Lampung pada tahun 2024 tumbuh 6,68% (yoy), meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,54% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pagu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang masing-masing tumbuh 7,93% (yoy) dan 4,91% (yoy), meningkat jika dibandingkan 3,27% (yoy) dan -0,92% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pagu belanja APBN di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tumbuh 5,27% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 7,76% (yoy) pada tahun sebelumnya. Tetap positifnya pertumbuhan pagu belanja APBN di Provinsi Lampung didorong oleh meningkatnya pagu dana transfer yang tumbuh 6,10% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4,17% (yoy) pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pagu belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi Lampung pada tahun 2024 secara keseluruhan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 7.4).

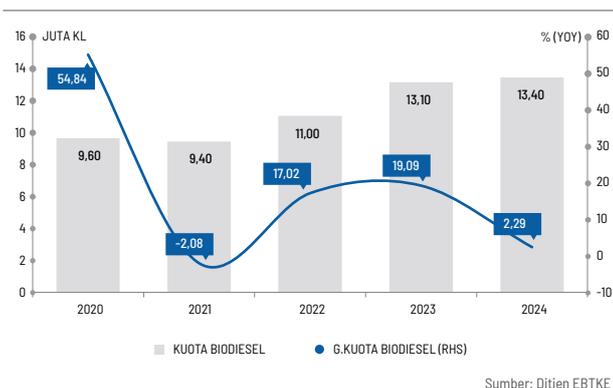
Kinerja investasi pada tahun 2024 diperkirakan melambat seiring prospek tertahanya investasi swasta. Prospek tersebut sejalan dengan berakhirnya pembangunan sejumlah proyek investasi bernilai besar, seperti rampungnya pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Margatiga dan dikeluarkannya Kawasan Industri Tanggamus dari daftar PSN, serta progress pembangunan 17 ruas



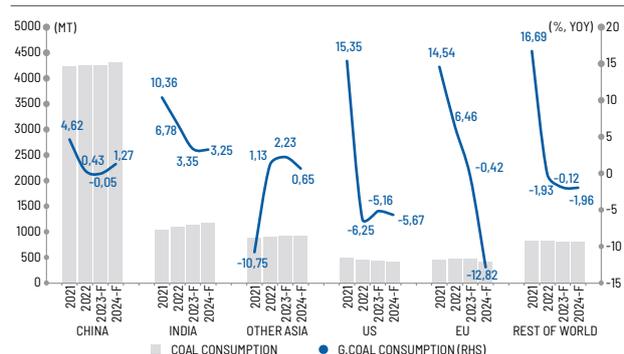
Grafik 7.5 Pagu Belanja Pemerintah di Provinsi Lampung

jalan provinsi dan kabupaten/kota yang telah mencapai 85% pada tahun 2023. Di samping itu, investasi swasta diperkirakan melambat seiring kecenderungan sikap *wait and see* investor pada periode ketidakpastian politik selama masa pemilu dan transisi kepemimpinan baru. Meski melambat, kinerja investasi Provinsi Lampung pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif didukung oleh berlanjutnya pembangunan proyek investasi bernilai besar lainnya, seperti PSN Bakauheni Harbour City (BHC) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM Way Rilau, serta ekspansi sektor industri pengolahan dan pertambangan.

Kinerja sektor eksternal diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2024 sejalan dengan prospek peningkatan ekspor. Pada tahun 2024, kinerja ekspor Provinsi Lampung diperkirakan meningkat didorong oleh perbaikan faktor produksi di tengah tetap tingginya IHKEI untuk komoditas ekspor utama (CPO, Batu Bara dan Kopi Robusta). Kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya diperkirakan tetap baik ditengah masih tetap baiknya pertumbuhan ekonomi negara maju yang menjadi tujuan ekspor utama, meski masih dibayangi oleh konflik geopolitik serta penurunan permintaan Uni Eropa sebagai dampak dari penerapan EUDR. Adapun kinerja ekspor kopi robusta diperkirakan mengalami peningkatan didukung oleh perbaikan faktor produksi di tengah momentum peningkatan harga kopi robusta dunia. Sementara itu, kinerja ekspor batu bara diperkirakan melambat disebabkan oleh permintaan eksternal yang termoderasi akibat peningkatan produksi di Tiongkok dan melambatnya konsumsi batu



Grafik 7.7 Kuota Biodiesel



Grafik 7.6 Konsumsi Batubara Global

bara dunia (Grafik 7.5). Di sisi lain, kinerja impor pada tahun 2024 juga diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek tetap kuatnya kinerja LU Industri Pengolahan.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan permintaan domestik pada tahun 2024 terutama didorong oleh prospek peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan di tengah melambatnya kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan meningkat sejalan dengan berlanjutnya implementasi program B35, serta kuatnya permintaan ekspor produk industri makanan dan minuman yang juga diikuti dengan normalisasi harga bahan baku impor. (Grafik 7.6 dan Tabel 7.2). Selain itu, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian juga diperkirakan meningkat dan mendukung tetap baiknya kinerja perekonomian pada tahun 2024, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya produktivitas *lifting* minyak di perairan Lampung Timur pasca revitalisasi *main oil line* (pipa bawah air) milik Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh prospek perlambatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan akibat dampak tingginya intensitas El Nino pada akhir tahun 2023 dan bencana banjir pada awal tahun 2024 yang berpengaruh terhadap penurunan produktivitas tanaman pangan. Sejalan dengan itu, kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran diperkirakan turut mengalami perlambatan dipengaruhi penurunan produksi pertanian dan normalisasi aktivitas perdagangan komoditas antar daerah, sejalan dengan perbaikan produksi tanaman pangan di wilayah Jawa.

Tabel 7.2 Harga Komoditas Ekspor dan Impor Utama Provinsi Lampung

KOMODITAS	SATUAN	2023	2024-F	2025-F
Impor				
Energi	Indeks	106,90	100,80	94,50
Pupuk	Indeks	153,50	116,90	115,20
Gula	USD/Kg	0,52	0,45	0,46
Ekspor				
Kopi Robusta	USD/Kg	2,63	4,50	4,20
Palm Oil	USD/Mt	886,00	925,00	860,00
Batubara	USD/Mt	172,80	137,00	120,00

Sumber: World Bank Commodity Outlook, Oktober 2024

Pada tahun 2025, pemulihan ekonomi Provinsi Lampung terus berlanjut dengan pertumbuhan yang diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,40 – 5,20%. Dari sisi permintaan, prospek kinerja perekonomian yang lebih baik diperkirakan didukung konsumsi rumah tangga dan investasi di tengah normalisasi kinerja konsumsi pemerintah. Kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan kinerja subsektor tanaman pangan dan penyesuaian upah minimum provinsi (UMP). Aktivitas investasi swasta diperkirakan lebih kuat seiring meredanya ketidakpastian pasca puncak penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. Sementara itu, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan melambat disebabkan normalisasi belanja barang dan jasa serta belanja hibah pasca berakhirnya penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, kinerja sektor eksternal diperkirakan tetap kuat, namun sedikit melambat sejalan dengan prospek penurunan harga komoditas ekspor utama (kopi robusta, minyak kelapa sawit dan batubara)(Tabel 7.2).

Dari sisi lapangan usaha, prospek peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Lampung didukung oleh kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diperkirakan meningkat didorong oleh perbaikan produksi tanaman pangan seiring normalisasi dampak El Nino dan kondisi cuaca yang lebih kondusif. Perbaikan faktor produksi tanaman pangan juga didukung oleh implementasi program intensifikasi dan ekstensifikasi (cetak sawah baru) dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional, serta beroperasinya PSN Bendungan Margatiga di Lampung Timur. Sejalan dengan itu, kinerja LU Perdagangan dan Penjualan Eceran diperkirakan turut meningkat seiring perbaikan produksi tanaman pangan yang merupakan salah satu komoditas perdagangan utama, serta penyelenggaraan event strategis yang lebih intensif. Sementara itu, kinerja LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan diperkirakan tetap kuat sejalan dengan prospek mulai bergulirnya investasi bangunan dan implementasi penggunaan biodiesel 40 (B40) pada tahun 2025. Meskipun peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih terbuka pada tahun 2025, namun beberapa risiko seperti ketidakpastian global yang masih tinggi, berlanjutnya fenomena La Nina dan perlambatan perekonomian mitra dagang utama perlu diantisipasi dan penting untuk terus dicermati.

7.2 INFLASI

Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 diperkirakan terjaga pada kisaran 2,5±1%. Laju inflasi pada menjelang akhir 2024 terutama disebabkan oleh akselerasi permintaan menjelang periode Pilkada serentak seiring dengan meningkatnya aktivitas kampanye. Aktivitas kampanye diperkirakan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan bahan pangan strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, dan gula pasir.

Lebih lanjut, tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau sejalan dengan kondisi La Nina pada akhir tahun 2024, walaupun dampaknya tidak sekuat El Nino pada tahun sebelumnya. Meski demikian, laju inflasi kelompok pangan ini dapat diminimalisir melalui koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Di samping itu, peningkatan jumlah uang beredar berpotensi menyebabkan pergeseran permintaan agregat dan mendorong peningkatan harga, terutama pada komoditas di kelompok inti. Di sisi lain, ketidakpastian kondisi perekonomian global ke depan masih cukup tinggi, disertai dengan disrupsi rantai pasok, krisis energi, dan bahan pangan.

Menuju tahun 2025, tingkat inflasi Provinsi Lampung diperkirakan melambat dibandingkan dengan tahun 2024. Hal tersebut disebabkan oleh kembalinya siklus iklim yang berpotensi menjaga rantai pasok produksi pangan yang berdampak terhadap terkendalinya inflasi pangan di tengah berlalunya periode politik yang menahan inflasi inti. Adapun hal tersebut sejalan dengan prakiraan Bank Dunia¹ dan *International Monetary Fund (IMF)*² bahwa inflasi akan relatif melambat dibandingkan dua tahun sebelumnya yang didorong oleh melandainya inflasi komoditas energi dan makanan.

7.3 REKOMENDASI

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang lebih optimal dengan pencapaian sasaran inflasi di tengah instabilitas global dan meningkatnya risiko inflasi akibat tekanan eksternal, maka diperlukan upaya penguatan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dirangkum untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi:

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang lebih optimal dengan pencapaian sasaran inflasi di tengah instabilitas global dan meningkatnya risiko inflasi akibat tekanan eksternal, maka diperlukan upaya penguatan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dirangkum untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi:

1. Mendorong peningkatan produktivitas sektor primer yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan sektor primer dan mendukung kesejahteraan petani, melalui pengembangan infrastruktur pertanian yang mendukung aksesibilitas kawasan pertanian dengan mengembangkan jalan, optimalisasi dan revitalisasi irigasi dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu petani perlu mengadopsi teknologi pertanian untuk modernisasi dan diversifikasi sektor pertanian yang dapat menghasilkan produk yang bernilai tambah termasuk perluasan implementasi best agricultural practice dengan dukungan bibit

¹ World Bank Commodity Market Outlook October 2024

² IMF World Economic Outlook October 2024

- unggul dan pupuk organik, intensifikasi indeks pertanaman (IP), serta adopsi teknologi pertanian seperti penggunaan internet of things (IoT).
2. Perlunya penyusunan Strategi Pembangunan Industri Daerah yang bertujuan untuk membangun struktur industri yang kuat, berdaya saing tinggi, dan berbasis inovasi dan teknologi dalam rangka mencapai arah pembangunan jangka panjang Lampung Emas 2045. Strategi industri tersebut dijalankan melalui tiga tahap yaitu (1) pengembangan industri andalan, (2) pengembangan Kawasan Industri, dan (3) penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri. Industri andalan yaitu industri prioritas yang menyerap tenaga kerja yang banyak dan berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian di masa datang. Saat ini industri andalan yang dimiliki Lampung adalah industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Dengan demikian diperlukan intensifikasi program hilirisasi produk pertanian, perkebunan, perikanan maupun pertambangan dimana bahan baku yang dihasilkan di Lampung dapat diproses dan diolah di dalam Provinsi Lampung sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Sementara kawasan Industri di Lampung dapat dikembangkan dekat dengan akses transportasi dan logistik seperti pelabuhan, bandara maupun stasiun. Untuk itu diperlukan kesiapan Pemda dalam menyediakan infrastruktur yang lebih baik seperti jaringan listrik, jalan dan transportasi, serta persiapan sumber daya manusia yang lebih trampil.
 3. Memperkuat peran belanja APBN dan APBD sebagai stimulus kinerja perekonomian dan pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan efektivitas dan perluasan multiplier effect dari program pengembangan ekonomi dan pengendalian harga Pemerintah Daerah, serta optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
 4. Perlunya penguatan akselerasi program transformasi digitalisasi nasional melalui akseptasi digital yang semakin meluas terutama digitalisasi transaksi keuangan Pemda dan inklusifitas penguatan UMKM. Strategi penguatan ekosistem transaksi digital daerah dapat dilakukan dengan cara (1) inovasi dan akseptasi digital termasuk penguatan manajemen risiko dan perlindungan konsumen, (2) penguatan infrastruktur sistem pembayaran yang stabil, modern, dan sesuai standar internasional termasuk percepatan transaksi keuangan Pemda, dan (3) konsolidasi peran perbankan khususnya BPD dan industri sistem pembayaran dalam percepatan digitalisasi daerah.
 5. Mendorong upaya pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru melalui optimalisasi potensi pariwisata di berbagai wilayah Provinsi Lampung yang diiringi pemantapan akses dan amenities.
 6. Mendorong program local champion UMKM dengan mempersiapkan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Program tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di pasar global. Selain itu, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah terus mendorong pengembangan ekonomi keuangan syariah melalui program kemandirian ekonomi pesantren dan implementasi rantai nilai halal dengan penguatan ekosistem pangan halal berbasis pangan halal.
 7. Penguatan sinergi pengendalian inflasi dalam TPID untuk menjaga daya beli masyarakat, melalui:
 - a. Penguatan dan perluasan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di daerah; dan
 - b. penguatan strategi 4K dalam pengendalian harga, mencakup (1) menjaga keterjangkauan harga melalui operasi pasar dan penguatan kehandalan early warning system untuk mengantisipasi kenaikan harga secara dini; (2) memastikan ketersediaan pasokan melalui implementasi Toko Pengendalian Inflasi dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD); (3) menjaga kelancaran distribusi melalui subsidi ongkos angkut dan optimalisasi program tol laut dan mobilisasi pangan Bapanas; serta (4) menjaga komunikasi efektif melalui forum koordinasi rutin, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan awareness TPID terhadap perkembangan inflasi, serta menjaga transparansi ketersediaan dan kesiapan stok dan harga barang kebutuhan pokok kepada masyarakat untuk mencegah panic buying.



Administered prices

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Andil Inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot Inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

CAR

Capital Adequacy Ratio. Merupakan ratio yang menunjukkan ukuran perbandingan antara modal yang dimiliki suatu bank dengan tingkat risiko yang terjadi.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

DPK

Dana Pihak Ketiga. Yaitu dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

IEK

Indeks Ekspektasi Konsumen. Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.

IHK

Indeks Harga Konsumen. Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

IKE

Indeks Kondisi Ekonomi. Salah satu pembentukan IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

IKK

Indeks Keyakinan Konsumen. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

IPM

Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran Kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli.

LDR

Loan to Deposit Ratio. Merupakan ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

KLM

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Migas

Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

NPL

Non Performing Loan. Merupakan klasifikasi yang menunjukkan tingkat kesehatan terhadap pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

RHS

Right Hand Scale (axis kanan).

PAD

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan yang di peroleh dari aktifitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

QTQ

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya

Sektor Ekonomi Dominan

Sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Share Effect

Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB.

Share of Growth

Kontribusi pertumbuhan suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB.

Volatile Food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor musiman.

YOY

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



Halaman ini sengaja dikosongkan



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Sultan Hasanuddin No.38,
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35211
Telp. (0721) 496355 / Fax. (0721) 481131
www.bi.go.id

